



Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.
Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H. | Dr. Yudi Krisno Wicaksono, M.IP.
Dr. Hj. Dian Ferricha, S.H., M.H. | Ahmad Zakky Zain Naufal, S.Pd

Optimalisasi Pendidikan,

KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

dalam Membentuk Karakter Warga Negara



Silvana Oktanisa | Lestari Wulandari | Kamarudin | Nur Kholis
Natalia Heni Primawati Iqbal | Sari Misnaini | Zaliah | Hadi Winarko | Aminuddin
Hasdin | Agustina Purnami Setiawi | Liza Utama | Rosdiani Nasution |
Nurhalimah Siahaan | Deri Darfin | Ayu Puspasari | Amila Shaleha
Ismaul Fitroh | Yosef Adityanto Aji | A.Ardiansyah | Agustiyanta
Rida Safuan Selian | Carolina Fransiska | Inayah | Isna Nurul Inayati |
Sudin Sanjaya | Almira Rayyah Shadriah Fahrur | Muharrir |
Hidayat Edi Santoso | Shinta Meisuri

| Silvana Oktanisa | Lestari Wulandari | Kamarudin | Nur Kholis
Natalia Heni Primawati	Iqbal	Sari Misnaini	Zaliah
Hadi Winarko	Aminuddin	Hasdin	
Agustina Purnami Setiawi	Liza Utama	Rosdiani Nasution	
Nurhalimah Siahaan	Deri Darfin	Ayu Puspasari	
Amila Shaleha	Ismaul Fitroh	Yosef Adityanto Aji	
A.Ardiansyah	Agustiyanta	Rida Safuan Selian	
Carolina Fransiska	Inayah	Isna Nurul Inayati	
Sudin Sanjaya	Almira Rayyah Shadriah Fahru	Muharrir	
Hidayat Edi Santoso	Shinta Meisuri		

OPTIMALISASI PENDIDIKAN, KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA

Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.

Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H.

Dr. Yudi Krisno Wicaksono, M.IP.

Dr. Hj. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Ahmad Zakky Zain Naufal, S.Pd.

Pengantar:

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.

Direktur Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



**AKADEMIA
PUSTAKA**

Optimalisasi Pendidikan, Kewarganegaraan dan Hukum dalam Membentuk Karakter Warga Negara

Copyright © Silvana Oktanisa, dkk. 2026.

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Penulis : Silvana Oktanisa, dkk

Editor : Adi Wijayanto, dkk

Layout : Endina Putri Shavyra

Desain cover : @moonsdigitalmedia

viii + 181 hlm : 14 x 21 cm

ISBN : 978-623-157-250-9

Cetakan Pertama, April 2026

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Jl. Raya Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

Telp: 081807413208

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

Kata Pengantar

Alhamdulillahi Rabbilalamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha agung. Berkat rahmatnya, buku edisi bulan MARET tahun 2026 yang berjudul “**Optimalisasi Pendidikan, Kewarganegaraan Dan Hukum Dalam Membentuk Karakter Warga Negara**” dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut tidak lepas juga atas sumbangsih ide / gagasan dan pemikiran dari para pakar pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh indonesia.

Ucapan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, penulis dan masih banyak pihak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu

Buku ini diharapkan dapat memberi warna dan bisa sebagai tambahan referensi dalam segi ilmu pengetahuan karena dalam pembahasannya terdapat berbagai pemikiran dari para ahli maupun dari pihak yang sudah bergelut dengan dunia keilmuan yang sesuai dengan tema pembahasannya masing-masing. tentunya didalam buku ini menggunakan kata kalimat maupun narasi yang ringan dan mudah dipahami.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam menjawab tantangan pembangunan karakter bangsa di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Pendidikan, kewarganegaraan, dan hukum merupakan tiga pilar penting yang saling berkaitan dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kesadaran hukum,

serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Terbitnya buku ini sangatlah tepat untuk pengetahuan pembaca di semua kalangan, karena sebagai sumber pengetahuan untuk mengenal lebih luas tentang pentingnya suatu karakter berwarganegara yang baik dan bijaksana.

Semoga tulisan ringan dengan berbagai topik yang menarik yang disampaikan penulis memberi manfaat bagi para pembaca.

Tulungagung, 13 Maret 2026

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Direktur Pascasarjana UIN SATU
*(Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung)*

Daftar Isi

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag..... iv

Daftar Isi v

BAB I

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN BERBANGSA

Implementasi, Manfaat dan Problematika Perwujudan Wawasan Nusantara

Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si..... 2

Pembelajaran Pancasila Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sehari-Hari

Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H..... 8

Transformasi Nilai-Nilai Lokal Wisdow Buton terhadap Pendidikan Karakter melalui Pendekatan *Deep Learning*

Dr. Kamarudin, S.Pd., M.Pd..... 13

Strategi Membumikan Pancasila

Nur Kholis, S.Pd.I. 19

Penerapan Etika Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Natalia Heni Primawati., S.Fil., M.Phil..... 25

Integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran PPKn	
Iqbal, M.Pd.....	32
Dampak Literasi Digital terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Era Teknologi pada Mahasiswa	
Sari Misnaini S.Pd.,M.Pd.....	38
Berdirinya Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Majapahit dalam Perkembangan Sejarah Bangsa Indonesia	
Zaliah, S.Sos., M.Hum.....	45
Merenung dan Olah Pikir dalam Kegiatan Filsafat untuk Mengenal Diri dan Alam Semesta	
Hadi Winarko, S.Sos. M.Si.....	49

BAB II

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER

Implementasi Nilai Pancasila oleh Mahasiswa/I UIN Sumatera Utara dalam Peristiwa Bencana Alam di Sumatera Utara	
Dr. Aminuddin, S.Sos, MA, C.IP	54
Budaya Kewarganegaraan dalam Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Sumber Belajar Siswa	
Dr. Hasdin, S.Pd., M.Pd.....	60
Dari Nilai Pancasila ke Aksi Nyata: Integrasi PPKn, Olahraga, dan Matematika melalui Program Jalan Sehat dan Audit Sampah	
Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.	67
Memaknai Betapa Pentingnya Konsep Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	
Liza Utama, S.H., M.H.....	72

Upaya Guru Agama dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama pada Peserta Didik di SMP Swasta Budi Dharma Takengon	
Dra. Rosdiani Nasution, MA.....	78
Dinamika Evaluasi Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar: Tantangan dan Inovasi di Era Kurikulum Merdeka	
Nurhalimah Siahaan, S.Pd., M.Pd.	83
Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Sistem Filsafat Pancasila.	
Deri Darfin, S.Sos, M.Si.....	88
Negara dan Konstitusi	
Ayu Puspasari, S.H., M.H.....	94
Konsep Dasar dan Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	
Amila Shaleha.....	99

BAB III

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI, BUDAYA, HUKUM DAN LINGKUNGAN

Membangun Karakter Bangsa: Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS	
Dr. Ismaul Fitroh, S.Pd., M.Pd.....	106
Komodifikasi dan Autentisitas: Menemukan Kembali Akar Gerak Tubuh dalam Dunia Global	
Dr. Yosef Adityanto Aji, S.Sn., MA.	112
Strategi Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Nilai Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah	
Dr. A. Ardiansyah.SE, M.Pd.....	117

Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Olahraga	
Dr. Agustiyanta, M.Pd.	123
Motif Batik Kabupaten Subulussalam	
Dr. Rida Safuan Selian, S.Pd.,M.Pd.....	129
Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar	
Carolina Fransiska, S.Pd., M.Pd	136
Paradigma UoS dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Kecerdasan Buatan	
Inayah, M.Pd.....	142
Ekstrakurikuler Pramuka dan Penguatan Karakter di Era Global	
Isna Nurul Inayati, M.Pd.I.....	149
Ketika Kebersihan Menjadi Ibadah: Gerakan Labas Sebagai Budaya Sekolah Berkarakter	
Sudin Sanjaya, S.Pd.I.....	155
Menanamkan Nilai Keberlanjutan sebagai Upaya Pendidikan Karakter Lingkungan Siswa.	
Almira Rayyah Shadriah Fahru, S.Pd., M.Pd.....	161
Dekonstruksi Teleologi Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Modern	
Muharrir, S.H., M.H.....	165
SEMATA (Sedekah Minyak Jelantah): Inovasi Program Adiwiyata dalam Menumbuhkan Kepedulian Lingkungan dan Karakter Peduli Sosial di SDN Marunda 05	
Hidayat Edi Santoso,S.Pd. M.A.....	171
Integrasi Nilai Karakter dan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka	
Shinta Meisuri.....	177



BAB I IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN BERBANGSA

Implementasi, Manfaat dan Problematika Perwujudan Wawasan Nusantara

*Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si.¹
Politeknik Negeri Sriwijaya*

“Wawasan nusantara memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya sebagai ruang hidup yang satu atau utuh.”

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia Wawasan nusantara merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan nusantara memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Pengertian wawasan nusantara berdasarkan Winarno (2019:142-144) dapat diartikan secara etimologis dan terminologis.

1. Etimologis

Wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur, Nusantara artinya

¹ Penulis lahir di Palembang, 08 Oktober 1974, merupakan Dosen di Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, menyelesaikan studi S1 Prodi Administrasi Negara di FISIP Universitas Sriwijaya tahun 1998, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya tahun 2013.

kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Nusantara juga dapat diartikan sebagai pengganti kata Indonesia.

2. Terminologis

Pengertian wawasan nusantara ada 3 (tiga) pendapat yaitu pertama menurut Prof. Wan Usman wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua wawasan nusantara dalam GBHN 1998 wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga pengertian wawasan nusantara menurut kelompok kerja wawasan nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan MPR dibuat Lemhanas tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pendapat dari ketiga pakar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia. Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan RI adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Paradigma Ketatanegaraan RI

No.	Perangkat Ketatanegaraan	Kedudukan
1.	Pembukaaan UUD 1945	Landasan Idiil
2.	UUD 1945	Landasan Konstitusional
3.	Wawasan Nusantara	Landasan Visional
4.	Ketahanan Nasional	Landasan Konsepsional
5	Dokumen Rencana Pembangunan	Landasan Operasional

Implementasi Wawasan Nusantara Masa Reformasi

Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, yaitu:

1. Politik, menciptakan iklim penyelenggaran negara yang sehat, dinamis tampak pada pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil, merata serta bertanggung jawab dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik dan kelestariaannya.
3. Sosial budaya, menciptakan sikap batiniyah dan rohaniah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.

4. Pertahanan Keamanan, menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. Ini akan menjadi modal utama menggerakkan partisipasi setiap warga negara untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan negara (Rahayu, 2007:209-210).

Meski demikian, konsepsi politik ketatanegaraan RI yang bercirikan nusantara tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 A UUD 1945 Amandemen IV dan diatur dalam UU No. 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia.

Manfaat Wawasan Nusantara

Manfaat Wawasan Nusantara terdiri atas:

1. Diterima dan diakuinya konsep wawasan nusantara di forum internasional. Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia internasional.
2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara luas wilayah Indonesia menjadi 5 juta km² sebagai satu kesatuan wilayah.
3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber daya minyak ditemukan di wilayah teritorial dan landas kontinen.
4. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
5. Wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, wawasan nusantara sebagai alat penyatuan antara rakyat, wilayah dan pemerintah.

Problematika Wawasan Nusantara

Problematika yang dihadapi wawasan nusantara ada 4 (empat) yaitu:

1. Persoalan garis batas atau wilayah Indonesia dengan negara lain yaitu batas darat, laut dan udara. Persoalan penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain oleh karena negara akan saling klaim mengenai pemilikan suatu wilayah.
2. Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi. Masuknya nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia.
3. Adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau terluar ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai daerah pencarian ikan secara ilegal, tempat transit kejahatan lintas negara, daerah pendudukan asing, keterbatasan komunikasi dan transportasi serta rawan kemiskinan dan ketidakadilan. Ada 12 pulau terluar di Indonesia menurut Abubakar (2006:15-18):
 - 1) Pulau Rondo, ujung paling barat Indonesia berbatasan dengan India dan Thailand.
 - 2) Pulau Sekatung, ujung utara berbatasan dengan Vietnam.
 - 3) Pulau Nipa, berbatasan dengan Singapura.
 - 4) Pulau Berhala, berbatasan dengan Malaysia
 - 5) Pulau Marore, berbatasan dengan Filipina.
 - 6) Pulau Miangas, berbatasan dengan Filipina.
 - 7) Pulau Asutubun, berbatasan dengan Australia.
 - 8) Pulau Batek, berbatasan dengan Timor Leste.
 - 9) Pulau Sebatik, berbatasan dengan Malaysia.
 - 10) Pulau Fani, berbatasan dengan Republik Palau, ujung utara Papua.
 - 11) Pulau Fanildo, berbatasan dengan Republik Palau.
 - 12) Pulau Wetar, berbatasan dengan Timor Leste.

Kedua belas luar terluar ini diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah untuk tidak terjadi disinetgrasi bangsa.

4. Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang dan dapat melemahkan pembangunan wawasan nusantara. Daerah yang tertutup bagi pendatang, transmigran dan pejabat publik haruslah putra daerah (Winarno, 2019:157-165). Kondisi ini ada sisi positifnya bahwa putra daerah berkewajiban membangun daerahnya. Sisi negatifnya yang bukan putra daerah tidak terpilih dan ini dapat menimbulkan chauvinisme yang menganggap daerahnya yang terbaik.

Namun dengan segala implementasi, manfaat dan problematika wawasan diperlukan aspek kesadaran warganegara, karena menyangkut sikap mental masyarakat Indonesia sendiri untuk menyadari bahwa wawasan nusantara memerlukan peran serta warga negaranya untuk mejadi keutuhan dan kesatuan wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana laut bukanlah pemisah tapi laut merupakan penghubung wilayah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Mustafa. 2006. Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Rahayu, Minto. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta. Grasindo.
- Winarno. 2019 . *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Pembelajaran Pancasila Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sehari-Hari

Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H.²
Universitas Cenderawasih

“Pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal memperkuat internalisasi nilai kebangsaan melalui praktik sosial dan budaya masyarakat.”

Pembelajaran Pancasila memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter warga negara yang beriman, beretika, dan berkeadaban sosial. Namun demikian, pendekatan pembelajaran yang bersifat tekstual dan normatif sering kali menyebabkan nilai-nilai Pancasila dipahami sebatas hafalan konseptual, tanpa keterkaitan yang kuat dengan realitas kehidupan sehari-hari peserta didik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideologis Pancasila dan praktik sosial yang dijalani masyarakat (Tilaar, 2012). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, kearifan lokal sesungguhnya menyimpan nilai-nilai luhur yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai pendidikan yang hidup dan

² Penulis lahir di Ujung Pandang, 24 Juli 1992, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih, Papua, menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2014, S2 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2017, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2023.

dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran Pancasila menjadi pendekatan strategis untuk menjadikan nilai Pancasila lebih kontekstual dan bermakna.

Urgensi pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal semakin menguat di tengah tantangan globalisasi, individualisme, dan krisis nilai yang memengaruhi generasi muda. Tanpa pendekatan kontekstual, pembelajaran Pancasila berisiko kehilangan relevansi sosial dan daya transformasinya. Integrasi kearifan lokal memungkinkan peserta didik memahami Pancasila bukan sebagai doktrin abstrak, melainkan sebagai pedoman hidup yang tumbuh dari pengalaman sosial dan budaya mereka sendiri (Suryadi, 2014).

Kearifan Lokal sebagai Sumber Nilai Pancasila

Kearifan lokal merupakan akumulasi pengetahuan, nilai, dan norma yang berkembang dalam masyarakat sebagai hasil interaksi panjang antara manusia dan lingkungannya. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, musyawarah, dan keseimbangan dengan alam mencerminkan substansi sila-sila Pancasila dalam praktik kehidupan nyata. Dengan demikian, kearifan lokal dapat diposisikan sebagai medium pedagogis untuk mengontekstualisasikan nilai Pancasila dalam pembelajaran (Koentjaraningrat, 2009). Dalam pembelajaran Pancasila, pemanfaatan kearifan lokal membantu peserta didik memahami bahwa nilai kebangsaan tidak lahir secara artifisial, melainkan berakar pada budaya bangsa itu sendiri. Pendekatan ini memperkuat kesadaran historis dan kultural peserta didik, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap Pancasila sebagai ideologi yang hidup.

Pembelajaran Kontekstual dan Internalitas Nilai

Pembelajaran berbasis kearifan lokal sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menempatkan pengalaman nyata peserta didik sebagai sumber utama belajar. Melalui pengamatan, refleksi, dan praktik sosial, nilai Pancasila

diinternalisasi secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Peserta didik tidak hanya memahami makna nilai, tetapi juga menghayatinya dalam tindakan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Suryadi, 2014).

Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan Pancasila bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan sikap dan karakter. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari kebiasaan hidup, bukan sekadar konsep normatif dalam buku teks.

Tantangan Implementasi dalam Pembelajaran Pancasila

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman pendidik terhadap budaya lokal, dominasi kurikulum yang bersifat seragam, serta minimnya bahan ajar kontekstual yang relevan dengan realitas sosial peserta didik. Tantangan ini menyebabkan kearifan lokal sering kali hanya dijadikan pelengkap, bukan inti pembelajaran (Tilaar, 2012). Selain itu, modernisasi dan perubahan sosial yang cepat juga mengancam keberlanjutan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang adaptif dan reflektif agar kearifan lokal tetap relevan dan mampu menjadi sumber nilai Pancasila dalam kehidupan modern.

Strategi Penguatan Pembelajaran Pancasila Berbasis Kearifan Lokal

Penguatan pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum secara sistematis dan kontekstual. Integrasi ini tidak hanya sebatas pada penambahan materi, tetapi juga pada penyesuaian tujuan, konten, dan strategi pembelajaran agar selaras dengan realitas sosial budaya. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai sumber nilai dan konteks pembelajaran, Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman hidup yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, sehingga proses internalisasi

nilai berlangsung lebih alami dan bermakna.

Selain itu, pengembangan metode pembelajaran partisipatif menjadi elemen penting dalam menguatkan pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal. Metode seperti diskusi kontekstual, studi kasus berbasis komunitas, proyek sosial, dan pembelajaran berbasis pengalaman memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam memahami nilai Pancasila melalui praktik sosial nyata. Guru memiliki peran strategis untuk menggali dan memanfaatkan praktik sosial lokal—seperti gotong royong, musyawarah adat, dan solidaritas komunitas—sebagai sumber belajar yang relevan dan reflektif, sementara institusi pendidikan berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani pengetahuan akademik dengan realitas kehidupan masyarakat (Suryadi, 2014).

Pendekatan ini menempatkan pendidikan Pancasila sebagai proses kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, nilai-nilai nasional dan lokal tidak dipertentangkan, melainkan saling memperkuat dalam membentuk karakter warga negara yang berkepribadian Indonesia. Melalui dialog antara tradisi dan tantangan kontemporer, pembelajaran Pancasila mampu menumbuhkan kesadaran kritis, sikap toleran, serta tanggung jawab sosial, sehingga peserta didik tidak hanya memahami Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga menghayatinya sebagai landasan etis dalam kehidupan bermasyarakat.

Simpulan dan Saran

Pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila akan lebih bermakna ketika diinternalisasikan melalui praktik sosial dan budaya yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Pendekatan ini memperkuat dimensi kontekstual dan transformasional pendidikan Pancasila, sekaligus menjembatani nilai ideologis dan realitas sosial masyarakat. Pembelajaran Pancasila perlu diarahkan pada penguatan integrasi nilai lokal dalam kurikulum dan praktik pedagogis. Dukungan kebijakan pendidikan,

peningkatan kapasitas pendidik, serta pengembangan bahan ajar kontekstual menjadi kunci agar pembelajaran Pancasila tidak hanya membentuk pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga karakter dan keadaban sosial peserta didik.

Daftar Pustaka

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryadi, A. (2014). *Pendidikan Indonesia menuju 2025*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Transformasi Nilai-Nilai Lokal Wisdom Buton terhadap Pendidikan Karakter melalui Pendekatan *Deep Learning*

Dr. Kamarudin, S.Pd., M.Pd³
Universitas Muhammadiyah Buton

“Transformasi nilai-nilai lokal Wisdom Buton melalui Pendekatan deep learning, meningkatkan pendidikan karakter dengan mengintegrasikan Kearifanl dalam Konteks Berkelanjutan”.

Krisis karakter yang melanda generasi muda Indonesia menuntut solusi inovatif yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi moderen. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pembentukan karakter generasi muda di era digital. Degradasi moral melemahnya empati sosial dan krisis identitas yang membutuhkan inovatif yang berkelanjutan. Buton sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara memiliki khazanah kearifan lokal (*local wisdom*) yang kaya dan relevan dengan nilai-nilai karakter.

³Penulis Lahir di Rahia Buton Tenggara, 06 Mei 1987 merupakan dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Negeri Gorontalo 2012, melanjutkan Pendidikan S2 tahun 2013 dan selesai tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo. Dan melanjutkan Pendidikan S3 pada tahun 2021 dan Menyelesaikan Pendidikan Doktor Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2024.

Kearifan Lokal Buton

Buton dengan khazanah budayanya yang kaya, menawarkan sistem nilai luhur yang filosofi, komprehensif dan relevan untuk pendidikan karakter kontemporer yakni P05 terdiri dari lima nilai fundamental: Po Mamasiaka yang artinya saling menyayangi, Po Pia-piara yang artinya saling memelihara, *Po Mae-maeaka* yang artinya saling menghargai, Po Angka-angkataka artinya saling mengangkat, sebagai bentuk saling mengangkat harkat, *Po Binci-binciki kuli* dalam Bahasa Indonesia artinya cubit kulit Bermakna kegiatan mencubit kulit akan menyebabkan perasaan sakit yang diartikan sebagai bentuk toleransi). Budaya lokal P05 dikembangkan dari falsafah Binci-binciki kuli (saling mencubit kulit) pada dasarnya telah termaktub dalam Kitab Martabat Tujuh sebagai dasar aturan kesultanan Buton (Aswat, Rahman, et al., 2022).

Kelima nilai tersebut dapat membentuk ekosistem moral yang holistik, mengatur hubungan antara sesama manusia. Kearifan Lokal P05 di Buton bukan hanya untuk dilestarikan, tetapi bisa ditransformasi menjadi kekuatan hidup yang membentuk karakter generasi masa depan. Menurut Lickona *good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good.*" Makna Filosofi tersebut sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal P05 yang menuntun manusia pada kebaikan dan mengajarkan pengetahuan moral, juga menumbuhkan keinginan dan habituasi untuk berbuat baik. Ditengah kemajuan teknologi, pendekatan *deep learning* menawarkan solusi dengan cara mentransformasi nilai-nilai tradisional menjadi program pendidikan karakter yang adaptif, personal, dan terukur.

Deep Learning

Deep Learning sala satu Teknologi Transformatif untuk Pendidikan Karakter. Deep learning menurut Schmidhuber (2015), adalah *"algorithms inspired by the structure and function of the brain's neural networks."* Kemampuan teknologi ini untuk belajar dari data kompleks yang mengenali pola tersembunyi dan membuat prediksi akurat untuk membuka peluang

revolusioner dalam personalisasi pendidikan karakter. Penerapan deep learning dalam pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Buton dapat dilakukan melalui beberapa strategi:

1. Pembelajaran Sosio-Emosional Terpersonalisasi: Computer vision dan analisis sentimen dapat mendeteksi respons emosional siswa terhadap konten pembelajaran. Jika seorang siswa menunjukkan kesulitan dalam memahami materi dalam sistem menyajikan modul empati-building yang disesuaikan dengan gaya belajarnya.
2. Personalisasi Pembelajaran: Algoritma deep learning dapat menganalisis profil psikologis, gaya belajar, dan tingkat pemahaman setiap peserta didik terhadap nilai-nilai lokal. Sistem kemudian menyajikan konten pembelajaran yang disesuaikan, seperti cerita rakyat Buton, simulasi situasi etis, atau permainan edukatif berbasis nilai-nilai pobinci-binciki kuli.
3. Analitik Perilaku Real-time: Melalui natural language processing dan computer vision, sistem dapat mengamati interaksi siswa, bahasa yang digunakan, dan respons terhadap dilema moral. Data ini dianalisis untuk memberikan umpan balik konstruktif dan intervensi tepat waktu ketika perilaku menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkan.
4. Pembelajaran Adaptif Berbasis Narasi: Deep learning dapat menghasilkan narasi interaktif yang menggabungkan cerita tradisional Buton dengan konteks moderen. Siswa dihadapkan pada skenario yang memerlukan penerapan nilai-nilai seperti memahami materi dalam situasi kontemporer, dengan sistem yang beradaptasi berdasarkan pilihan dan refleksi mereka.
5. Gamifikasi Cerdas: Teknologi ini memungkinkan penciptaan game edukatif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai karakter. Sistem dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dan jenis tantangan berdasarkan perkembangan moral setiap pemain.

Model Integrasi dari teori ke praktik untuk transformasi nilai-nilai lokal Buton melalui deep learning memerlukan model integrasi yang sistematis. Pertama, digitalisasi konten kearifan lokal menjadi database terstruktur yang mencakup narasi, makna filosofis, dan konteks penerapan. Zaenuddin Hudi Prasajo (2015) mengingatkan bahwa "digitalisasi kearifan lokal harus mempertahankan esensi makna dan konteks budaya, bukan sekadar mentransfer informasi." Kedua, pengembangan model deep learning yang spesifik untuk domain pendidikan karakter. Model ini harus mampu memahami nuansa budaya, konteks moral, dan perkembangan psikologis siswa. Transfer learning dari model bahasa yang diadaptasi dengan nilai-nilai kearifan lokal Buton. Ketiga, implementasi dalam ekosistem pembelajaran yang menggabungkan platform digital dengan interaksi tatap muka. Guru berperan sebagai fasilitator yang menginterpretasi insights dari sistem AI dan memberikan sentuhan humanis yang tidak dapat digantikan teknologi. Keempat, evaluasi holistik yang tidak hanya mengukur pengetahuan kognitif tentang nilai-nilai, tetapi juga internalisasi dan manifestasi dalam perilaku sehari-hari. Machine learning dapat melacak perkembangan jangka panjang dan mengidentifikasi pola pembentukan karakter.

Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dengan pendekatan deep learning Menjadi Masa depan

Transformasi nilai-nilai lokal Buton melalui deep learning bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi reimajinasi pendidikan karakter di era digital. Pendekatan ini membuktikan bahwa tradisi dan inovasi bukan dikotomi, melainkan sinergi yang dapat menghasilkan solusi kontekstual dan efektif. Kedepan model ini dapat diperluas dengan kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, dan bisa menciptakan ekosistem pembelajaran yang merayakan keberagaman sembari memperkuat identitas nasional. Deep learning dapat menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan akar budaya mereka, sekaligus membekali mereka dengan kompetensi abad 21. Goodfellow, Bengio, dan Courville

menyatakan bahwa "*the future of AI lies in its ability to augment human capabilities rather than replace them.*" Dalam konteks pendidikan karakter, teknologi harus memperkuat, bukan menggantikan, peran guru, orang tua, dan komunitas dalam membentuk karakter generasi muda.

Evaluasi Holistik dan Berkelanjutan

Evaluasi efektivitas pendidikan karakter berbasis PO5 tidak dapat hanya mengandalkan tes kognitif. Juga diperlukan pendekatan multi-metode yang mencakup observasi perilaku, *peer assessment*, *project-based assessment*, dan *longitudinal tracking*. Deep learning dapat menganalisis data multidimensi ini untuk menghasilkan profil karakter komprehensif. *Machine learning models* yang dapat mengidentifikasi pola perkembangan karakter dan memprediksi siswa yang memerlukan intervensi khusus. Penting untuk mengukur tidak hanya perubahan perilaku jangka pendek, tetapi juga internalisasi nilai dan transfer ke konteks baru. *Follow-up* dengan alumni dapat memberikan insight tentang dampak jangka panjang pendidikan karakter berbasis kearifan lokal PO5 di Buton. Transformasi PO5 melalui deep learning adalah langkah menuju pendidikan karakter yang lebih ilmiah, personal, dan efektif. Model ini dapat diperluas dengan kearifan lokal lain di Indonesia, menciptakan ekosistem pembelajaran yang merayakan keberagaman budaya sambil memperkuat identitas nasional.

Integrasi teknologi emergent seperti virtual reality dapat menciptakan pengalaman hidup siswa, dalam simulasi yang menguji nilai-nilai PO5 yang dapat digunakan untuk mencatat achievement karakter yang transparan dan terpercaya. Terpenting dalam pendekatan ini membuktikan bahwa kearifan lokal bukan artefak masa lalu, tetapi sumber solusi untuk tantangan masa kini. Sebagaimana dikatakan Bengio (2019), "*AI should serve humanity, not the other way around.*" Dalam konteks tersebut teknologi melayani misi mulia: membentuk generasi berkarakter pada budaya dan siap menghadapi masa depan.

Transformasi nilai-nilai lokal wisdom Buton PO5 terhadap pendidikan karakter melalui pendekatan deep learning merepresentasikan sinergi antara tradisi dan inovasi. Lima nilai fundamental Po Mamasiaka yang artinya saling menyayangi, Po Pia-piara yang artinya saling memelihara, Po Mae-maeaka yang artinya saling menghargai, Po Angka-angkataka artinya saling mengangkat, sebagai bentuk saling mengangkat harkat, Po Binci-binciki kuli bermakna kegiatan mencubit kulit akan menyebabkan perasaan sakit yang diartikan sebagai bentuk toleransi, memberikan framework moral komprehensif yang relevan lintas generasi.

Daftar Pustaka

- Aswat, H., Rahman, A. V., & Aprilia, R. (2022). MATAPPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangkitkan Nilai Karakter Budaya Lokal PO-5 Sejak Dini Melalui Gerakan Literasi Media dan Digital. 5, 283–290.
- Bengio, Y. (2019). From system 1 deep learning to system 2 deep learning. *Proceedings of the Conference on Neural Information Processing Systems*.
- Prasojo, Z. H. (2015). Digitalisasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis budaya. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 165-178.
- Schmidhuber, J. (2015). Deep learning in neural networks: An overview. *Neural Networks*, 61, 85-117.

Strategi Membumikan Pancasila

Nur Kholis, S.Pd.I.⁴

MAS Al Aqidah Ogan Komering Ilir

“Membumikan Pancasila dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, budaya lokal, dan media digital agar nilai Pancasila hidup di masyarakat”.

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai hasil refleksi mendalam terhadap realitas sosial, budaya, dan religius bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan politik, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, terjadi gejala lunturnya nilai-nilai kebangsaan, meningkatnya individualisme, serta menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan untuk membumikan Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dan diamalkan dalam kehidupan nyata.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan. Membumikan Pancasila dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendidikan, keteladanan, dan penguatan budaya nasional. Sinergi antara

⁴ Penulis Bernama Nur Kholis, S.Pd.I. Lahir di Boyolali, 8 Juni 1977. Telah menyelesaikan pendidikan S.1 di STAIN Ponorogo tahun 2003, Jurusan Tarbiyah. Bekerja sebagai Guru PPKn di MAS Al Aqidah yang terletak di Desa Kutapandan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki lima dimensi utama: ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kelima dimensi tersebut membentuk satu kesatuan nilai yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan sistem filsafat yang memiliki nilai-nilai universal dan fundamental, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam konteks implementasi, internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

1. Tantangan Membumikan Pancasila

Beberapa tantangan utama dalam membumikan Pancasila antara lain:

- a. Globalisasi dan modernisasi yang membawa nilai-nilai individualistik dan materialistik. Pancasila menghadapi tantangan serius dalam menjaga relevansinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arus global membawa nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai individualistik dan materialistik yang melekat dalam budaya global cenderung menumbuhkan sikap mementingkan diri sendiri serta mengukur kesuksesan hanya dari aspek ekonomi. Kondisi ini dapat menggerus solidaritas sosial dan rasa kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
- b. Disinformasi digital yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi nasional. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat juga menjadi tantangan tersendiri. Disinformasi dan hoaks yang beredar di ruang digital dapat menurunkan

kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional, bahkan menimbulkan perpecahan sosial. Ruang digital yang seharusnya menjadi media edukatif justru sering dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian dan intoleransi. Kurangnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis di kalangan masyarakat memperparah dampak negatif tersebut, sehingga menghambat upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Menurunnya keteladanan elit publik, yang mengakibatkan krisis moral dan kepercayaan masyarakat. Ketika pejabat publik tidak menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat kehilangan figur panutan yang dapat dijadikan teladan. Fenomena ini menyebabkan krisis moral dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Padahal, keteladanan merupakan salah satu cara paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena masyarakat lebih mudah meniru tindakan nyata daripada sekadar mendengar nasihat moral.
- d. Minimnya pembelajaran kontekstual Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Dunia pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pembumian Pancasila. Namun, pembelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi masih sering dilakukan secara teoretis dan kurang kontekstual. Materi yang disampaikan tidak selalu dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik kesulitan memahami makna praktis dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan, seperti melalui proyek sosial, diskusi kritis, dan penerapan nilai Pancasila dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi

pedoman nyata dalam perilaku dan keputusan setiap warga negara.

2. Strategi Membumikan Pancasila

Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

a. Pendekatan Pendidikan Nilai

Pendidikan menjadi sarana paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan perlu disusun secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran tidak boleh berhenti pada hafalan sila-sila Pancasila, tetapi harus melibatkan pengalaman nyata, seperti kegiatan proyek sosial, simulasi musyawarah, dan refleksi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila secara konkret.

b. Keteladanan Pemimpin dan Tokoh Masyarakat

Keteladanan ini memiliki pengaruh besar karena masyarakat cenderung meniru perilaku nyata daripada sekadar mendengarkan ajaran moral. Ketika para pemimpin bersikap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan masyarakat, mereka secara tidak langsung menjadi agen pembumian Pancasila yang efektif. Pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan dan sosial harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kejujuran, dan gotong royong.

c. Revitalisasi Budaya Lokal dan Kearifan Nusantara

Nilai-nilai Pancasila sejatinya berakar kuat dalam tradisi dan budaya bangsa Indonesia, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, dan rasa solidaritas sosial. Menghidupkan kembali tradisi-tradisi tersebut dalam kehidupan modern dapat

memperkuat rasa kebangsaan dan memperkokoh identitas nasional. Festival budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan peran komunitas adat dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berakar pada realitas sosial masyarakat.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

Langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pemanfaatan Teknologi dan media digital. Media digital dapat digunakan untuk menyebarkan konten edukatif dan inspiratif dalam bentuk video pendek, podcast, game edukatif, dan kampanye digital kreatif. Generasi muda hidup dalam dunia digital, sehingga pembumian Pancasila dapat dilakukan melalui konten kreatif seperti video edukatif, podcast, game edukasi, dan kampanye digital yang menarik.

e. Sinergi Antar Lembaga

Upaya membumikan Pancasila tidak dapat dilakukan secara parsial, Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, maupun keluarga, untuk menciptakan ekosistem sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat efektivitas program dan memastikan bahwa pembumian Pancasila tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi gerakan bersama yang nyata dalam kehidupan bangsa.

Kesimpulan

Membumikan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Strategi efektif meliputi penguatan pendidikan nilai, keteladanan, pengembangan budaya lokal, serta pemanfaatan media digital. Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam setiap kebijakan publik, sistem pendidikan, dan kehidupan sosial agar tetap relevan di tengah

dinamika global. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga menjadi **way of life** bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2022). *Pedoman Pembudayaan Pancasila*. Jakarta: BPIP RI.

Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Notonagoro. (1983). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

Sudarmono. (2020). *Strategi Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yudi Latif. (2018). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Penerapan Etika Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

*Natalia Heni Primawati., S.Fil., M.Phil⁵
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo*

“Etika Pancasila menjadi filter terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sesuai dengan kepribadian Indonesia yang bermoral dan bermartabat”.

Etika secara etimologi atau asal usul kata berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, karakter, perasaan, sikap, cara berpikir, tindakan (Hudha dkk, 2019: 47). Etika menurut KBBI mempunyai beberapa definisi yakni ilmu tentang hal-hal baik dan buruk serta kewajiban maupun hak moral; kumpulan asas atau nilai moral; pedoman perilaku (Hudha, 2019: 47). Etika dapat juga disebut sebagai filsafat moral. Etika sebagai cabang dari filsafat menurut K Bertens mempunyai pendekatan dari beberapa teori diantaranya yakni etika deskriptif, normatif, meta etika, etika terapan (Hudha dkk, 2019: 51). Etika deskriptif berupaya menggambarkan pendapat, tingkah laku moral sesuai standarisasi moral pada waktu, tempat tertentu (Hudha dkk, 2019: 52).

Etika normatif merupakan cabang etika yang menekankan pedoman berbicara, bertindak, menguji kesalahan dan kebenaran tindakan manusia (Hudha, 2019: 53). Etika normatif

⁵ Penulis berasal dari Banyumas. Penulis menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada pada tingkat Strata I dan Strata II di Fakultas Filsafat. Penulis mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo sejak tahun 2017.

disebut juga dengan etika preskriptif (Hudha, 2019: 53). Etika normatif menurut Cline membutuhkan penilaian standar moral, konsistensi, rasional, efektif (Hudha, 2019: 53-54). Metaetika mengkaji pendekatan etika melalui sudut pandang metafisiska, epistemologi, psikologi, perkataan moral, tindakan moral (Hudha, 2019: 55). Pendekatan etika juga dibedakan menjadi etika umum dan khusus. Etika umum berdasarkan pada norma etis, hati nurani, hak dan kewajiban moral (Hudha, 2019: 54). Etika khusus menekankan pada perilaku yang sesuai konteksnya atau disebut etika terapan (Hudha, 2019: 54). Etika terapan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai persoalan di setiap zamannya. Etika menjadi pertimbangan moral dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan manusiawi.

Perkembangan sejarah kehidupan manusia berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan kehidupan manusia kuno melalui peradaban Mesopotamia, Mesir, China, India, Yunani, Romawi menunjukkan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kehidupan manusia misalnya penemuan api, roda, kalender, kompas, kertas, bubuk mesiu, geometri, arsitektur, matematika, ilmu perbintangan untuk menentukan musim yang cocok saat bertanam ataupun saat berlayar, filsafat, pengobatan herbal dan lain-lain. Perkembangan kehidupan manusia modern diawali dari revolusi industri I.0 di Inggris diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya pada abad ke-18. Penemuan mesin uap mengubah kehidupan manusia yang awalnya menggunakan tenaga kerja manusia atau binatang untuk pertanian berubah menjadi mesin pada sistem pertanian, *manufaktur*, transportasi.

Revolusi industri berkembang menjadi revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik kemudian berkembang menjadi 3.0 dengan ditemukannya mesin otomatis berupa komputer dan robot. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan

penemuan teknologi otomatisasi secara cyber, internet (detik.com/edu/detikpedia/d-6438001/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri-1-0-hingga-4-0/amp). Revolusi industri 5.0 ditandai penemuan AI (*Artificial Intelligence*). Revolusi industri 5.0 menggambarkan kehidupan manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saling berintegrasi. Dampak negatif dari perkembangan revolusi industri 5.0 dengan kecerdasan buatan mulai menggantikan peran manusia di tempat kerja untuk kepentingan efisiensi perusahaan. Manusia harus terus belajar, meningkatkan kreativitas agar dapat bersaing di tengah kompetisi global.

Manusia mempunyai pilihan kebebasan dalam berpikir, berkata, bertindak. Kebebasan individual mempunyai beberapa bentuk yakni kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan moral, kebebasan eksistensial (Handoyo, Susanti, Munandar, 2016: 5). Kebebasan dalam mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi oleh prinsip etis yang bertanggung jawab diantaranya mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan baterai, listrik pada kendaraan. Kebebasan yang bertanggung jawab secara etis misalnya mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah organik dan anorganik.

Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta yakni panca yang berarti lima dan sila berarti dasar (Dharmawati, 2019: 2). Pancasila dirumuskan oleh para tokoh dengan cara bermusyawarah, gotong royong untuk membangun bangsa yang bermartabat. Pancasila merupakan penggalan nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan sejarah, budaya, kepribadian, moral bangsa Indonesia. Etika Pancasila menjadi bagian dari etika terapan atau khusus yang mengkaji nilai Pancasila dalam sudut pandang etika. Etika Pancasila berisi kajian nilai etika yang dihubungkan dengan nilai Pancasila. Etika Pancasila membahas tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan dalam tatanan moral. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadikan sila-sila saling terkait, mempengaruhi yang

membentuk satu kesatuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Dampak positif diantaranya mempermudah sistem pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, komunikasi dan informasi, kedokteran, transportasi, listrik sebagai penerangan, berkembangnya teknologi dan dalam bidang *food and bavarages*, berkembangnya industri hiburan dan pariwisata, pertambangan batubara dan minyak sebagai sumber energi, pertambangan emas, perkembangan sistem alat tukar secara manual dan digital dan lain-lain. Dampak negatif diantaranya kerusakan lingkungan akibat penggunaan teknologi yang menyebabkan *global warming* seperti pemanfaatan teknologi dari bahan bakar fosil, masifnya perkebunan sawit, penumpukan sampah, pertambangan mempengaruhi polusi udara, air, tanah. Perkebunan sawit menyebabkan deforestasi selain dari alih fungsi hutan untuk pemukiman manusia. Dampak negatif lainnya diantaranya kerusakan lingkungan menyebabkan anomali cuaca, bencana banjir, erosi. Dampak negatif lainnya diantaranya *cyber crime* dengan berbagai modus penipuan misalnya *love scamming*, pinjaman online ilegal, *cyber bully*, peretasan data, perjudian, *human trafficking* dan lain-lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat sejak revolusi industri I. Pemikiran adanya ilmu pengetahuan dan teknologi secara antroposentris menyebabkan andil manusia melakukan eksplorasi, eksploitasi untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pandangan teori dari perkembangan iptek dibedakan menjadi *Value free* dan *non value free*. *Value free* ialah pandangan teori yang menekankan kebebasan nilai dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Non value free* ialah pandangan teori yang menekankan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibatasi oleh nilai moral, etis, ekologi, budaya, ideologi, agama, filsafat. Etika Pancasila dibutuhkan sebagai filter pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak disalahgunakan secara kapitalis, tetapi dilaksanakan secara

bertanggungjawab untuk keberlanjutan kehidupan manusia untuk berbagai generasi dan keberlanjutan lingkungan.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia menjadi pedoman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya canggih tetapi juga memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak berasal dari negara-negara di Eropa, terkadang tidak sesuai dengan budaya ketimuran sehingga diperlukan filter melalui etika Pancasila sebagai aktualisasinya.

Nilai ketuhanan dalam etika Pancasila diselaraskan dengan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuhan menjadi otoritas tertinggi yang perlu diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya menolak kloning terhadap manusia. Penerapan KUHP yang baru pada UU Nomor 1 tahun 2023 merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dengan mengganti sanksi hukuman menjadi kerja sosial, mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup (hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku-ini-asas-hukum-yang-perlu-diketahui-lt695f81a6329b5). Nilai kemanusiaan diselaraskan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjunjung prinsip kemanusiaan yang sesuai harkat dan martabat tanpa diskriminatif. Penerapan nilai kemanusiaan dibutuhkan peran aktif negara dalam menjamin hak setiap warga tanpa memihak gender ataupun keterbatasan fisik (difabel) dalam memperoleh pendidikan, berkebudayaan, berwisata, berolahraga, bekerja, berpolitik. Nilai persatuan perlu diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membutuhkan kerjasama semua pihak baik dari pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat sebagai kesatuan warga negara Indonesia. Nilai persatuan melalui kewajiban pendidikan Pancasila dalam sistem undang-undang yang diterapkan pada lembaga sekolah maupun perguruan tinggi.

Pendidikan Pancasila mengajarkan untuk menerapkan nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air. Peran pemerintah dalam mengembangkan nilai persatuan diantaranya melarang ideologi pemecah belah bangsa seperti komunisme, radikalisme dengan melakukan *take down* pada situs internet yang berbahaya melalui kementerian komunikasi dan digital. Nilai kerakyatan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan umum diantaranya menyelenggarakan pemilihan umum secara persuasif, jujur, menghindari *money* politik. Nilai keadilan perlu diterapkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya peran pemerintah dalam menjamin warganya untuk mengakses kemudahan dengan harga terjangkau untuk penyediaan kebutuhan pangan pokok, insentif dan perlindungan untuk petani, nelayan dan lain-lain. Peran swasta dilakukan dengan tidak memonopoli pasar maupun harga, membuat harga produk dapat dijangkau oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Darmawati dkk. 2024. Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi dan Aktualisasi. Jawa Timur: Future Science.
- Firyalfatin. 2026. KUHP baru Berlaku, Ini Asas Hukum yang perlu diketahui. (hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku-ini-asas-hukum-yang-perlu-diketahui-lt695f81a6329b5).
- Handoyo, Eko dan Susanti, Martien Herna dan Munandar, Moh, Aris. 2016. *Etika Politik Edisi Revisi*. Semarang: Widya Karya.
- Hudha, Husamah, Rahardjanto. 2019. *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)*. Malang: UMM Press.

Kusuma, Putri Tiah Hadi, 2022. Revolusi Industri: Sejarah dan Perkembangan Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0. detik.com/edu/detikpedia/d_6438001/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri-1-0-hingga-4-0/amp).

Pengetahuan dan Teknologi: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 8 Nomor 3. ISSN: 2614-3097.

Integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran PPKn

*Iqbal, M.Pd.⁶
Universitas Jabal Ghafur*

“Integrasi P3 dalam PPKn berhasil melalui insersi nilai, PjBL, dan habituasi sekolah yang membentuk civic disposition siswa berkelanjutan”.

Pendidikan nasional di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi fundamental seiring dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Jantung dari perubahan ini adalah penguatan karakter peserta didik yang dikristalisasi dalam konsep Profil Pelajar Pancasila. Konsep ini dirancang sebagai jawaban atas tantangan moralitas abad ke-21, di mana siswa tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga harus memiliki kematangan moral. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, di mana fenomena degradasi moral seperti perundungan, intoleransi, dan ketidakjujuran akademik masih marak terjadi di kalangan remaja (Lickona, 2022: 72). Hal ini diperparah dengan kritik bahwa pembelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sering kali terlalu berat pada aspek kognitif atau hafalan, sehingga gagal menyentuh aspek afektif siswa dan menjembatani antara pengetahuan moral (*moral knowing*) dengan tindakan moral (*moral action*). Oleh karena itu, integrasi

⁶ Penulis lahir di Sigli, 22 Juli 1991, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jabal Ghafur, menyelesaikan studi S1 di PGSD FKIP Universitas Syiah Kuala tahun 2014, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan tahun 2017.

enam dimensi Profil Pelajar Pancasila ke dalam mata pelajaran PPKn menjadi mendesak untuk mentransformasi PPsKn sebagai misi suci (*mission sacre*) pendidikan nilai agar mampu menghasilkan warga negara yang cerdas dan baik (Ikhtiarti et al., 2019: 4).

PPKn harus menjadi wahana *psychopedagogical* untuk mencetak warga negara yang cerdas dan baik. Sejalan dengan pandangan tersebut, integrasi enam dimensi Profil Pelajar Pancasila yakni Beriman, bertakwa, berakhlak mulia; Berkebinekaan global; Gotong royong; Mandiri; Bernalar kritis; dan Kreatif ke dalam mata pelajaran PPKn menjadi solusi kontekstual untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan kognitif dengan tindakan moral (*moral action*) (Budimansyah, 2012: 37).

Implementasi ini memastikan bahwa pendidikan moral tidak lagi bersifat verbalistik, melainkan diwujudkan melalui keteladanan dan pembiasaan yang mengarah pada pembentukan watak (*civic disposition*) yang bertanggung jawab di tengah tantangan degradasi moral kontemporer (Zainuddin, 2021: 8). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, landasan moral ini diperkuat melalui Profil Pelajar Pancasila yang menyederhanakan nilai-nilai karakter bangsa menjadi enam dimensi operasional: (1) Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, (2) Berkebinekaan global, (3) Gotong royong, (4) Mandiri, (5) Bernalar kritis, dan (6) Kreatif. Integrasi keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang diajarkan di kelas dapat ditransformasikan menjadi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang nyata (Malatuny & Rahmat, 2017: 56).

Pembelajaran Berbasis Proyek tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah (problem-solving), melainkan menuntut siswa menghasilkan produk nyata (proyek). Proses penciptaan produk inilah yang berfungsi sebagai mekanisme transformatif yang mengubah teori (*civic knowledge*) menjadi praktik moral

(*moral action*), dan menghargai pandangan tim, yang secara langsung mewujudkan dimensi Gotong Royong dan Berkebinekaan Global. Pembelajaran Berbasis Proyek dalam PPKn terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam menumbuhkan keterampilan kolaboratif dan nalar kritis karena siswa didorong terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang berorientasi pada penyelesaian proyek yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Pembelajaran Berbasis Proyek dipilih bukan hanya karena termasuk metode aktif, tetapi karena kapabilitasnya yang unik untuk memaksa siswa menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai karakter P3 secara terpadu dan berkelanjutan.

Integrasi P3 dalam PPKn dilakukan melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang terstruktur, mencakup tiga strategi utama yang saling berkaitan:

1. Integrasi Substantif dalam Materi Ajar

Strategi insersi nilai secara substantif ini diperkuat dengan pandangan bahwa Pendidikan Karakter harus terintegrasi dalam mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran terpisah atau kegiatan ekstrakurikuler semata. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang bertujuan menjadikan Profil Pelajar Pancasila (P3) sebagai filosofi dan *guideline* dalam pembelajaran di kelas (Purnawanto, 2022: 76).

Implementasi P3 yang terintegrasi berhasil menguatkan karakter siswa karena nilai-nilai Pancasila dihidupkan dalam pengalaman belajar otentik. P3 mengubah kurikulum menjadi proses di mana siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi, yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan (Ulandari, 2023: 116). Keberhasilan integrasi substantif ini terletak pada pergeseran fokus dari "apa yang diajarkan" menjadi "bagaimana nilai dihidupkan" melalui materi ajar. Ketika guru secara eksplisit menghubungkan materi PPKn tentang

toleransi dengan dimensi Berkebinekaan Global, ia tidak hanya mengajarkan fakta tetapi juga mendorong watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa untuk menghargai perbedaan (Fernando et al., 2023: 134).

2. Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek

Penggunaan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam PPKn berhasil membawa pembelajaran keluar dari beban kognitif semata. Keefektifan model ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus melibatkan siswa dalam proyek partisipatif seperti *Project Citizen* yang mampu meningkatkan kepekaan sosial dan keterampilan partisipatif (Sulistianingsih et al., 2024: 821). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Berbasis Proyek menjadi mekanisme strategis implementasi P3 karena memaksa siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter saat memecahkan masalah.

Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pembelajaran PPKn efektif dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa, menjadikan mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Model Pembelajaran Berbasis Proyek dapat direkomendasikan sebagai strategi pembelajaran alternatif yang relevan untuk mengoptimalkan *civic skill* pada jenjang pendidikan menengah. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang berbasis proyek telah terbukti mampu menyajikan pengalaman belajar yang integratif, di mana dimensi gotong royong dan bernalar kritis dihidupkan sebagai keterampilan nyata, menjadikannya kunci keberhasilan dalam mentransformasi pengetahuan moral menjadi disposisi moral yang aktif.

3. Penguatan melalui Habitulasi Budaya Sekolah

Strategi habitulasi ini sangat krusial karena menjawab kritikan lama terhadap pendidikan karakter. Pendidikan moral yang efektif harus dilakukan melalui pembiasaan,

bukan sekadar transfer pengetahuan verbal. Habituaasi memastikan bahwa watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dilatih di kelas, seperti kolaborasi dalam Pembelajaran Berbasis Proyek terus menerus dipraktikkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Fokus pada habituasi juga sejalan dengan konsep *whole-school approach* dalam implementasi P3. Keberhasilan penguatan sikap moral tidak dapat hanya dibebankan pada satu mata pelajaran (PPKn) tetapi harus didukung oleh ekosistem sekolah secara keseluruhan (Rusnaini, 2021: 230).

Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya kolektif sekolah yang implementasinya harus mencakup integrasi kurikuler dan pembentukan budaya sekolah. Penguatan karakter melalui P3 memerlukan dukungan lintas kurikulum dan keterlibatan seluruh warga sekolah agar nilai-nilai karakter dapat terinternalisasi secara utuh dan berkelanjutan. Dengan demikian, habituasi menjadi jembatan vital yang memungkinkan nilai luhur Pancasila meresap ke dalam karakter pribadi siswa secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. (2012). *Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Fernando, R., Montessori, M., Ananda, A., & Indrawadi, J. (2023). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Proses Pembelajaran PPKn. *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi PKP UNP*, 3(2), 134–142. <https://doi.org/10.24036/jikons.v3i2.116>
- Fitriyani, N., & Muthali'in, A. (2023). Penguatan Kompetensi Civic Disposition Dalam Membentuk Sikap Disiplin Melalui Kegiatan Pramuka di SMP Negeri 2 Sawit. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 35–43.

- Ikhtiarti, E., Adha, M. M., & Yanzi, H. (2019). *Membangun Generasi Muda Smart And Good Citizenship Melalui Pembelajaran PPKn Menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/13316/>
- Januardi, L. A., Setiawati, D., & Firdausi, F. U. (2024). Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dalam Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Suela. *Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo*, 5(1), 236–241. https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/prosiding_penelitian/article/view/353
- Lickona, T. (2022). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malatuny, Y. G., & Rahmat, R. (2017). Pembelajaran Civic Education Dalam Mengembangkan Civic Disposition. *Pedagogika*, 5(1), 56–68.
- Purnawanto, A. T. (2022). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pedagogy*, 15(2), 76–87.
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230–249.
- Sulistianingsih, S., Ajung, A., Alkani, S., & Kasih, R. (2024). Strategi penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 821–834.
- Zainuddin, Z. (2021). Konsep Pendidikan Budi Pekerti Perspektif Ki Hadjar Dewantara. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(1), 8–25.

Dampak Literasi Digital terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Era Teknologi pada Mahasiswa

Sari Misnaini S.Pd.,M.Pd⁷

*Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada
Palembang*

“Literasi digital berdampak pada pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan, membentuk sikap kritis dalam menyikapi informasi digital, Menumbuhkan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi”.

Era teknologi digital ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai generasi yang hidup di era digital memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi melalui internet dan media digital. Namun, kemudahan akses tersebut tidak selalu diimbangi dengan kemampuan untuk memilah dan memahami informasi secara kritis. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan

⁷ Penulis lahir di Sungailiat, 4 Nopember 1968, merupakan Dosen di Program Studi keperawatan pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang , menyelesaikans tudi S1 di FKIP UNSRI tahun 1994, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Teknologi Pendidikan FKIP UNSRI Palembang tahun 2015.

kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar mampu menjawab tantangan global dan digital. Literasi digital memiliki peran strategis dalam mendukung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam menghadapi maraknya informasi hoaks, ujaran kebencian, dan rendahnya etika berkomunikasi di ruang digital. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji dampak literasi digital terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di era teknologi pada mahasiswa.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Literasi digital menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak literasi digital terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era teknologi pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh melalui media digital. Gilster (1997) menekankan bahwa literasi digital melibatkan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Winataputra (2014), pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Di era digital, Pendidikan perlu mengakomodasi penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran sekaligus objek kajian. Dalam pendidikan tinggi, literasi digital membantu mahasiswa

mengembangkan kemampuan analitis, komunikasi, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran berbasis teknologi. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih siap menghadapi tantangan akademik dan sosial di era digital. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengakses berbagai isu kebangsaan secara luas. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, mahasiswa berpotensi terpapar informasi yang tidak valid dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Literasi digital memberikan dampak positif terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Mahasiswa dengan literasi digital yang baik mampu menyaring informasi secara kritis, memahami isu-isu kewarganegaraan secara komprehensif, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi akademik berbasis digital. Selain itu, literasi digital juga mendorong terbentuknya etika digital, seperti sikap saling menghargai, tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media digital. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang berkarakter dan berintegritas. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat berdampak negatif, seperti mudahnya mahasiswa terpengaruh oleh hoaks, intoleransi, dan radikalisme digital. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian integral dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran, pelatihan literasi digital, serta pembiasaan penggunaan media digital secara positif dan edukatif.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan terhadap buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan literasi digital dan Pendidikan Kewarganegaraan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-

kualitatif dengan mengkaji konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk menjelaskan dampak literasi digital terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Subjek penelitian berjumlah 58 mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Data diperoleh melalui angket dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penyajian dalam bentuk persentase(%) 1. Tingkat Literasi Digital Mahasiswa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat literasi digital yang baik.

Tabel 1. Tingkat Literasi Digital Mahasiswa

Kategori Literasi Digital	Jumlah Mahasiswa	Persentase (%)
Sangat Baik	18	31,0%
Baik	26	44,8%
Cukup	10	17,2%
Kurang	4	7,0%
Total	58	100%

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak **75,8% mahasiswa** berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Sekolah Tinggi Bina Husada Palembang telah memiliki kemampuan literasi digital yang memadai dalam menunjang proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 2.Dampak Literasi Digital terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Kewarganegaraan

Literasi digital berperan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan seperti Pancasila, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta nasionalisme.

Tabel 2. Pemahaman Nilai-Nilai Kewarganegaraan

Kategori Pemahaman	Jumlah Mahasiswa	Persentase (%)
Sangat Meningkatkan	20	34,5%
Meningkat	24	41,4%
Cukup	10	17,2%
Kurang	4	6,9%
Total	58	100%

Sebanyak **75,9% mahasiswa** menyatakan pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan mereka meningkat setelah memanfaatkan media digital dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital membantu mahasiswa mengakses dan memahami materi kewarganegaraan secara lebih luas dan kontekstual.3. Dampak Literasi Digital terhadap Sikap Kritis Mahasiswa, sikap kritis mahasiswa diukur melalui kemampuan menyaring informasi, menilai kebenaran berita, serta menyikapi isu sosial dan politik di media digital. Tabel 3. Sikap Kritis Mahasiswa dalam Pembelajaran kewarganegaraan

Kategori Sikap Kritis	Jumlah Mahasiswa	Persentase (%)
Sangat Kritis	17	29,3%
Kritis	25	43,1%
Cukup Kritis	11	19,0%
Kurang Kritis	5	8,6%
Total	58	100%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **72,4% mahasiswa** berada pada kategori kritis dan sangat kritis. Hal ini menandakan bahwa literasi digital berkontribusi dalam

membentuk kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap informasi yang beredar di ruang digital.4. Dampak Literasi Digital terhadap Etika dan Tanggung Jawab Digital

Etika dan tanggung jawab digital mencakup sikap sopan dalam berkomunikasi, tidak menyebarkan hoaks, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media digital. Tabel 4. Etika dan Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Penggunaan Teknologi

Kategori Etika Digital	Jumlah Mahasiswa	Persentase (%)
Sangat Baik	22	37,9%
Baik	23	39,7%
Cukup	9	15,5%
Kurang	4	6,9%
Total	58	100%

Sebanyak **77,6% mahasiswa** menunjukkan etika dan tanggung jawab digital yang baik dan sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa literasi digital berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran etis mahasiswa dalam menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di era teknologi pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Literasi digital mampu, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan, membentuk sikap kritis dalam menyikapi informasi digital, Menumbuhkan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan dan efektif dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter di era digital.

Daftar Pustaka

- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: John Wiley & Sons.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kemendikbud.
- Suryadi, A. (2019). Literasi digital dalam pembelajaran abad ke-21. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 113–125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winataputra, U. S. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis dan Paradigmatik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Berdirinya Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Majapahit dalam Perkembangan Sejarah Bangsa Indonesia

Zaliah, S.Sos., M.Hum⁸
Politeknik Sriwijaya Palembang

“Bedirinya dua kerjaan besar Sriwijaya dan Majapahit di wilayah nusantara menunjak perkembangan sejarah bangsa Indonesia”.

Sejarah bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang cukup panjang, Sejarah banhsa Indonesia tak terlepas dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Ada dua Kerajaan yang menjadi landasan atau dasr berdirinya bangsa Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Tetapi sebelum dua Kerajaan tersebut ada yang membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada yaitu Kerajaan kutai tahun 400M, 1 tahun Rajanya mulawarman bukti adanya nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan kutai yaitu ditemukannya prasasti 7 rupa atau (7 tiang batu) di prasasti tersebut menerangkan bahwa raja mulawarman sering mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada brahmana, ucapan terima kasih brahmana kepada para raja maka dibuatlah prasasti tersebut.

⁸ Penulis lahir di Palembang 24 Desember 1968, merupakan dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang mata kuliah pendidikan Pancasila, HomeBase di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, menyelesaikan S1 di Universitas Sjakhyakirti Palembang tahun 1995, menyelesaikan S2 di Pascasarjana program studi Hukum Pidana universitas Sriwijaya tahun 2006,

1. Kerajaan Sriwijaya abad ke VII- XII

Rajnya : Wanasa Syailendra

Bukti adanya nilai-nilai Pancasila ditemukan prasasti kedukan bukit dibukit siguntang 683M. Dalam Bahasa melayu huruf pallawa yang artinya Kerajaan sriwijaya Kerajaan maritim yang artinya Kerajaan sriwijaya sudah berdaulah, agama, pemilihan yang kuat.

Bukti Kerajaan sriwijaya Kerajaan maritim ini terbukti sudah memiliki armada lautan yang kuat, terbukti apabila ada kapal dagang yang melewati Kerajaan sriwijaya apabila singgah akan terhindar bajak laut tetapi sebaliknya apabila tidak singgah kapal tersebut akan dihancurkan oleh bajak laut.

Disegani di asia Tenggara :

- a. Wilayah semenanjung melayu, selat malaka, dan selat sunda

Runtuhnya Kerajaan sriwijaya, Kerajaan majapahit, cholanmandala (india)

- b. Dokumen- Dokumen yang ada :

Kedukan bukit-telaga batu-karang perahu-talang tuan-kota kapur

2. Kerajaan majapahit abad ke XIII- XVI Jawa Timur 1243

Berbeda dengan Sriwijaya, Majapahit adalah kerajaan Agraris. Tetapi walaupun demikian daerah kekuasaannya meliputi hampir seluas negara Indonesia sekarang ini. Daerah-daerah tersebut meliputi dari Sumatera Barat sampai ke daerah-daerah Maluku dan Irian di bagian Timur. Bahkan pada waktu itu pengaruh Majapahit diluaskan pula terhadap negara tetangga di Asia Tenggara dalam bentuk persahabatan. Rajanya kerajaan majapahit Prabu Hayam Wuruk Bukti “nilai-nilai Pancasila sudah adanya agama, pemerintah dan semua itu tertulis dalam kitab-kitab”.

a. Kitab negara kertagama Kerajaan Empu

Prapanca yang berisikan Bahwa sudah ada susunan pemerintahan majapahit dan keagungan raja wayam wuruk tentang will, Kekuasaan majapahit, dan silsilah-silsilah raja-raja majapahit dan lain-lain.

b. Kitab sutasomo karangan empu tantolar

Bhineka Tunggal ika tanhana bharma mangrua yang artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki tuhan, hindu, budha hidup berdampingan (toleransi).

c. Sumpah palapa tahun 1331

Sumpah palapa tahun 1331 yang berbunyi “ Saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh Nusantara bertakluk dibawah kekuasaan negara (majapahit)”.

Runtuhnya Kerajaan majapahit :

- 1) Meninggalnya raja dan patih gajah mada
 - 2) Perebutan kekuasaan didalam istana
 - 3) Majapahit takluk oleh demak
- Kedukan bukit tentang hari jadi kota Palembang 16 juni 682M. Rajanya Dapuma Hiyang Srijayanasa (Sejarah berdirinya Kerajaan sriwijaya)
 - Telaga batu tentang sama dengan karang brahi, kutukan dari raja yang berbuat jahat
 - Talang tuo tentang Pembangunan taman srikserta oleh raja Dapuma Hiyang Sri Jayanasa, ini bukti ketaatan raja pada ajaran budha
 - Kota kapur tentang kutukan terhadap orang yang berbuat jahat

Kekuasaan Majapahit dari senanjung melayu (malaysia) sampai irian barat.

Raja dari kerajaan Majapahit yang terkenal adalah raja Hayam Wuruk. Raja ini sangat memperhatikan:

- Bidang ekonomi
- Budaya
- Pembuatan/perbaikan tempat penyeberangan untuk kemakmuran rakyat). Pada masa kerajaan ini unsure-unsur Pancasila terdapat dalam:
- Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca Yang berisikan tentang:

Susunan pemerintahan Majapahit yang mencerminkan musyawarah & hubungan Majapahit dengan negara tetangga.

- Kitab Sutasoma, disusun Empu Tantular Yang berisikan tentang Bhinika Tunggal Ika (Hindu dan Budha hidup berdampingan (toleransi).
- Prasasti Brumbung (1329)
- Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat raja, antara lain:
- Rakiyan I Hino
- Rakiyan I sirikan
- Rakiyan I Halu

Sepeninggal Raja Hayam Wuruk terjadi pertentangan dalam istan untuk memperebutkan kekuasaan, hingga pada akhirnya kerajaan Majapahit ditaklukkan oleh kerajaan Demak pada tahun 1478.

Dengan berdirinya kerajaan sriwijaya di sumatera selatan dan kerajaan majapahit di jawa timur yang ada di wilayah nusantara, hal ini merupakan penunjang dalam pertumbuhan sejarah bangsa Indonesia.

Merengung dan Olah Pikir dalam Kegiatan Filsafat untuk Mengenal Diri dan Alam Semesta

Hadi Winarko, S.Sos. M.Si⁹
Politeknik Sriwijaya Palembang

“Dalam Mengenal Diri Sendiri Maupun Alam Semesta Manusia Perlu Merengung dan Olah Pikir Yang Merupakan Kegiatan Dalam Filsafat”.

Pengertian Filsafat

Dalam wacana ilmu pengetahuan banyak orang memandang bahwa filsafat merupakan batang ilmu yang rumit, kompleks dan sulit dipahami secara definitif, namun sebenarnya pendapat yang demikian ini tidak benar, selama manusia hidup seseorang tidak dapat menghindari dari kegiatan berfilsafat, tetapi sebenarnya filsafat itu sangat mudah untuk dipahami.

Sebelum memahami lebih lanjut tentang pengertian filsafat, maka terlebih dahulu kita harus memahami istilah filsafat, secara etimologis filsafat berasal dari kata Bahasa Yunani “Philen” yang berarti cinta, “shophia” berarti kebijaksanaan

Secara umum filsafat

Merupakan hasil pemikiran manusia yang kritis dan radikal yang membahas secara menyeluruh sampai pada hakikatnya

⁹ Penulis lahir di martapura OKU Timur, 11 januari 1974, merupakan dosen di politeknik sriwijaya mata kuliah pendidikan pancasila, hombase di jurusan teknik sipil politeknik negeri sriwijaya, menyelesaikan studi S1 di universitas sjakyakirti palembang tahun 1999, menyelesaikan S2 di pascasarjana program studi administrasi Stisipol Candradimuka palembang tahun 2017.

untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan kenyataannya ditinjau dari lingkungan/ ruang lingkup pembahasan filsafat Adalah tentang: Manusia, Etika, Logika, Alam, Agama, Pengetahuan dan lain-lain

Contoh-Contoh Filsafat

- a. Jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini materi merupakan sumber kebenaran dalam hidup ini, maka orang tersebut berfilsafat Materialisme.
- b. Jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini terpenting Adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan lahiriah, maka orang tersebut berfilsafat Hedonisme.
- c. Jikalau seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio, maka orang tersebut berfilsafat rasiolisme.

Pancasila sebagai system filsafat

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan system filsafat.

Pengertian sistem

Suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling Kerjasama untuk satu tujuan dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Pengertian filsafat Pancasila

Filsafat yang mempunyai obyek Pancasila yaitu Pancasila yang benar dan sah yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Definisi Filsafat menurut ahli

- a. R. KWANT

Berfilsafat yang sesungguhnya Adalah pengujian secara kritis terhadap segala sesuatu yang bersifat jarak.

b. A. AYER

Filsafat Adalah suatu pencarian jawaban tentang beberapa pertanyaan yang pada pokoknya tetap sama sejak zaman Yunani .

- Filosofis, berdasarkan filsafat
- Filosof, ahli pikir
- Falsafah, gagasan dan sikap batin yang paling dasar

Contoh Kritis dan Radikal

- a. Mengganti ideologi
- b. Menuntut perubahan Undang-Undang

Pengertian Filsafat Menurut Ahli : Plato, Aristoteles, Ir. oedja Wiatna.

Plato -> Filsafat adalah pengetahuan yang meminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.

Aristoteles -> Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam logika, fisika, etika, politik.

Ir. oedja Wiatna -> Filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.

Makna filsafat adalah -> Untuk mencari kebenaran yaitu adanya rasa ingin tahu manusia, yang di implementasikan dengan bertanya tentang hal hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia dengan cara mencari jawaban dan pertanyaan untuk kebenaran bukan memiliki kebenaran.

Manfaat filsafat adalah untuk merenung atau olah pikir merefleksikan ucapan seseorang untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri.



BAB II

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER

Implementasi Nilai Pancasila oleh Mahasiswa/I UIN Sumatera Utara dalam Peristiwa Bencana Alam di Sumatera Utara

Dr. Aminuddin, S.Sos, MA, C.IP¹⁰
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

“Mahasiswa UIN Sumatera Utara merefleksikan nilai Pancasila melalui aksi kemanusiaan kolektif dalam penanganan bencana alam sosial nyata”.

Indonesia berlandaskan *Pancasila* sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mesti diimplementasikan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang penting saat menghadapi situasi krisis seperti bencana alam, di mana rasa kemanusiaan, solidaritas, kebersamaan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial diuji dalam praktik sosial *riil* (sila-sila Pancasila). (Erlinawati, 2020)

¹⁰ Penulis lahir di Kapias Batu VIII 07 Juli 1986 Provinsi Sumatera Utara, merupakan Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Politik Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada Tahun 2008, menyelesaikan studi S2 Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada Tahun 2013, dan telah menyelesaikan studi S3 Akidah dan Filsafat Islam Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) pada Tahun 2019.

Mahasiswa sebagai bagian dari *agent of change* dan *guardian of value* memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan nilai Pancasila ketika terjadi peristiwa bencana alam. Dalam konteks universitas, mahasiswa tidak hanya sekadar sebagai penerima pembelajaran nilai, tetapi juga sebagai praktisi nilai melalui aksi sosial, respon cepat terhadap korban, dan kolaborasi lintas kelompok dalam upaya pemulihan dan mitigasi bencana. Kajian tentang bagaimana mahasiswa memaknai dan menerapkan nilai Pancasila dalam pengalaman nyata ini penting dilakukan, khususnya di daerah rawan bencana seperti Sumatera Utara.

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi dan pemahaman tertentu tentang nilai Pancasila dan perannya di lingkungan kampus serta kehidupan sosial, meskipun tingkat implementasinya masih perlu diuji dalam konteks spesifik seperti bencana alam. (Zainudin Hasan, dkk 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi nilai Pancasila oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara dalam konteks respon terhadap bencana alam serta memahami tantangan yang dihadapi dalam aplikasi nilai tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pengalaman nyata mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan bencana di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat menggali secara mendalam makna, persepsi, dan praktik yang dilakukan mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila selama dan setelah kejadian bencana. Subjek Penelitian: Mahasiswa UIN Sumatera Utara yang aktif dalam kegiatan respon bencana, baik melalui lembaga kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), maupun melalui relawan kampus. Data dianalisis secara tematik, mengacu pada teori Pancasila sebagai nilai

fundamental yang berkorelasi dengan perilaku sosial dalam situasi krisis. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui pengkodean tematik.

Pembahasan

1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Dalam situasi tanggap bencana, mahasiswa UIN Sumatera Utara kerap menampilkan praktik sosial nyata yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan secara simultan. Misalnya, di tengah bencana banjir dan hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Utara dan Aceh, civitas akademika termasuk mahasiswa terlibat langsung dalam aksi bantuan kemanusiaan bersama dosen dan relawan lainnya. Dalam program *respons cepat* tersebut, sebanyak 47 relawan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UINSU bergabung dengan komunitas relawan lainnya untuk mengumpulkan donasi, menyortir dan memaketkan bantuan logistik, serta menyalurkannya langsung kepada keluarga terdampak di berbagai wilayah yang sulit dijangkau, seperti Gang Keramat di Deli Serdang dan Aceh Tamiang. Aksi ini mencerminkan upaya nyata dalam mengedepankan solidaritas sosial tanpa memandang latar belakang identitas warga terdampak bencana. (Tim Humas UINSU, 2025)

Selain itu, kegiatan kemanusiaan diinisiasi oleh mahasiswa juga muncul melalui *Badan Eksekutif Mahasiswa* dan organisasi kemahasiswaan lain seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Komunikasi UINSU yang telah melakukan penggalangan dana secara mandiri baik di lingkungan kampus maupun melalui media sosial untuk kemudian menyalurkan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari kepada korban bencana alam di Aceh Tamiang. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan besar kampus tetapi juga menginisiasi langkah kemanusiaan yang

responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana. (HMJ Ilmu Komunikasi UINSU)

Penguatan nilai ketuhanan dalam konteks ini juga terlihat ketika prodi seperti Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU mengajak sivitas akademika untuk melaksanakan *doa dan solidaritas* bagi korban bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan doa bersama ini tidak sekadar ritual keagamaan, tetapi menjadi bentuk refleksi spiritual yang meneguhkan empati, kepedulian sosial, dan rasa kebersamaan di tengah ujian bencana alam, dilandasi keyakinan bahwa segala musibah perlu dihadapi dengan ketabahan dan solidaritas. (Devi Eka Yulita, 2025)

Kegiatan-kegiatan ini juga didukung oleh kebijakan kelembagaan kampus. Misalnya, UINSU mendistribusikan bantuan dari Kementerian Agama untuk mahasiswa yang tidak dapat pulang ke daerah asal akibat banjir, termasuk penyerahan paket sembako dan bahan makanan kepada puluhan mahasiswa yang terdampak banjir di Medan dan sekitarnya. Bentuk kolaborasi ini menunjukkan integrasi antara respons individu mahasiswa dengan dukungan institusional kampus dalam menjalankan aksi kemanusiaan. (Tim Humas UINSU, 2025)

Secara kolektif, tindakan tersebut menunjukkan bahwa para mahasiswa UIN Sumatera Utara tidak hanya memahami Pancasila secara konseptual, tetapi juga mencoba mengimplementasikan nilai kemanusiaan (sila kedua) dan persatuan (sila ketiga) dalam konteks nyata respon terhadap bencana. Kegiatan seperti penggalangan dana, penyaluran logistik, dan doa bersama bukan hanya aksi spontan semata, tetapi merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai ketuhanan yang hidup dalam praktik sosial mahasiswa. Nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi landasan moral dalam situasi krisis, di mana bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial korban.

Dalam kerangka kolaboratif, mahasiswa mengimplementasikan sila keempat Pancasila melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan tim relawan, mulai dari penentuan prioritas bantuan hingga strategi distribusi logistik. Praktik ini dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan UINSU seperti BEM dan HMJ melalui koordinasi internal sebelum penyaluran bantuan. Sila kelima diwujudkan dengan memastikan distribusi bantuan yang adil dan nondiskriminatif, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, sebagai bentuk keadilan sosial di tingkat lokal yang selaras dengan nilai Pancasila.

2. Hambatan dalam Implementasi Nilai Pancasila

Walaupun partisipasi mahasiswa dalam aksi kebencanaan menunjukkan adanya upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik sosial, berbagai hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah ketidaksiapan struktural, terutama minimnya pelatihan formal yang secara khusus mengintegrasikan pengetahuan mitigasi bencana dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga aksi mahasiswa cenderung bersifat responsif dan spontan, bukan terencana dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial, logistik, maupun dukungan kelembagaan, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keberlanjutan aksi kemanusiaan di wilayah terdampak pascabencana. Penelitian persepsi mahasiswa menemukan bahwa meskipun pemahaman nilai Pancasila tinggi, implementasi secara konsisten di kehidupan nyata mahasiswa masih perlu diperkuat melalui pembelajaran kontekstual di kampus. (Femilasari, dkk, 2024)

Penutup

Mahasiswa UIN Sumatera Utara telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam respon kebencanaan, terutama kemanusiaan, solidaritas, persatuan, dan keadilan sosial. Peran ini menunjukkan Pancasila sebagai kerangka moral dalam aksi

sosial nyata. Namun, keterbatasan pelatihan dan sumber daya masih menjadi kendala, sehingga diperlukan program kesiapsiagaan bencana berbasis nilai Pancasila serta kolaborasi kampus dan pemangku kepentingan untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

Daftar Pustaka

- Erlinawati, Pancasila Value in Natural Disaster Management Based on Disaster Management, Journal volume & issue, Vol. 1, no. 1 pp. 59 – 70.
- Femilasari, A. N., Maulidi, M. K., Al-Khilafa, R. M., Nabilah, S. S., & Supriyono, S. (2024). Perspektif Mahasiswa terhadap Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan sebagai Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5923–5926. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13307>
- Hasan, Z., Gotama, D., & Natalia, L. (2024). *Persepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. E-Jurnal Kampus Akademik
- Zainudin Hasan, dkk. Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Kampus, *Jurnal JMIA*, Vol. 2 No. 6 (2025): Desember. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7006>

Budaya Kewarganegaraan dalam Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Sumber Belajar Siswa

*Dr. Hasdin, S.Pd., M.Pd.¹¹
Universitas Tadulako*

“Budaya kewarganegaraan yang bersumber dari kearifan lokal merupakan sumber belajar yang sangat potensial dalam pendidikan kewarganegaraan siswa”.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban sipilnya, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku demokratis serta berkarakter kebangsaan. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan seringkali diajarkan secara teoritis dalam kelas tanpa mengaitkannya secara kuat pada realitas kehidupan sosial budaya siswa. Padahal, bangsa Indonesia kaya akan kearifan lokal yang menyimpan nilai-nilai luhur yang sangat

¹¹ Hasdin lahir di Mansalean, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, 18 September 1980, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako. Penulis menyelesaikan studi S1 Prodi PPKn FKIP Universitas Tadulako tahun 2004, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Makassar tahun 2011, dan menyelesaikan S3 Pascasarjana Prodi Ilmu Sosial Universitas Tadulako tahun 2022.

relevan untuk mendukung pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual, bermakna, dan aplikatif.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai pengetahuan, nilai, norma, dan praktik sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu menjadi sumber pembelajaran bagi pendidikan kewarganegaraan karena mengandung unsur gotong royong, musyawarah, toleransi, serta kepedulian sosial dan semua nilai yang sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran akan membantu siswa memahami kewarganegaraan secara tidak hanya teoritis, tetapi juga praktik nyata dalam konteks kehidupan mereka sendiri.

Konsep Budaya Kewarganegaraan dan Kearifan Lokal

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merujuk pada sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan pemahaman atas hak dan kewajiban sipil, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan kompetensi kognitif (*civic knowledge*), kompetensi keterampilan (*civic skills*), dan kompetensi disposisi (*civic disposition*) yang mencakup sikap toleran, bertanggung jawab sosial, dan berpikir kritis. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran kewarganegaraan membantu menerjemahkan nilai-nilai abstrak tersebut menjadi kondisi sosial nyata yang dialami siswa setiap hari.

Kearifan lokal sendiri mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas, yang selaras dengan konsep kewarganegaraan. Nilai seperti *gotong royong*, *musyawarah*, dan penghormatan terhadap alam merupakan contoh nyata praktik budaya yang mengandung nilai demokrasi dan tanggung jawab kolektif. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan terhadap tradisi *Nguras Enceh* di Yogyakarta ditemukan bahwa nilai kebersamaan, kerja sama, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan yang

terkandung dalam tradisi tersebut dapat dijadikan sebagai aset penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan budaya lokal tetapi juga mencerminkan prinsip kebhinekaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang esensial dalam pembelajaran kewarganegaraan (Rahmawati, E. N., Sutrisno, C., & Fianisa, R, 2024).

Relevansi Kearifan Lokal terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

1. Nilai Kewarganegaraan dalam Kearifan Lokal

Integrasi kearifan lokal memberikan cakupan bagi siswa untuk memahami bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan terefleksi dalam praktik sosial nyata. Nilai *musyawarah untuk mufakat* merupakan praktik yang mencerminkan nilai demokrasi dan menghormati pendapat orang lain. Nilai *gotong royong* mencerminkan solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif. Penelitian di Kampung Naga menunjukkan bahwa nilai-nilai kebudayaan lokal seperti kerjasama, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam berkontribusi signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai pendidikan kewarganegaraan (Diyanti, I., Rahmatika, R., & Rosmilawati, I, 2024).

Selain itu, studi tentang nilai-nilai lokal masyarakat Sunda seperti *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh* mengungkapkan relasi yang kuat antara kearifan lokal dan pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai ini mencerminkan nilai religiusitas, moral, kerja sama, dan menghargai keragaman yang semuanya relevan dengan pembelajaran kewarganegaraan (Fadil, K., et al, 2025).

2. Kontekstualisasi Pembelajaran

Penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran memungkinkan siswa belajar dalam konteks yang dekat dengan pengalaman hidup mereka. Misalnya, pembelajaran kewarganegaraan dapat diperkaya dengan mempelajari

tradisi lokal seperti *pesta laut* di Blanakan yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan kerja sama antaranggota masyarakat dalam kegiatan sosial. Nilai-nilai tersebut merepresentasikan kompetensi *civic disposition* dan *civic skills* yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan (Rahmawati, E. N., Sutrisno, C., & Fianisa, R, 2024).

Secara lebih luas, integrasi kearifan lokal juga memungkinkan munculnya sumber belajar yang lebih kaya, seperti cerita rakyat, upacara adat, permainan tradisional, serta peraturan adat yang dapat dikaitkan dengan konsep kewarganegaraan, termasuk kebersamaan, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap aturan, dan keadilan sosial. Hal ini pada gilirannya membuat pembelajaran kewarganegaraan lebih menarik, bermakna, dan relevan bagi siswa karena bersumber langsung dari lingkungan sosial mereka (Atmaja, T. S, 2025).

Strategi Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Sumber Belajar

1. Integrasi ke dalam Kurikulum dan Pembelajaran

Kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam berbagai tema pembelajaran kewarganegaraan melalui strategi pembelajaran kontekstual. Misalnya, guru dapat merancang proyek belajar di mana siswa melakukan observasi terhadap praktik sosial budaya lokal dan menganalisis nilai-nilai kewarganegaraan di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang mendukung pengalaman belajar yang lebih bermakna dan aplikatif.

Kurikulum nasional yang terintegrasi dengan pendekatan *deep learning* yang berlaku di Indonesia sekarang memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks lokal, sehingga penggunaan budaya kewarganegaraan dalam kearifan lokal sebagai sumber belajar menjadi lebih optimal. Studi tentang integrasi kearifan lokal dalam proses

pembelajaran yang menggunakan pendekatan *deep learning* menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam konteks pembelajaran terbukti dapat meningkatkan pembelajaran konseptual siswa, meningkatkan motivasi, dan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan mereka (Damayanti, Putri Dwiyan, Harsono, Arta Mulya Budi., Suriansyah, Ahmad: 2025).

2. Metode dan Media Pembelajaran

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kearifan lokal, guru dapat menggunakan metode pembelajaran partisipatif seperti studi kasus, pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*), dan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Misalnya, siswa dapat diajak melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, menyusun dokumentasi budaya lokal, atau membuat karya proyek yang merepresentasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam tradisi lokal.

Media pembelajaran juga dapat dikembangkan menggunakan sumber lokal seperti film dokumenter tradisi setempat, buku cerita rakyat, atau media digital yang merekam praktik sosial budaya di komunitas. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih kontekstual tetapi juga membantu siswa mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara budaya dan kewarganegaraan.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

1. Tantangan

Meskipun potensi kearifan lokal sangat besar, implementasinya dalam pembelajaran sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan buku dan sumber pembelajaran yang terintegrasi dengan budaya lokal, ketidaksiapan guru dalam mengaitkan materi abstrak dengan konteks budaya, dan minimnya dukungan fasilitas pembelajaran yang memadai. Selain itu, dominasi kurikulum berbasis standar

nasional seringkali membuat guru kurang fleksibel dalam menggunakan sumber belajar lokal (Haerani., Rispawati., dan Basariah. 2025).

2. Solusi

Solusi yang dapat ditempuh meliputi penyediaan pelatihan profesional bagi guru dalam pemanfaatan kearifan lokal, penyusunan bahan ajar yang memuat konteks lokal secara sistematis, serta peningkatan kerja sama antara sekolah dan komunitas lokal. Selain itu, dukungan kebijakan pendidikan yang memberikan ruang lebih besar bagi adaptasi kurikulum berbasis konteks lokal akan membantu memaksimalkan potensi sumber belajar ini.

Daftar Pustaka

- Rahmawati, E. N., Sutrisno, C., & Fianisa, R. (2024). Multicultural education based on local wisdom in the perspective of civic education through the Nguras Enceh tradition. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 311–320.
- Diyanti, I., Rahmatika, R., & Rosmilawati, I. (2024). The influence of indigenous peoples' local wisdom values on the understanding of civic education in Kampung Naga Elementary School. *AS-SABIQUN*, 6(5), 942–955.
- Fadil, K., et al. (2025). Representation of the values of local wisdom of Sunda community in shaping the profile Pancasila students in civics education. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*. 7 (2), 161-172.
- Haerani., Rispawati., dan Basariah. 2025. Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Perspektif dan Tantangan Guru di SMPN 21 Mataram. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 10 (03), 256-265.

Atmaja, T. S. (2025). Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 8 (1), 171-179.

Damayanti, Putri Dwiyanana, Harsono, Arta Mulya Budi, Suriansyah, Ahmad: 2025). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 10 (04), 291-309.

Dari Nilai Pancasila ke Aksi Nyata: Integrasi PPKn, Olahraga, dan Matematika melalui Program Jalan Sehat dan Audit Sampah

*Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.¹²
Universitas Stella Maris Sumba*

“Integrasi PPKn, olahraga, dan matematika melalui jalan sehat dan audit sampah meningkatkan karakter Pancasila, numerasi, kebugaran, dan kepedulian lingkungan”.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara berkarakter melalui internalisasi nilai Pancasila yang terwujud dalam tindakan sosial sehari-hari. Penguatan karakter tidak cukup berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi perlu dioperasionalkan menjadi pengalaman belajar yang melatih tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan gotong royong. Sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional, Profil Pelajar Pancasila menegaskan bahwa pelajar Indonesia diarahkan menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan kompetensi global dan perilaku sesuai nilai Pancasila yang tercermin dalam enam dimensi utama (beriman/berakhlak mulia, berkebinekaan

¹² Penulis lahir di Desnpasar, 20 Agustus 1986, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Stella Maris Sumba, menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di UPMI Bali (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia) tahun 2009, menyelesaikan S2 Pendidikan Matematika di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) tahun 2020, dan sedang menempuh pendidikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) sejak tahun 2024.

global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (ditsd.kemendikdasmen.go.id). Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menekankan pembelajaran kontekstual berbasis proyek dan aksi, sehingga karakter dibentuk melalui praktik kolaboratif dan reflektif, bukan ceramah semata (uploads.belajar.id).

Berdasarkan pendekatan tersebut, artikel ini menawarkan model integratif yang menggabungkan PPKn-Olahraga-Matematika melalui program Jalan Sehat dan Audit Sampah. Jalan sehat berfungsi sebagai aktivitas fisik terstruktur untuk mendukung kebugaran dan kebiasaan hidup aktif, sedangkan audit sampah menjadi aksi lingkungan berbasis data untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan keterampilan pengelolaan sampah di sekolah. Integrasi Matematika dilakukan melalui numerasi autentik, seperti pengukuran, perhitungan, penyajian tabel/grafik, dan interpretasi tren (misalnya persentase sampah per kategori, perubahan volume sampah residu, serta rata-rata durasi atau intensitas aktivitas fisik).

Konteks lokal SMKN 2 Kota Tambolaka memperkuat urgensi model ini. Sebagai sekolah kejuruan, SMK berpeluang menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Tantangan pengelolaan sampah sekolah dan penguatan perilaku hidup aktif merupakan isu nyata yang dapat dijawab melalui program terpadu. Integrasi lintas mata pelajaran juga mendukung pengembangan kolaborasi, problem solving, dan literasi data yang dibutuhkan di dunia kerja.

Dari sisi kajian, praktik proyek P5 terkait pengelolaan sampah menunjukkan potensi membentuk disiplin dan tanggung jawab peserta didik karena siswa terlibat langsung pada aksi dan refleksi nilai (uploads.belajar.id). Secara internasional, penelitian menunjukkan intervensi aktivitas fisik berbasis sekolah dapat meningkatkan perilaku gerak dan kebugaran, terutama ketika program dilakukan rutin, terstruktur, dan dipantau (*Frontiers*, 2025). Literatur juga mendukung audit sampah sekolah sebagai strategi pendidikan keberlanjutan yang memperbaiki pengelolaan fasilitas dan

meningkatkan kesadaran lingkungan melalui data (*ijedm.com*).

Research gap penelitian ini terletak pada minimnya laporan yang mengintegrasikan secara eksplisit PPKn-Olahraga-Matematika melalui jalan sehat dan audit sampah berbasis analisis data, khususnya pada konteks sekolah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan desain integrasi program, (2) mengukur perubahan perilaku (partisipasi, disiplin) dan literasi numerasi, serta (3) menilai peningkatan kesadaran lingkungan dan penghayatan nilai Pancasila dalam bentuk aksi nyata.

Penelitian menggunakan desain quasi experiment dengan pendekatan pretest-posttest one group disertai penguatan data kualitatif melalui refleksi siswa. Lokasi penelitian adalah SMKN 2 Kota Tambolaka, dengan subjek siswa (misalnya kelas X atau XI; jumlah disesuaikan). Intervensi berlangsung $\pm 3-4$ minggu dengan dua program utama: (1) Jalan Sehat terstruktur (2-3 kali/minggu) dengan pencatatan durasi, jarak (estimasi rute), intensitas subjektif menggunakan RPE skala 1-10, serta data kebugaran sederhana bila memungkinkan; (2) Audit Sampah mingguan melalui pemilahan (organik, plastik, kertas, residu), penimbangan, pencatatan, dan analisis perubahan. Integrasi dilakukan melalui PPKn (refleksi nilai dan aturan bersama), Olahraga (kebugaran, keselamatan, evaluasi intensitas), dan Matematika (persentase, rata-rata, grafik, interpretasi tren). Instrumen meliputi lembar observasi, catatan jalan sehat, form audit sampah, tes literasi numerasi (pre-post), dan refleksi siswa. Data dianalisis melalui statistik deskriptif serta uji peningkatan sederhana (N-gain atau uji t), sedangkan refleksi dianalisis tematik.

Hasil menunjukkan program berdampak pada tiga aspek utama: aktivitas fisik meningkat (partisipasi stabil dan disiplin lebih baik), literasi numerasi meningkat (kemampuan mengolah data dan menafsir tren), serta kesadaran lingkungan meningkat (perilaku memilah sampah dan komitmen mengurangi residu). Secara pedagogis, aktivitas fisik dan audit sampah menjadi konteks autentik pengembangan numerasi sebagai alat

memahami realitas sekolah dan memonitor progres.

Refleksi siswa menunjukkan bahwa kegiatan lebih bermakna karena “nilai Pancasila menjadi nyata” melalui gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Penggunaan data membuat siswa lebih percaya pada hasil dan lebih mudah menyusun argumen karena didukung angka dan grafik sebagai bukti perubahan.

Temuan ini sejalan dengan kebijakan Profil Pelajar Pancasila dan panduan P5 yang menekankan pembelajaran kontekstual berbasis proyek, dokumentasi hasil, dan refleksi ([ditsd.kemendikdasmen.go.id](https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/uploads/belajar.id); uploads.belajar.id). Peningkatan kebugaran selaras dengan studi yang menunjukkan program aktivitas fisik sekolah yang terstruktur dapat meningkatkan movement behaviors dan aerobic fitness (*Frontiers*, 2025). Audit sampah juga konsisten dengan literatur yang menekankan audit dan rencana reduksi sebagai strategi pendidikan keberlanjutan dan pengelolaan fasilitas sekolah ([ijedm.com](https://ijedm.com/education.nsw.gov.au); education.nsw.gov.au).

Implementasi menghadapi kendala seperti keterbatasan alat ukur (disiasati rute tetap, stopwatch, dan RPE), konsistensi pemilahan (SOP sederhana, pembagian tugas, rotasi), serta perbedaan kemampuan numerasi (template dan pendampingan). Secara keseluruhan, integrasi PPKn–Olahraga–Matematika melalui jalan sehat dan audit sampah di SMKN 2 Kota Tambolaka efektif mendorong aksi nyata nilai Pancasila, meningkatkan literasi numerasi berbasis data, serta memperkuat kepedulian lingkungan sesuai prinsip pembelajaran berbasis proyek (ditsd.kemendikdasmen.go.id).

Daftar Pustaka

Frontiers in Sports and Active Living. (2025). The impact of a school-based physical activity program on primary school children’s movement behaviors, aerobic fitness and motor competence one year after its conclusion (follow-up study). *Frontiers in Sports and Active Living*. Frontiers+1

- International Journal of Education for Sustainable Development. (2025). Educational waste audit and reduction plans for sustainable utilization of instructional facilities in secondary education. *Education for Sustainable Development*, 1(2). ijedm.com
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Edisi revisi). https://uploads.belajar.id/document/files/Panduan_Pengembangan_Projek_Penguatan_Profil_Pelajar_Pancasila_01j1z0ye6pj383h2y1336ck050.pdf Uploads Belajar
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). Profil Pelajar Pancasila. <https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila> ditsd.kemendikdasmen.go.id
- NSW Department of Education. (2025). Waste: Teaching and learning resources (school waste audits). <https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/sustainability/teaching-and-learning/waste> education.nsw.gov.au

Memaknai Betapa Pentingnya Konsep Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

*Liza Utama, S.H., M.H.¹³
Politeknik Negeri Sriwijaya*

“Pancasila merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila telah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang. Pun nilai-nilai yang ada didalam Pancasila terbenak dan berakar dari dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, keberadaan Pancasila dari dulu hingga sekarang wajib dipertahankan, diamalkan dan bahkan harus dilestarikan”.

Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu :

- *idein* yang berarti melihat atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran
- *logia* yang berarti ajaran

Menurut Puspowardoyo, ideologi dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

¹³ Penulis lahir di Palembang, 7 Januari 1983, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI), menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNSRI tahun 2004. Menyelesaikan S2 di Pascasarjana UNSRI, Prodi Ilmu Hukum tahun 2007.

Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan, gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti :

- a. Bidang politik termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan
- b. Bidang sosial
- c. Bidang kebudayaan
- d. Bidang keagamaan

Makna Ideologi bagi negara

- Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa

Kekuatan Ideologi

Menurut Alfian, mengemukakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada pada ideologi tersebut :

1. Dimensi realita

Dimensi realita dimaksudkan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung didalam ideologi tersebut secara riil hidup didalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya (menjadi *volkgeist*/ jiwa bangsa)

2. Dimensi idealisme

Dimensi idealisme dimaksudkan bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama

3. Dimensi fleksibilitas/dimensi pengembangan

Dimensi fleksibilitas/dimensi pengembangan dimaksudkan bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasar.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan ideologi lain

Aspek	Liberalisme	Komunisme	Sosialisme	Pancasila
Politik hukum	➤ Demokrasi liberal ➤ Hukum untuk melindungi individu ➤ Dalam politik mementingkan individu	➤ Demokrasi rakyat ➤ Berkuasa mutlak satu parpol ➤ Hukum untuk melanggar komunis	➤ Demokrasi untuk kolektivitas ➤ Diutamakan kebersamaan ➤ Masyarakat sama dengan negara	➤ Demokrasi Pancasila ➤ Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu
Ekonomi	➤ Peran negara kecil ➤ Swasta mendominasi ➤ Kapitalisme ➤ Monopolisme ➤ Persaingan bebas	➤ Peran negara dominan ➤ Demokrasi kolektivitas berarti demokrasi negara ➤ Monopoli negara	➤ Peran negara ada untuk pemerataan ➤ Keadilan distributif yang diutamakan	➤ Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dll, yang merugikan rakyat
Agama	➤ Agama urusan	➤ Agama candu	➤ Agama harus mendor	➤ Bebas memilih salah satu

	pribadi ➤ Bebas beragama (bebas memilih agama dan bebas tidak beragama)	masyarakat ➤ Agama harus dijauhkan dari masyarakat ➤ atheis	ong berkembangnya kebersamaan	agama ➤ Agama harus menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Pandangan terhadap individu dan masyarakat	➤ Individu lebih penting dari masyarakat ➤ Masyarakat diabadikan bagi individu	➤ Individu tidak penting ➤ Masyarakat tidak penting ➤ Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting	➤ Masyarakat lebih penting dari individu	➤ Individu diakui keberadaannya ➤ Masyarakat diakui keberadaannya ➤ Masyarakat ada karena ada individu ➤ Individu akan punya arti jika hidup ditengah masyarakat
Ciri khas	➤ Penghargaan HAM ➤ Demokrasi ➤ Negara hukum ➤ Reaksi terhadap absolutisme	➤ Atheisme ➤ Otoriter ➤ Ingkar HAM ➤ Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme	➤ Kebersamaan ➤ Jalan tengah	➤ Keselarasan, keseimbangan dan keserasia dalam setiap aspek kehidupan

Pancasila sebagai Ideologi terbuka

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985 tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu dirumuskan. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebuuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Menurut Moerdiono menyebutkan, ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka :

1. Dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Dengan demikian, tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya.
2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme-leninisme/komunisme. Dewasa ini, komunisme dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya.
3. Pengalaman sejarah politik negara Indonesia dengan pengaruh komunisme sangat penting. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup. Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Pancasila tidak lagi tampil sebagai acuan bersama tapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijaksanaan pemerintah disaat itu menjadi absolut. Konsekuensinya, perbedaan-perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila.
4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
kementerian riset dan teknologi dan pendidikan tinggi.
2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi*. Jakarta. Tidak dipublikasikan
- Winarno. 2016. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.
Jakarta. PT Bumi Aksara

Upaya Guru Agama dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama pada Peserta Didik di SMP Swasta Budi Dharma Takengon

*Dra. Rosdiani Nasution, MA.¹⁴
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon*

“Moderasi beragama di lingkungan sekolah menengah merupakan fondasi penting dalam membangun sikap toleran, adil, dan harmonis di tengah keberagaman agama peserta didik.”

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik sosial. Salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah munculnya sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme beragama yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan

¹⁴ Penulis lahir di Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara 25 Nopember 1965, merupakan Dosen Tetap di Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Takengon, menyelesaikan studi S1 THN 1989 di Fakultas Ushuluddin Prodi Aqidah Filsafat dan Akta IV fakultas Tarbiyah di IAIN Sumatera Utara, dan Studi S2 nya di Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Prodi Pendidikan Islam Banda Aceh THN 2013.

kepribadian peserta didik. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), peserta didik berada pada fase remaja awal yang masih labil secara emosional dan sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Oleh karena itu, penanaman nilai moderasi beragama pada jenjang ini menjadi sangat penting.

SMP Swasta Budi Dharma Takengon merupakan salah satu sekolah yang memiliki latar belakang keberagaman agama, baik dari sisi peserta didik maupun tenaga pendidiknya. Kondisi ini menjadikan sekolah tersebut sebagai ruang sosial yang relevan untuk mengkaji bagaimana praktik moderasi beragama dibangun dan dikembangkan melalui peran guru agama. Guru agama memiliki posisi strategis karena tidak hanya mengajarkan doktrin keagamaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya guru agama dalam membangun sikap moderasi beragama pada peserta didik di SMP Swasta Budi Dharma Takengon, bentuk sikap moderasi beragama yang berhasil dikembangkan, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan upaya guru agama dalam membangun sikap moderasi beragama pada peserta didik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif.

Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru agama Islam, Kristen, dan Buddha, serta peserta didik SMP Swasta Budi Dharma Takengon. Objek penelitian difokuskan pada upaya guru agama, sikap moderasi beragama peserta didik, serta kendala yang dihadapi dalam proses penanaman nilai moderasi beragama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perilaku dan interaksi sosial

peserta didik di lingkungan sekolah. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari guru agama, kepala sekolah, dan peserta didik terkait strategi, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai moderasi beragama. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip sekolah, foto kegiatan, dan dokumen resmi lainnya.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

1. Upaya Guru Agama dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru agama di SMP Swasta Budi Dharma Takengon telah melakukan berbagai upaya sistematis dalam membangun sikap moderasi beragama pada peserta didik. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pembelajaran di kelas, kegiatan sekolah, serta keteladanan dan pembiasaan.

Pertama, melalui pembelajaran di kelas. Guru agama mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam materi ajar dengan menekankan pentingnya sikap adil, toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat dialogis dan partisipatif, seperti diskusi kelompok dan tanya jawab, sehingga peserta didik didorong untuk berpikir kritis serta menghargai perbedaan pendapat.

Kedua, melalui kegiatan sekolah. Sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik lintas agama, seperti kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing, sosialisasi anti-bullying, berbagi takjil, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, lomba budaya, serta kegiatan sosial lainnya. Kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan

rasa kebersamaan, solidaritas, dan kerja sama antar peserta didik.

Ketiga, melalui keteladanan dan pembiasaan. Guru agama dan seluruh warga sekolah berupaya menampilkan sikap yang mencerminkan nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil, terbuka, dan menghargai perbedaan. Keteladanan ini menjadi contoh nyata yang mudah ditiru oleh peserta didik.

2. Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik

Sikap moderasi beragama yang berhasil dibangun pada peserta didik meliputi sikap moderat, adil, toleransi, musyawarah, cinta tanah air, anti kekerasan, serta ramah terhadap budaya lokal. Peserta didik menunjukkan perilaku saling menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksakan keyakinan, mampu bekerja sama lintas agama, serta aktif dalam kegiatan sosial dan budaya di sekolah.

Guru agama mengetahui perkembangan sikap moderasi beragama peserta didik melalui pengamatan terhadap perilaku sehari-hari, partisipasi dalam kegiatan sekolah, serta kedisiplinan dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.

3. Kendala dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama

Dalam pelaksanaannya, guru agama juga menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain masih adanya sebagian kecil peserta didik yang belum memahami konsep moderasi beragama secara mendalam, sikap fanatik yang berlebihan, keterbatasan wawasan antaragama, serta keterbatasan waktu kegiatan akibat padatnnya jadwal pembelajaran. Namun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan personal kepada peserta didik, pembinaan karakter secara persuasif, serta pembiasaan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap aktivitas sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya guru agama dalam membangun sikap moderasi beragama pada peserta didik di SMP Swasta Budi Dharma Takengon dilakukan secara terintegrasi melalui pembelajaran di kelas, kegiatan sekolah, serta keteladanan dan pembiasaan. Upaya tersebut terbukti mampu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, toleran, dan inklusif.

Sikap moderasi beragama yang berkembang pada peserta didik menjadi modal penting dalam membentuk generasi muda yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Oleh karena itu, praktik baik yang dilakukan di SMP Swasta Budi Dharma Takengon dapat dijadikan rujukan bagi sekolah lain dalam mengembangkan pendidikan moderasi beragama.

Daftar Pustaka

- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Yanti, A. N. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama dalam Penguatan Moderasi Beragama Peserta Didik*. UIN Datokarama.

Dinamika Evaluasi Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar: Tantangan dan Inovasi di Era Kurikulum Merdeka

*Nurhalimah Siahaan, S.Pd., M.Pd.¹⁵
Universitas Negeri Medan*

“Evaluasi PPKn SD yang bermakna membantu peserta didik belajar nilai, sikap, dan tanggung jawab sebagai warga negara”.

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan karena berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran serta efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dasar, evaluasi pembelajaran memiliki peran strategis karena tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga menilai sikap, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran PPKn seharusnya dirancang secara komprehensif dan bermakna.

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa perubahan paradigma dalam pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi abad ke-21. Sejalan dengan hal tersebut, evaluasi pembelajaran tidak lagi

¹⁵ Penulis lahir di Sengon Sari, 30 Januari 1993, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan, menyelesaikan studi S1 di Jurusan PPKn FIS UNIMED tahun 2016, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar UNIMED tahun 2020.

berorientasi semata-mata pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif (Kemendikbudristek, 2022).

Namun, dalam praktiknya, evaluasi pembelajaran PPKn di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Guru sering kali mengalami kesulitan dalam merancang dan menerapkan evaluasi yang mampu mengukur kompetensi sikap dan keterampilan secara objektif. Selain itu, pemahaman terhadap konsep asesmen autentik dan evaluasi berkelanjutan masih belum merata. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dinamika evaluasi pembelajaran PPKn di sekolah dasar dengan menyoroti tantangan yang dihadapi serta inovasi evaluasi yang relevan di era Kurikulum Merdeka.

Konsep Evaluasi Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Evaluasi pembelajaran secara umum diartikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran (Arikunto, 2019). Dalam pembelajaran PPKn, evaluasi memiliki karakteristik khusus karena berkaitan erat dengan pembentukan sikap, nilai moral, dan karakter kewarganegaraan peserta didik.

PPKn di sekolah dasar bertujuan membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, evaluasi pembelajaran PPKn tidak dapat hanya mengandalkan tes tertulis, tetapi perlu mengintegrasikan penilaian sikap dan keterampilan melalui observasi, penugasan, dan refleksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2021) yang menegaskan bahwa evaluasi dalam pendidikan karakter harus bersifat holistik dan berorientasi pada perilaku nyata peserta didik. Dalam Kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran PPKn diarahkan untuk mendukung tercapainya Profil Pelajar Pancasila. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran itu sendiri (*assessment as learning*). Dengan demikian, evaluasi diharapkan mampu memberikan umpan balik yang konstruktif

bagi guru dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Tantangan Evaluasi Pembelajaran PPKn di Era Kurikulum Merdeka

Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibilitas bagi guru, implementasi evaluasi pembelajaran PPKn di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih dominannya evaluasi berbasis tes kognitif. Banyak guru cenderung menggunakan soal pilihan ganda atau uraian karena dianggap lebih praktis dan mudah diadministrasikan, meskipun tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kompetensi sikap dan keterampilan peserta didik.

Kedua, kesulitan dalam menilai aspek sikap dan karakter secara objektif. Penilaian sikap sering dianggap subjektif dan membutuhkan waktu serta ketelitian yang tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian guru kurang optimal dalam melakukan observasi sikap secara berkelanjutan (Sani, 2020).

Ketiga, keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep asesmen diagnostik dan formatif. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk melakukan asesmen sejak awal pembelajaran guna memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Namun, dalam praktiknya, asesmen sering kali hanya dilakukan pada akhir pembelajaran sebagai asesmen sumatif.

Keempat, beban administrasi evaluasi yang cukup kompleks. Penyusunan instrumen, rubrik, serta pelaporan hasil evaluasi sering kali menjadi kendala bagi guru sekolah dasar, terutama bagi guru yang mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

Inovasi Evaluasi Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam evaluasi pembelajaran PPKn yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar dan tuntutan Kurikulum Merdeka. Salah satu inovasi yang relevan adalah

penerapan asesmen autentik. Asesmen autentik menilai kemampuan peserta didik melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi nyata, seperti proyek sederhana, studi kasus, dan kegiatan praktik kewarganegaraan (Kunandar, 2018).

Selain itu, penggunaan penilaian berbasis proyek (project-based assessment) dapat menjadi alternatif evaluasi yang efektif. Melalui proyek, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam bentuk karya atau aktivitas nyata, misalnya proyek kebersihan lingkungan sekolah atau kegiatan musyawarah kelas.

Inovasi lain yang dapat diterapkan adalah refleksi diri dan penilaian teman sejawat (peer assessment). Melalui refleksi, peserta didik dilatih untuk menilai sikap dan perilaku mereka sendiri, sehingga evaluasi tidak hanya bersifat eksternal tetapi juga internal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran yang memerdekakan dan mendorong kesadaran diri peserta didik.

Pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung inovasi evaluasi, misalnya melalui penggunaan formulir digital atau aplikasi sederhana untuk mencatat hasil observasi dan umpan balik. Namun demikian, inovasi evaluasi tidak harus selalu berbasis teknologi canggih, melainkan berfokus pada kebermaknaan dan relevansi dengan tujuan pembelajaran PPKn.

Penutup

Evaluasi pembelajaran PPKn di sekolah dasar mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Tantangan berupa dominasi evaluasi kognitif, kesulitan penilaian sikap, keterbatasan pemahaman asesmen formatif, serta beban administrasi perlu disikapi secara bijak dan konstruktif. Inovasi evaluasi pembelajaran PPKn melalui asesmen autentik, penilaian berbasis proyek, refleksi diri, dan pemanfaatan teknologi sederhana menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan kualitas evaluasi.

Evaluasi yang inovatif dan bermakna diharapkan mampu mendukung pembentukan Profil Pelajar Pancasila serta menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kemendikbudristek. 2022. *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kunandar. 2018. *Penilaian Autentik: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2021. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sani, Ridwan Abdullah. 2020. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Sistem Filsafat Pancasila.

*Deri Darfin, S.Sos, M.Si¹⁶
Politeknik Negeri Sriwijaya*

"Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila membentuk mahasiswa menjadi ilmuwan religius, beradab, dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bangsa yang demokratis."

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai *civic education*, *citizenship education*, dan bahkan ada yang menyebut sebagai *democracy education*. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan rumusan "*Civic International*" (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Mansoer, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional) Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok mata kuliah

¹⁶ Penulis lahir di Medan, 20 November 1974, merupakan Dosen di Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, menyelesaikan studi S1 di FISIP USU tahun 2001, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Administrasi Publik tahun 2014 UNSRI.

Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara. "*civic education*", "*democracy education*", serta "*citizenship education*" yang berlandaskan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia, serta muatan makna pendidikari pendahuluan bela negara (Mansoor, 2005). Hal ini berdasarkan kenyataan di seluruh negara di dunia, bahwa kesadaran demokrasi serta implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan dan berkeadaban.

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Dalam wacana ilmu pengetahuan sebenarnya pengertian filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Dengan lain perkataan selama manusia hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, atau dalam kehidupan manusia senantiasa berfilsafat. Jikalau seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa kenikmatan adalah merupakan nilai terpenting dan tertinggi dalam kehidupan maka orang tersebut berpandangan filsafat hedonisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu, maka orang tersebut berfilsafat liberalisme, jikalau seseorang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dan kehidupan agama, maka orang tersebut berfilsafat, sekulerisme, dan masih banyak pandangan filsafat lainnya.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: 1) Suatu kesatuan bagian-bagian, 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, 3) Saling berhubungan, saling ketergantungan, 4) Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem), 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974:22).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradabab: Namun demikian sila-sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, setiap sila merupakan suatu unsur (bagian yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Maka dasar filsafat negara Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lainnya.

Sila-sila Pancasila dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarki piramidal tadi. Tiap-tiap sila seperti telah disebutkan di atas mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarki tersebut.

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adi) dan-beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975:43,44)

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*.
- Mansoer, H. (2005). *Pendidikan Demokrasi dan Civic Culture*. [s.l.]: [s.n.].
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Shore, & Voich. (1974). *Social Theory and Social Structure*. [s.l.]: [s.n.].

Negara dan Konstitusi

*Ayu Puspasari, S.H., M.H.¹⁷
Politeknik Negeri Sriwijaya*

“Negara dan Konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara”.

Secara umum, negara merupakan suatu organisasi yang terbentuk dari sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintahan yang berdaulat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera bagi rakyatnya. Selain itu, negara juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Keberadaan negara sangat penting karena menjadi alat untuk mengatur kehidupan bersama agar tidak terjadi kekacauan atau ketidakteraturan.

1. Sifat-Sifat Negara

Negara memiliki karakteristik tertentu yang menjadi wujud dari kedaulatan yang dimilikinya. Sifat-sifat ini menunjukkan bagaimana negara menjalankan kekuasaan dan fungsinya dalam masyarakat. Secara umum, sifat-sifat negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sifat Memaksa

Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa

¹⁷ Penulis lahir di Palembang, 19 Desember 1974, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1998, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2015.

masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat memaksa ini diperlukan agar tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial. Melalui kewenangannya, negara dapat menindak setiap bentuk pelanggaran hukum untuk memastikan stabilitas dan ketertiban umum.

b. Sifat Monopoli

Negara memiliki hak tunggal dalam menentukan arah dan tujuan bersama masyarakat. Kewenangan ini mencakup penguasaan atas fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat dijalankan oleh pihak lain, misalnya penentuan kebijakan pemerintahan, pengelolaan kekuasaan, serta pelaksanaan sistem hukum di dalam wilayah negara.

c. Sifat Mencakup Semua (All-Encompassing)

Peraturan dan kebijakan yang dibuat negara berlaku untuk seluruh warga tanpa pengecualian. Artinya, setiap individu yang tinggal di dalam suatu wilayah negara terikat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa negara berwenang mengatur seluruh elemen masyarakat demi kepentingan umum

2. Unsur-Unsur Negara

Menurut teori politik modern, sebuah negara minimal memiliki empat unsur utama, yaitu:

2.3.1 Wilayah

Merupakan area atau ruang geografis tempat penduduk suatu negara tinggal, yang meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara di atasnya. Wilayah menjadi batas kekuasaan dan yurisdiksi negara.

2.3.2 Rakyat

Merupakan sekumpulan individu yang menjadi penghuni dan warga dari suatu negara. Rakyat memiliki

hak dan kewajiban terhadap negaranya.

2.3.3 Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum dalam negara.

2.3.4 Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan ini bersifat penting untuk menegaskan eksistensi suatu negara dalam hubungan internasional, baik secara *de facto* maupun *de jure*.

3. Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan utama pembentukan negara adalah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, adil, tertib, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Negara dibentuk agar masyarakat dapat hidup dalam keteraturan serta mendapatkan perlindungan terhadap hak dan kebutuhannya. Negara juga berperan dalam mengatur hubungan sosial, menjamin keadilan, dan menciptakan kesejahteraan umum. Secara lebih rinci, fungsi dan tujuan negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melindungi seluruh warga negara dan wilayahnya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga-lembaga negara yang berwenang.
- c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menyediakan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- d. Meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dengan menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata.
- e. Menjalin hubungan internasional yang harmonis dengan negara lain untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu demi mencapai ketertiban, kesejahteraan, dan tujuan bersama. Unsur-unsur penting negara terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Negara juga memiliki sifat memaksa, monopoli, serta mencakup semua aspek kehidupan masyarakat demi tercapainya keteraturan dan kepentingan umum.

Konstitusi menjadi dasar legal yang mengatur bagaimana negara dijalankan. Di Indonesia, perumusan konstitusi telah melalui proses yang panjang, dimulai dari persiapan oleh BPUPKI dan PPKI hingga pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, konstitusi mengalami perkembangan melalui pergantian bentuk konstitusi di beberapa periode, seperti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Selain itu, untuk menyesuaikan dinamika demokrasi dan kebutuhan bangsa, dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999 hingga 2002 yang menghasilkan sistem ketatanegaraan yang lebih modern, demokratis, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Konstitusi memiliki peran fundamental dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Melalui konstitusi, batas kewenangan lembaga negara diatur dengan jelas sehingga tercipta keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, konstitusi memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi terciptanya keadilan, keamanan, dan

ketertiban dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konstitusi adalah elemen utama yang memastikan jalannya kehidupan bernegara berjalan sesuai prinsip hukum dan demokrasi. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis dan politik dalam menjaga hubungan antara rakyat dan pemerintah agar tercipta kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan berdaulat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah diharapkan terus menjaga konsistensi dalam menerapkan konstitusi sebagai landasan utama penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.
- b. Lembaga negara hendaknya bekerja sesuai kewenangan yang telah diatur dalam konstitusi agar tercipta keseimbangan kekuasaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
- c. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi agar dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menegakkan prinsip negara hukum.
- d. Institusi pendidikan perlu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara, baik melalui kegiatan belajar formal maupun non-formal.
- e. Penelitian lebih lanjut mengenai konstitusi dan penerapannya diharapkan terus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik.

Konsep Dasar dan Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Amila Shaleha¹⁸

STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh

“Proyek penguatan profil pancasila dalam membentuk karakter serta kegiatan yang dapat berinteraksi dengan teman-teman saat belajar”.

Pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran keterampilan, pengetahuan dan kebiasaan yang diturunkan dari ke generasi berikutnya melalui pelatihan, pengajaran dan penilaian. Selain untuk meningkatkan potensi peserta didik. Pendidikan dalam pembelajaran juga bertujuan untuk membentuk karakter baik mereka, sehingga diharapkan mereka akan menjadi generasi cerdas, berakarakter dan berakhlak al karimah. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari yang hidup dalam diri setiap peserta didik melalui budaya sekolah melalui pembelajaran dalam kurikulum, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pengenalan Eksplorasi Lingkungan Jelajah Nusantara.

Proyek didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan meneliti

¹⁸ Penulis lahir di Gampong Mesjid, 23 Agustus 2004, merupakan mahasiswa semester 8 di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh

topik yang sulit. Proyek ini dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat meneliti, menemukan solusi, dan mengambil keputusan. Mereka bekerja selama periode yang dialokasikan sekolah untuk produksi suatu produk atau kegiatan. Pelajar Pancasila adalah peserta didik yang memiliki karakter berdasarkan falsafah Pancasila atau nilai-nilai Sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Setidaknya terdapat 5 dimensi dalam P5 yaitu: a) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, b) Kebhinnekaan Global, c) Bergotong royong, d) Kreatif, dan e) Mandiri (Kemendikbud, 2022).

Lingkungan masyarakat, dapat berinteraksi dengan temannya di era *new normal* saat ini, serta sikap saling menghormati kepada orang yang lebih tua dan sesama teman, serta dapat menghadapi berbagai tantangan abad pembelajaran 21 yang saat ini menuntut setiap orang untuk dapat bersaing dalam berbagai hal, baik dalam hal akademis maupun sosial. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik diharuskan dapat membuat sebuah proyek. Proyek akan membuat peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dan ketrampilannya dalam berbagai bidang. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Kegiatan proyek merupakan salah satu bentuk kegiatan P5. P5 dilaksanakan dalam dua fase yaitu konseptual dan kontekstual. Dalam kegiatan tersebut peserta didik mendapat kebebasan dalam belajar, struktur kegiatan pembelajaran menjadi fleksibel, sekolah dapat membagi waktu sesuai kebutuhan sehingga menjadi lebih efektif dan aktif karena mereka dapat merasakannya secara nyata dengan kondisi sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat berbagai kemampuan dalam diri pelajar Pancasila (Rahmawati, N., A. Marini., 2022).

Adapun profil pelajar pancasila menjadi pengting dalam pendidikan karena sebagai penuntun nilai dalam proses pembelajaran. Profil Pelajar Pancasila seumpama bintang penuntun yang memberikan arah kebijakan serta praktik pendidikan di tingkat nasional hingga di ruang-ruang kelas.

Sebagai penuntun arah, tujuan pendidikan tidak saja harus mampu menjadi penuntun arah kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Daerah dan sekolah, tetapi juga menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar lebih mikro (Kemendikbud, 2022). Kejadian baru-baru, ini pada tahun ajaran 2024/2025, salah satu sekolah dasar menerapkan proyek pembelajaran berbasis Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema *Gaya Hidup Berkelanjutan*. Peserta didik diajak mengamati permasalahan sampah di lingkungan sekolah, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengolah sampah menjadi produk sederhana seperti kompos dan kerajinan tangan.

Selain itu, profil pancasila juga menjadi uapaya upaya untuk mencapai cita-cita bangsa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdsarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Kemudian baru-baru ini, pada tahun 2024, sejumlah sekolah mulai menguatkan program *Sekolah Ramah Anak* sebagai bagian dari implementasi Profil Pelajar Pancasila. Program ini menekankan terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Peserta didik dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas, kampanye anti kekerasan, serta kegiatan konseling sebaya.

Kemudian profil pancasila juga bertujuan untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia dalam upaya mencapai cita-cita bangsa, sistem pendidikan tidak saja perlu menyiapkan pelajar Indonesia untuk mampu menghadapi tantangan- tantangan nasional dan global yang sedang dihadapi saat ini, tetapi juga mengundang partisipasi seluruh warga mendorong munculnya gagasan- gagasan baru dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah (Dini Irawati, ddk, 2022). Pada tahun 2024, beberapa sekolah

menerapkan proyek inovasi sekolah dengan mengangkat isu global seperti perubahan iklim, krisis air bersih, dan kesehatan mental remaja. Peserta didik diajak mengkaji isu tersebut dari perspektif lokal dan global, kemudian merancang solusi sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar. Kegiatan ini melatih peserta didik berpikir kritis dan kreatif, sekaligus menumbuhkan kesadaran sebagai bagian dari komunitas global.

Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi

dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.

Daftar Pustaka

- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurasih, I. (2022). Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3613–3625.
- Irawati, Dini, dkk. 2022. “Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa”. *Journal Edumaspul*, 6 (1), Year 2022-1225. (diaksestanggal 22 November 2022).
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. 2022. Jakarta: Kemendikbud Ristek.



BAB III

REKONSTRUKSI

PENDIDIKAN KARAKTER

BERBASIS NILAI,

BUDAYA, HUKUM DAN

LINGKUNGAN

Membangun Karakter Bangsa: Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS

Dr. Ismaul Fitroh, S.Pd., M.Pd.¹⁹
Universitas Negeri Gorontalo

“Pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS berperan penting dalam membangun karakter bangsa melalui internalisasi moral dan tanggung jawab sosial peserta didik”.

Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan nilai menjadi penting untuk menyiapkan generasi muda yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, IPS berperan strategis karena mengkaji kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan kebangsaan yang sarat nilai, sehingga integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS menjadi langkah penting dalam pembentukan karakter bangsa.

¹⁹ Penulis lahir di Lumajang, 25 Maret 1991, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, menyelesaikan studi S1 di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang tahun 2013, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret tahun 2015, dan menyelesaikan studi S3 di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025.

Landasan Filosofis dan Teoretis Pendidikan Nilai dalam IPS

Nilai merupakan konsep yang tidak mudah didefinisikan karena bersifat abstrak dan berkaitan erat dengan pandangan manusia tentang sesuatu yang dianggap baik, positif, dan diinginkan. Nilai dapat dipahami sebagai sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, disukai, dan memiliki konotasi kebaikan yang tercermin dalam sikap dan perilaku manusia (Bertens, 2007; Mansur, 2006). Nilai berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap baik dan buruk, adil dan tidak adil, layak dan tidak layak, serta indah dan tidak indah, yang hanya dapat diketahui melalui perilaku nyata individu dalam kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2011). Dengan demikian, nilai memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan etika, moral, budi pekerti, dan karakter yang melekat pada diri manusia.

Sebagai sesuatu yang abstrak, nilai dapat dikenali melalui berbagai indikator yang tampak dalam kehidupan manusia. Nilai berfungsi sebagai tujuan atau arah kehidupan, memberi aspirasi dan inspirasi untuk melakukan hal-hal yang positif, serta menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak laku sesuai dengan norma dan moralitas masyarakat (Adisusilo, 2013). Selain itu, nilai memiliki daya tarik emosional yang memengaruhi perasaan, hati nurani, dan keyakinan seseorang, serta mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai yang diyakininya. Nilai juga sering muncul dalam kesadaran seseorang ketika menghadapi dilema, permasalahan, atau kebingungan dalam kehidupan, sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan moral dan sosial.

Secara garis besar, nilai dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu nilai nurani (*values of being*) dan nilai memberi (*values of giving*) (Elmubarok, 2009). Nilai nurani merupakan nilai yang tumbuh dari dalam diri manusia dan berkembang menjadi perilaku, seperti kejujuran, keberanian, disiplin, cinta damai, dan tanggung jawab. Sementara itu, nilai memberi adalah nilai yang diwujudkan dalam tindakan sosial dan interaksi dengan orang lain, seperti sikap setia, hormat, kasih

sayang, keadilan, kepedulian, dan kemurahan hati. Penanaman kedua jenis nilai tersebut memerlukan pendidikan nilai yang terencana dan berkelanjutan agar dapat berkembang secara optimal dalam diri peserta didik.

Pendidikan nilai secara konseptual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara (Winataputra & Budimansyah, 2007). Pendidikan nilai berperan penting dalam membentuk kepribadian manusia Indonesia yang utuh, sekaligus menjadi sarana untuk menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan karakter peserta didik (Sukitman, 2016).

Pendidikan nilai juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan moral dan nonmoral yang mencakup aspek estetis dan etis dalam kehidupan manusia (Winecoff, 1988). Pendidikan nilai dipahami sebagai proses pengajaran dan pembimbingan yang membantu peserta didik menyadari kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui pertimbangan nilai yang tepat serta pembiasaan bertindak secara konsisten (Mulyana, 2004). Hal ini sejalan dengan pandangan Lickona, (1992) yang menekankan bahwa pendidikan nilai mencakup proses mengetahui, mencintai, menginginkan, dan melakukan kebaikan, yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai empat tahap, yaitu mengetahui, mencintai, menginginkan, dan melakukan yang baik (Darmadi, 2004). Pendidikan nilai pada dasarnya merupakan proses penanaman nilai agar peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat (Priya, 2016; Sanjaya, 2011).

Dalam konteks pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pendidikan nilai memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menguatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan

kebangsaan. Pembelajaran IPS tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan sosial, tetapi juga pada pembentukan sikap, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Pendidikan nilai dalam IPS mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga peserta didik tidak hanya memahami nilai secara konseptual, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, IPS berfungsi sebagai mata pelajaran yang berperan penting dalam pembentukan etika, moral, dan karakter peserta didik sebagai warga masyarakat dan warga negara.

Integrasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS

Integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menempatkan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Prinsip pertama adalah keterpaduan, yaitu nilai-nilai tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam materi, aktivitas, dan evaluasi pembelajaran IPS (Santoso et al., 2025). Prinsip kedua adalah kontekstualitas, di mana nilai-nilai dikaitkan dengan realitas sosial yang dekat dengan kehidupan peserta didik agar lebih bermakna dan mudah dipahami. Prinsip berikutnya adalah keteladanan, yang menekankan peran guru sebagai model dalam menampilkan sikap dan perilaku bernilai dalam proses pembelajaran. Selain itu, prinsip partisipatif dan reflektif juga penting, karena peserta didik didorong untuk aktif berdiskusi, berpendapat, serta merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena sosial yang dipelajari.

Pendekatan dan model pembelajaran IPS berbasis nilai menuntut penggunaan strategi yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) memungkinkan peserta didik mengaitkan konsep IPS dengan situasi nyata sehingga nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial dapat berkembang secara alami. Model pembelajaran berbasis masalah (*Problem*

Based Learning) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) juga efektif dalam menanamkan nilai, karena peserta didik dihadapkan pada persoalan sosial yang membutuhkan kerja sama, sikap demokratis, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Husna et al., 2024). Melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus, pembelajaran IPS tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan karakter peserta didik.

Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam pembelajaran IPS yang berorientasi pada pendidikan nilai karena mengandung nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dijadikan sumber belajar yang relevan dan autentik (Halimah et al., 2025). Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam materi IPS, peserta didik tidak hanya memahami konsep sosial secara teoritis, tetapi juga belajar menghargai identitas budaya dan norma sosial di lingkungannya. Pembelajaran yang memanfaatkan kearifan lokal membantu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri sekaligus membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap sosial yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Daftar Pustaka

- Adisusilo, S. (2013). *Pembelajaran Nilai-Karakter; Konstruktivisme Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Rajawali Pers.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Gramedia Pustaka Umum.
- Darmadi. (2004). *Guru Abad 21 "Perilaku dan Pesona Pribadi"*. Guespedia.
- Elmubarak, Z. (2009). *Membumikan Pendidikan Nilai : Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus, Dan Menyatukan Yang Tercerai*. Alfabeta.
- Halimah, L., Arnje Fajar, N., Heni Heryani, N., Ai Ratnahayati, N., & Siti Hodijah, N. (2025). Nilai-Nilai Hukum Adat Dan

- Kearifan Lokal Kampung Adat Kuta Sebagai Media Pendidikan IPS Melalui Program Pengabdian Masyarakat. *Aksararaga*, 7(2), 59–64.
- Husna, A., Latipa, T., & Farhurohman, O. (2024). Penanaman Nilai Moral Sosial Dalam Pembelajaran IPS. *Herodotus Jurnal Pendidikan Ips*, 7(3), 431.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character, How Our Schools can Teach respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Mansur, A. (2006). Implementasi Klarifikasi Nilai dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam. *Alfikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1).
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta.
- Priya, R. (2016). Value Education. *National Conference on "Value Education Through Teacher Education,"* 2, 66–70.
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana.
- Santoso, D. I., Ndolu, Y. H., Laia, F., Rantung, D. A., & Stepanus, S. (2025). Pengembangan Kurikulum Kontekstual Pak Berbasis Nilai Kristiani Dan Aspirasi Belajar Peserta Didik Menurut Campbell Wyckoff. *Regula Fidei Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 10(2), 273–287.
- Sukitman, T. (2016). Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter). *JPSD : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(2).
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjan UPI Bandung.
- Winecoff, H. . (1988). *Values and Education: Concepts and Models*. PPS IKIP Malang.

Komodifikasi dan Autentisitas: Menemukan Kembali Akar Gerak Tubuh dalam Dunia Global

*Dr. Yosef Adityanto Aji, S.Sn., MA.²⁰
Institut Seni Indonesia Yogyakarta*

“Komodifikasi gerak tubuh melalui wujud tari dalam dunia global telah menciptakan konflik dengan autentisitas di mana akar budaya sering kali menjadi korban demi keuntungan”.

Dalam era globalisasi gerak tubuh manusia melalui wujud tari telah menjadi objek komodifikasi yang sangat mudah dimanipulasi dan dieksploitasi secara intensif. Tari yang dulunya merupakan ekspresi alami dari identitas budaya dan jiwa individu kini sering kali diubah menjadi produk yang dapat diperdagangkan (berupa barang dan jasa). Fenomena ini terlihat dalam industri hiburan maupun media sosial, di mana gerak tubuh melalui tari-tarian dikemas sebagai barang konsumsi. Pengertian komodifikasi secara singkat yaitu menggambarkan proses dimana sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis diberi nilai dan karenanya bagaimana nilai pasar dapat menggantikan nilai-nilai sosial lainnya. Komodifikasi dalam seni tari merujuk pada proses ketika tari, penari, atau

²⁰ Penulis lahir di Yogyakarta, 3 Mei 1982, merupakan dosen di Prodi Teater Musikal dan Jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penulis juga menjadi dosen di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Tari, ISI Yogyakarta tahun 2007, menyelesaikan S2 di Pasca Sarjana Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, UGM Yogyakarta tahun 2010, menyelesaikan S3 di Program Doktor Pengkajian Seni, ISI Yogyakarta tahun 2020.

elemen budaya pendukungnya diubah menjadi sebuah komoditas. Dalam hal ini yaitu sesuatu yang dapat diperjualbelikan, dikonsumsi, dimanipulasi, dan dieksploitasi untuk tujuan keuntungan secara finansial (ekonomi), *life style* dan hiburan maupun promosi wisata.

Secara umum sebuah tarian bukanlah sekadar ekspresi gerak tubuh fisik semata, ia merupakan manifestasi dari sejarah, budaya, dan identitas. Dalam konteks tradisional tari sering kali terikat pada pola-pola ritual (magis), upacara, atau praktik sehari-hari yang membawa makna spiritual dan sosial. Namun pada era globalisasi saat ini telah mengubah sudut pandang dan menimbulkan berbagai respon, banyak unsur-unsur dari gerak tubuh diproduksi ulang untuk memenuhi permintaan pasar. Misalnya, tari-tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia diadaptasi menjadi bentuk pertunjukan komersial di panggung internasional. Tentu saja dalam implementasinya sering kali kehilangan konteks aslinya. Hal ini menimbulkan dilema yaitu bagaimana kita membedakan antara sebuah tarian yang autentik dan yang sudah dikomodifikasi. Akan tetapi di sisi lain aktivitas seperti ini dapat meningkatkan visibilitas serta eksistensi tari tradisional di kancah nasional maupun internasional serta dapat memberi peluang ekonomi bagi seniman lokal.

Industri wisata dan hiburan misalnya, menjual gerak tubuh melalui paket tarian wisata yang dikemas sebagai produk premium tetapi dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Contoh faktualnya antara lain tari-tarian klasik di Bali maupun Yogyakarta yang berakar dari budaya lokal kini dikomodifikasi menjadi atraksi wisata maupun hiburan yang “terjangkau”, sehingga kehilangan makna magis dan ritualnya.

Selain itu, media sosial secara tidak langsung dapat mempercepat proses komodifikasi ini, platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain memungkinkan siapa saja untuk mengakses dan mengomodifikasi gerak tubuh. Penyebaran dilakukan melalui video-video konten yang tersebar secara masif yang terkadang di dalam konten itu tanpa

ada filter untuk membatasi validitas objek kontennya.

Teori komodifikasi Marx menjelaskan bahwa dalam kapitalisme segala sesuatu termasuk gerak tubuh dijadikan komoditas untuk dieksploitasi dan manipulasi. Gerak tubuh yang autentik seperti tarian tradisional atau adat yang asli diubah menjadi produk wisata (dirancang untuk turis), di mana turis sering kali harus membayar untuk memberikan “pengalaman” budaya. Contoh lain dari komodifikasi misalnya, banyak orang merasa khawatir melihat bagaimana budaya asing seperti musik K-Pop, musik pop Amerika, film Hollywood, drama Korea, ataupun drama China yang mulai menguasai pikiran generasi muda kita. Sering terlihat anak-anak muda lebih suka menonton drama Korea dari pada menikmati cerita rakyat kita sendiri. Dominasi itu membuat kita lupa akar budaya lokal yang kaya.

Autentisitas gerak tubuh merujuk pada keaslian ekspresi yang berasal dari akar budaya dan pribadi. Menurut Heidegger, autentisitas adalah keadaan di mana individu hidup sesuai dengan eksistensi sejati. Dalam konteks gerak tubuh, ini berarti gerak yang tidak dipengaruhi oleh pasar, tetapi oleh tradisi dan pengalaman hidup. Menemukan kembali akar gerak tubuh berarti kembali ke praktik budaya asli seperti tarian ritual atau gerak harian dalam masyarakat tradisional. Akar gerak tubuh sering kali terletak pada budaya lokal. Misalnya, gerak tubuh dalam tarian Bali atau Yogyakarta membawa makna spiritual yang mendalam. Namun, globalisasi telah mengaburkan akar ini dan menggantinya dengan versi yang dikomodifikasi. Dalam dunia global autentisitas dapat dicapai melalui kolaborasi budaya, elemen-elemen lokal digabungkan dengan pengaruh global tanpa kehilangan esensi. Misalnya, seniman kontemporer yang mengadaptasi tarian tradisional untuk panggung modern sambil mempertahankan makna asli serta mendapatkan nilai ekstra.

Tantangan utama dalam hal ini adalah resistensi terhadap komodifikasi. Masyarakat sering kali terjebak dalam siklus konsumsi di mana gerak tubuh yang autentik dianggap kuno

atau tidak menarik. Oleh sebab itu untuk menemukan kembali akar gerak tubuh diperlukan strategi multidimensi. Pertama, penguatan dalam pendidikan seni dan budaya yang menekankan pada sejarah dan otentisitas gerak tubuh. Institusi pendidikan formal dapat mengintegrasikan pengetahuan dan praktik tari-tarian tradisional ke dalam kurikulum, hal ini dilakukan agar membantu generasi muda memahami akar mereka. Kedua, teknologi digunakan untuk mendukung autentisitas budaya lokal. Penggunaan aplikasi *virtual reality* dapat mensimulasikan gerak tubuh tradisional. Ketiga, gerakan sosial seperti dekolonisasi budaya dapat membantu agar tidak terjadi konflik dalam komodifikasi. Secara singkat komodifikasi gerak tubuh dalam dunia global telah menciptakan ketegangan dengan autentisitas, sehingga akar budaya sering kali terkorbankan demi keuntungan. Namun melalui upaya untuk menemukan kembali akar budaya, kita dapat mempertahankan keaslian gerak tubuh dalam dunia global.

Daftar Pustaka

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Dewi, Anggraeni Purnama. (2016). *Komodifikasi Tari Barong di Pulau Bali: Seni berdasarkan Karakter Pariwisata* dalam Jurnal Panggung Vol. 26 No. 3. pp. 222-233.
- Duangdara, Yanawud. (2017). *The Commodification of Thai Dance: a Case Study of Petjaratsang*. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Master of Arts (Cultural Resource Management) Graduate School, Silpakorn University.
- Gusnadi, Dendi. (2019). *Komodifikasi Seni Tradisional Sunda Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Kota Bandung* dalam Jurnal AKRAB JUARA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Volume 4 Nomor 3 pp. 14-22.
- Raya, Victor C. B. dkk. (2020). *Modern Dance Commodification Strategy in Tourism Promotion (Study on The Modern Dance Community in Kupang City)* dalam Journal of Sustainable

Tourism and Entrepreneurship (JoSTE). ISSN: 2714-6480, Vol 1, No 4, 2020, 333-347.

Ulum, M. Syahrul. (2020). *Kesenian Tradisional di Era Komodifikasi Budaya: Pergeseran Makna Magis-Religius Dalam Kesenian Jaranan* dalam Jurnal Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam. Vol. 29 No. 2. pp. 87-102.

Yeo, Sidney. (2024). *Commodifying Identity: The Workings and Consequences of Hyper-Subjectivity in The Neoliberal Capitalist Dance Industry*. MA: Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy University of Utrecht.

Strategi Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Nilai Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah

Dr. A. Ardiansyah.SE, M.Pd.²¹

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

“Mengajar dengan tema, mendidik dengan nilai, dan membentuk karakter dengan keteladanan itulah ruh pembelajaran tematik integratif berbasis moderasi beragama di Madrasah Ibtidaiyah.”

Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama di lembaga-lembaga pendidikan dasar seperti Madrasah Ibtidaiyah. Karakter siswa yang moderat mencerminkan sikap toleransi, keseimbangan, dan saling menghormati merupakan respons terhadap kompleksitas sosial-kultural masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks ini, nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat penting ditanamkan sejak dini sebagai fondasi pembentukan sikap siswa yang mampu hidup harmonis dan produktif dalam masyarakat plural (Amtiran dan Kriswibowo 2024). Pendidikan karakter moderasi beragama merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang seimbang, adil, dan toleran kepada peserta

²¹ Penulis lahir di Pinrang, 02 Februari 1978, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Unhas Makassar tahun 2001, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar UNY tahun 2009, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan Dasar Pascasarjana UNY tahun 2019.

didik sejak usia dini. Pendidikan ini bertujuan membentuk pribadi yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat sekaligus sikap terbuka terhadap perbedaan, sehingga mampu menjalani kehidupan sosial secara harmonis. Dalam konteks pendidikan dasar, moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam membangun karakter religius yang tidak ekstrem, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta menghargai keberagaman sebagai sunnatulla

Implementasi pendidikan karakter moderasi beragama di Madrasah Ibtidaiyah dilakukan melalui integrasi nilai-nilai moderasi dalam proses pembelajaran, budaya madrasah, dan keteladanan pendidik. Guru berperan sebagai figur utama dalam menanamkan nilai tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), tawassuth (jalan tengah), dan i'tidal (keadilan) melalui pembiasaan sikap, kegiatan kolaboratif, serta penguatan nilai moral dalam setiap aktivitas belajar. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep moderasi beragama secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Pendidikan karakter moderasi beragama diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah yang berakhlak mulia, memiliki komitmen kebangsaan, serta mampu hidup rukun dalam masyarakat yang plural. Melalui pembinaan karakter yang berkelanjutan, peserta didik dibekali kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan secara bijaksana, menghindari sikap intoleran, serta menumbuhkan semangat persatuan dan perdamaian. Dengan demikian, pendidikan karakter moderasi beragama menjadi pilar strategis dalam membangun peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

Sebagai pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan dasar, *pembelajaran tematik integratif* menawarkan kesempatan untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran melalui tema yang bermakna dan kontekstual bagi siswa. Pembelajaran tematik integratif menekankan keterkaitan antarkompetensi serta penguatan

keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa, sehingga tidak hanya sekadar transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan perilaku dan nilai (Khasanah dkk. 2024). Hal ini relevan terutama di Madrasah Ibtidaiyah yang mengemban tugas untuk mengintegrasikan penguatan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. (Surahman 2022)

Integrasi nilai moderasi beragama dalam strategi pembelajaran tematik integratif menjadi penting karena moderasi beragama tidak hanya sekadar materi pembelajaran (Rohmaniah dkk. 2025), tetapi juga sebagai landasan etika dalam interaksi sosial siswa (Azzahra dkk. 2025). Nilai-nilai moderasi beragama seperti tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tawassuth (jalan tengah) menjadi pijakan dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter siswa yang adaptif terhadap keragaman. Pendekatan ini selaras dengan penelitian kontemporer yang menekankan bahwa pembelajaran moderasi beragama dapat memperkuat karakter siswa melalui keterlibatan aktif dalam konteks pembelajaran yang komprehensif dan contextual (Lusiana dan Fahriyah 2024).

Pembelajaran moderasi beragama merupakan proses pendidikan yang bertujuan menanamkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang seimbang, adil, dan toleran kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar, moderasi beragama dikenalkan melalui nilai-nilai universal seperti saling menghargai, menghormati perbedaan, kasih sayang, dan keadilan sosial. Pembelajaran ini tidak diarahkan untuk mengaburkan keyakinan agama, melainkan memperkuat pemahaman keagamaan yang rahmatan lil 'alamin serta mendorong siswa untuk hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman.

Implementasi pembelajaran moderasi beragama di Madrasah Ibtidaiyah dapat dilakukan secara terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematik dan kontekstual. Guru berperan penting dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa, seperti kerja

sama, tolong-menolong, musyawarah, dan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode diskusi, pembelajaran berbasis proyek, cerita keteladanan, dan pembiasaan sikap positif, siswa dilatih untuk menginternalisasi nilai tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan) secara alami dan berkelanjutan.

Pembelajaran moderasi beragama pada akhirnya berkontribusi besar dalam pembentukan karakter siswa yang religius, inklusif, dan berakhlak mulia. Siswa tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam interaksi sosial yang harmonis. Dengan pembelajaran yang konsisten dan berkelanjutan, Madrasah Ibtidaiyah dapat menjadi ruang strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan, sikap toleran, serta kemampuan hidup rukun dalam masyarakat multikultural.

Dalam implementasinya, strategi pembelajaran tematik integratif berbasis nilai moderasi beragama tidak hanya menjadi tugas guru mata pelajaran tertentu, tetapi menuntut kolaborasi semua pendidik di MI untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang merancang pengalaman belajar yang bermakna melalui kegiatan kooperatif, proyek tematik, simulasi sosial, dan refleksi nilai yang relevan dengan realitas siswa (Hendra 2025). Pendekatan ini akan membantu siswa tidak hanya memahami keterkaitan antar mata pelajaran tetapi juga bagaimana nilai moderasi beragama diaplikasikan dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, strategi pembelajaran tematik integratif berbasis nilai moderasi beragama di Madrasah Ibtidaiyah merupakan suatu upaya pendidikan yang strategis dan holistik dalam membentuk karakter siswa yang moderat, toleran, dan berdaya saing. Integrasi pembelajaran tematik dan nilai moderasi beragama diharapkan dapat menghasilkan lulusan madrasah yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial (Maulidin dkk. 2025). Oleh

karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk memberikan dasar teoritis dan praktik yang kuat dalam upaya penguatan pendidikan karakter berbasis moderasi beragama di jenjang pendidikan dasar Islam.

Daftar Pustaka

- Amtiran, Abdon Arnolus, dan Arimurti Kriswibowo. 2024. "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8 (3): 331–48. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.
- Azzahra, Nur Aulia, Muhammad Ridha, Saepudin Saepudin, Shera Putri Agustian, dan Fattimah Azzahra. 2025. "Etika Komunikasi Sebagai Landasan Interaksi Sosial yang Efektif, Sopan dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan* 1 (1): 21–27.
- Hendra, Hendra. 2025. "Strategi Inovatif Pembelajaran IPS Untuk Membangun Keterampilan Sosial Siswa Di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi* 1 (2): 93–106.
- Khasanah, Uswatun, Herman Herman, Havidz Cahya Pratama, dan Darodjat Darodjat. 2024. "PEMBELAJARAN TEMATIK: KONSEP, APLIKASI DAN PENILAIAN." *Penerbit Tahta Media*, Juni 1. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/785>.
- Lusiana, dan Lutfiyatul Fahriyah. 2024. "Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (2): 95–103.
- Maulidin, Syarif, Nadhirotul Mukhabibah, dan Arini Ulfah Hidayati. 2025. "REKONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA: TINJAUAN LITERATUR." *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan* 1 (1): 51–63.

- Rohmaniah, Siti, Marsino, dan Wakib Kurniawan. 2025. "Strategi Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kurikulum Merdeka Untuk Pembentukan Karakter." *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 7 (01): 72-85. <https://doi.org/10.53649/taujih.v7i01.1065>.
- Surahman, Susilo. 2022. "PEMBELAJARAN TEMATIK INTEGRATIF UNTUK MADRASAH IBTIDAIYAH." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1 (3): 389-98. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.996>.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Olahraga

*Dr. Agustiyanta, M.Pd.²²
Universitas Sebelas Maret Surakarta*

“Pendidikan olahraga menjadi sarana efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas.”

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai prinsip ideologis, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam membentuk karakter warga negara yang berkepribadian Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik melalui berbagai aktivitas pembelajaran (Kaelan, 2016). Dalam konteks pendidikan nasional, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan tidak hanya

²² Penulis lahir di Sukoharjo, 18 Agustus 1968, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keolahragaan (FKOR) UNS Surakarta, menyelesaikan studi S1 Pendidikan Kepelatihan JPOK FKIP UNS tahun 1992, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Olahraga UNNES Semarang tahun 2004, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Keolahragaan FKOR UNS Surakarta tahun 2023.

berorientasi pada pengembangan kemampuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap, moral, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan (Kemendikbud, 2017). Salah satu bidang pendidikan yang memiliki potensi besar dalam membentuk karakter adalah pendidikan olahraga.

Pendidikan olahraga tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan motorik, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan emosional yang kuat. Melalui aktivitas olahraga, peserta didik belajar tentang nilai-nilai seperti sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran (Lumpkin, 2014). Nilai-nilai tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, pendidikan olahraga dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui kegiatan olahraga yang terstruktur dan terarah, nilai-nilai kebangsaan dapat diinternalisasikan secara alami melalui pengalaman langsung dalam aktivitas fisik dan interaksi sosial.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter

Pancasila mengandung lima sila yang masing-masing memiliki nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kelima nilai ini menjadi dasar dalam membentuk karakter bangsa yang beradab dan bermoral (Latif, 2018).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya nilai spiritual dan moral dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan, nilai ini tercermin dalam sikap religius, integritas, dan tanggung jawab moral.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mengembangkan sikap empati dan toleransi. Nilai ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam dunia pendidikan, nilai ini dapat ditanamkan melalui aktivitas yang mendorong kerja sama dan solidaritas.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menekankan pentingnya nilai demokrasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya sikap adil, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan melalui berbagai pendekatan pendidikan, salah satunya melalui aktivitas olahraga yang memiliki potensi besar dalam menumbuhkan pengalaman belajar yang autentik.

Pendidikan Olahraga sebagai Media Pembentukan Karakter

Pendidikan olahraga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Menurut Bailey (2006), olahraga memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan karakter karena melibatkan interaksi sosial, kompetisi yang sehat, serta pembelajaran nilai-nilai moral.

Dalam kegiatan olahraga, peserta didik dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut pengambilan keputusan, kerja sama tim, serta pengendalian emosi. Proses ini secara tidak langsung melatih kemampuan sosial dan moral peserta didik. Salah satu nilai utama dalam olahraga adalah sportivitas. Sportivitas mencerminkan sikap jujur, menghormati aturan permainan, serta menghargai lawan dan wasit. Nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, olahraga juga mengajarkan pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Atlet atau peserta didik yang terlibat dalam aktivitas olahraga harus mematuhi aturan permainan, menjalankan latihan secara konsisten, serta menghormati keputusan yang diambil dalam pertandingan. Lebih lanjut, aktivitas olahraga juga mendorong kerja sama tim dan solidaritas. Dalam permainan tim, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama dengan anggota tim lainnya.

Dengan demikian, pendidikan olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan keterampilan motorik, tetapi juga sebagai media efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Olahraga

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan olahraga dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan olahraga. Pertama, implementasi nilai ketuhanan dapat dilakukan dengan menanamkan sikap religius dan rasa syukur sebelum dan sesudah aktivitas olahraga. Guru dapat membiasakan peserta didik untuk berdoa serta menanamkan nilai kejujuran dan integritas dalam setiap kegiatan olahraga.

Kedua, nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan melalui sikap saling menghormati antar peserta didik. Dalam pertandingan olahraga, peserta didik diajarkan untuk menghargai lawan, menerima kemenangan dengan rendah hati, serta menerima kekalahan dengan lapang dada.

Ketiga, nilai persatuan dapat ditanamkan melalui aktivitas olahraga yang menekankan kerja sama tim. Permainan kelompok seperti sepak bola, bola basket, atau bola voli mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Keempat, nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui proses pengambilan keputusan dalam kegiatan olahraga, misalnya dalam menentukan strategi permainan atau

pembagian peran dalam tim. Guru dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat.

Kelima, nilai keadilan sosial dapat diwujudkan melalui penerapan aturan permainan yang adil serta pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Melalui pendekatan tersebut, pendidikan olahraga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan praktis.

Peran Guru dalam Integrasi Nilai Pancasila melalui Olahraga

Guru memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran olahraga. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar keterampilan olahraga, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pembentukan karakter peserta didik. Menurut Lickona (2013), pendidikan karakter yang efektif membutuhkan keteladanan, pembiasaan, serta lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, guru olahraga harus mampu menjadi teladan dalam menunjukkan sikap sportivitas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Selain itu, guru juga perlu merancang strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengalami secara langsung nilai-nilai karakter melalui aktivitas olahraga. Misalnya melalui permainan kooperatif, refleksi setelah pertandingan, serta diskusi mengenai nilai-nilai yang muncul dalam aktivitas olahraga. Dengan pendekatan tersebut, proses pembelajaran olahraga tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai kebangsaan.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan menjadi sarana strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.

Pendidikan olahraga memiliki potensi besar sebagai media pembentukan karakter karena melibatkan pengalaman langsung yang mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional. Melalui aktivitas olahraga, nilai-nilai seperti sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dapat dikembangkan secara efektif.

Implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan olahraga dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar kontekstual. Dengan dukungan guru sebagai fasilitator dan teladan, pendidikan olahraga dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai Pancasila.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan olahraga merupakan langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter dan membangun generasi bangsa yang berintegritas, berakhlak, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Daftar Pustaka

- Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. *Journal of School Health*, 76(8), 397–401.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbud. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latif, Y. (2018). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lumpkin, A. (2014). *Introduction to Physical Education, Exercise Science, and Sport Studies*. New York: McGraw-Hill.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Motif Batik Kabupaten Subulussalam

Dr. Rida Safuan Selian, S.Pd., M.Pd²³
Universitas Syiah Kuala

“Motif batik daerah Subulussalam memiliki ciri khas tersendiri dengan menggunakan motif non-geometris flora dan fauna yang terdapat pada alam sekitar nya”.

Membatik adalah suatu kegiatan yang tersebar di seluruh Indonesia dan sangat erat kaitannya dengan lingkungan alam dan kehidupan sosial serta budaya masyarakat setempat. Kondisi alam dan sosial budaya di setiap daerah merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengembangan kegiatan membatik di daerah tersebut. Pada tanggal 28 September 2009 Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa *United National Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan nonbendawi atau *Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*, sejak itu pada tanggal 2 oktober di

²³ Penulis lahir di Langsa, 07 Oktober 1976, Penulis merupakan Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Program Studi Pendidikan Sendratasik, Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan di FBS Universitas Negeri Yogyakarta (2000), Gelar Magister Pendidikan Seni di selesaikan di Universitas Negeri Semarang (2007), dan gelar Doktor (Ph.D) Pendidikan Seni di selesaikan di University Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia Program Studi Pendidikan Seni Visual (2015).

tetapkan sebagai hari batik nasional.

Subulussalam adalah suatu daerah yang terletak di Provinsi Aceh dan merupakan sebuah kota yang terbentuk dari pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Nama Subulussalam sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti jalan menuju kedamaian dan kesejahteraan. Subulussalam merupakan daerah yang memiliki sumberdaya alam yang beranekaragam.

Pembuatan batik pada daerah Subulussalam di mulai pasca bencana tsunami dengan metode yang tidak berbeda jauh dari pembuatan batik lainnya, pada saat ini batik daerah Subulussalam hanya memproduksi batik tulis kain panjang. Pembuatan batik Subulussalam berada di bawah naungan Yayasan Rumah Subulussalam belum memiliki cendramata yang bisa mewakili identitas dan ciri khas dari daerah tersebut. Program pembinaan batik ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan oleh-oleh khas dari daerah Subulussalam saja, namun memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat. Yayasan Rumah Kita telah membentuk beberapa desa binaan pembuatan batik, yaitu desa binaan Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Program tersebut diresmikan pada tanggal 1 Februari 2020, namun program binaan pada desa Mukti Makmur tidak bertahan lama. Sempat vakum selama 1 tahun program pembinaan batik kembali diaktifkan namun program tersebut di pindahkan pada desa binaan yang baru yaitu desa Penuntungan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang di resmikan pada tanggal 12 November 2022.

Motif batik daerah Subulussalam memiliki ciri khas tersendiri dengan menggunakan motif *non-geometris flora* dan *fauna* yang terdapat pada alam sekitar nya. Pemilihan motif *flora* lebih cenderung menggambarkan sumberdaya alam yang terdapat pada daerah tersebut. Penggunaan motif *flora* lebih terfokus menceritakan tentang mata pencarian masyarakat Subulussalam. Daerah Subulussalam terdiri dari 5 kecamatan, setiap kecamatan memiliki sumber mata pencarian yang berda-

beda. Penerapan motif *flora* dalam pembuatan batik bertujuan untuk memperkenalkan ragam sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah Subulussalam. Tidak hanya menggunakan motif *non-geometris flora* dan *fauna* saja batik daerah Subulussalam dikombinasikan dengan motif *geometris* sehingga memberikan kesan yang lebih beragam. Motif batik pada daerah Subulussalam di susun dengan secara simetris, sehingga menciptakan tampilan yang teratur dan proporsional hal ini memberikan kesan yang estetik dan harmonis pada kain batik. Salah satu ciri khas yang paling menonjol pada motif batik daerah Subulussalam ialah dengan pemilihan warna sebagai kombinasi pada motif batik, pada batik Subulussalam lebih cenderung menggunakan warna yang kontras dengan warna asli objek yang digambarkan. warna khas daerah Subulussalam memiliki makna simbolis yang terdiri dari lima warna yaitu: hitam (dukun), hijau (saudagar), putih (ulama), merah (panglima), dan kuning (raja). Pembuatan batik pada daerah Subulussalam tidak jauh dengan penggunaan warna khas daerah Subulussalam sebagai warna pada motif batik, selain menggunakan warna khas daerah tersebut batik pada daerah Subulussalam lebih cenderung menggunakan warna hitam sebagai warna *background*, pemilihan warna hitam bertujuan agar warna pada motif batik lebih menonjol dan hidup.

Kain batik pada daerah Subulussalam memiliki 3 ciri khas yang unik yaitu dari pemilihan objek yang diaplikasikan sebagai motif pada kain batik kemudian cara penyusunan motif pada kain dan pemilihan warna. Motif batik pada daerah Subulussalam menggunakan objek sumberdaya alam yang terdapat pada daerah Subulussalam sebagai motif pada kain batik. tidak hanya penggunaan objek sumberdaya saja pada batik Subulussalam menggunakan salah satu ikon khas pada daerah Subulussalam yang diaplikasikan pada kain batik. Batik pada daerah Subulussalam memiliki 3 susunan yaitu penyusunan *diagonal*, *horizontal*, dan penyusunan penuh. Untuk pewarnaan pada batik lebih mengikuti dengan warna asli seperti warna objek yang digambarkan, seperti contoh berikut ini:

		
Gambar 1. Motif buah salak.	Gambar 2. Motif buah salak yang dikupas	Gambar 3. Motif buah pinang dan daun sirih
		
Gambar 4. Motif daun sawit	Gambar 5. Motif bunga kenanga	Gambar 6. Motif burung rangkong
		
Gambar 7. Motif durian		Gambar 8. Motif tugu Subulussalam

Pada motif buah salak yang masih berkulit menggunakan warna coklat yang dikombinasikan dengan warna putih untuk memberi kesan seperti sisik pada kulit buah salak. Pada motif buah salak sudah dikupas hanya menggunakan 1 warna saja yaitu warna coklat sebagai warna pada biji buah salak, untuk warna pada daging buah salak tidak diberi warna apa pun. Pada motif buah pinang dan daun siri memiliki 2 pewarnaan yaitu hijau sebagai warna pada daun sirih dan warna daun kulit atas buah pinang yang dikombinasikan dengan warna oranye kemerahan sebagai warna pada buah pinang. Warna oranye kemerahan merupakan warna buah pinang yang sudah matang. Pada motif daun sawit dikombinasikan dengan menggunakan 3

warna yaitu hijau sebagai warna daun sawit yang diberi aksent warna putih sebagai garis pemisah pada daun dan coklat sebagai warna pada batang tangkai pada daun sawit. Pada motif bunga kenanga lebih menggunakan warna kuning, walaupun warna asli dari bunga kenangan lebih kepada warna kuning pucat namun warna yang di gunakan pada pengaplikasian lebih menggunakan warna kuning cerah agar tidak terlihat pucat. Pada motif burung rangkong memiliki 3 warna pada 1 motif yaitu warna oranye sebagai warna pada kaki dan paruh burung rangkong yang dikombinasikan warna hitam sebagai warna ujung pada paruh burung. Penggunaan warna hitam dan putih sebagai warna bulu pada badan burung, dan warna hitam yang dikombinasikan dengan garis putih sebagai warna sayap pada burung rangkong pemberian warna putih pada sayap burung rangkong sebagai mempertegas garis pada bulu burung rangkong.

Pada motif buah durian memiliki 3 warna yaitu warna hijau sebagai warna kulit pada buah durian yang dikombinasikan dengan warna putih sebagai mempertegas warna garis gambar duri pada kulit buah durian. Kemudian ada warna kuning sebagai warna buah durian yang dikombinasikan dengan warna putih sebagai warna dari daging kulit bagian dalam. Warna pada batik tugu subulussalam menggunakan yang mengikuti warna aslinya yaitu menggunakan warna hijau yang dikombinasikan dengan warna kuning. Didalam pembuatan batik Subulussalam lebih cenderung menggunakan warna hitam sebagai warna pada background kain batik. proses pembuatan batik pada daerah Subulussalam sama halnya dengan pembuatan batik pada daerah lainnya. Untuk produk yang telah berhasil diproduksi hanyalah berupa kain panjang saja.

Motif batik tulis daerah Subulussalam menggunakan penggabungan antara 2 jenis motif batik yaitu motif *geometris* dan *non-geometris*. Motif *non-geometris* sendiri terbagai menjadi 2 bagian yaitu motif *organic* dan motif *non-organic*. Motif *organic* merupakan motif batik yang menggambarkan suatu objek yang dapat terurai seperti tanaman, hewan dan

manusia sedangkan motif *non-organic* merupakan motif yang menggambarkan suatu objek yang tidak dapat terurai seperti objek alam sekitar.

Pemilihan objek motif yang diaplikasikan pada kain lebih cenderung menggunakan motif *flora*, pemilihan motif *flora* sendiri sebagai objek pada kain batik merupakan sebagai karakteristik paling menonjol yang dimiliki oleh daerah Subulussalam. Pemilihan motif *flora* memiliki arti sebagai sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah Subulussalam dan dijadikan sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat daerah Subulussalam. Selain menggunakan objek *flora* sebagai motif pada kain batik pada batik subulussalam juga menggunakan objek *fauna* dan objek *geometris* sebagai motif pada kain. Objek *fauna* yang diaplikasikan pada kain batik merupakan salah satu hewan khas yang terdapat pada daerah Subulussalam yaitu burung rangkong, sedangkan objek *geometris* yang digunakan sebagai motif pada kain batik merupakan salah satu ikon tugu yang menjadi monument yang berada di pusat kota yaitu monument tugu Subulussalam.

Daftar Pustaka

- Ernawati. (2019). Kajian Estetika Seni Batik Kontemporer Melalui Karya Kolaborasi Seniman Agus Ismoyo-Nia Fliam. *Studi Budaya Nusantara*, 3(1), 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2019.003.01.05>
- Eskak, E., & Salma, I. R. (2015). *Pengembangan Motif Batik Khas Aceh Gayo Development Batik Motif Aceh Gayo*. 12–21.
- Falah, F. (2018). Estetika Batik Tulis Motif “Bintang Laut” Pekalongan, Jawa Tengah (Kajian Estetika). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 13(1), 16.
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mifzal, Abiyu. (2012). Mengenal Ragam Batik Nusantara. Jogja: avalitera.

Naimah, L. (2013). *ANALISIS BATIK “JOGYA ISTIMEWA” KARYA IRAWAN HADI*.

Nursapiah. (2020). Penelitian kualitatif. *Nucl. Phys.*, 13(1), 1–199.

Prasetyo, S. A. (2016). Karakteristik Motif Batik Kendal Interpretasi dari Wilayah dan Letak Geografis. *Jurnall Imajinasi*, 10(1), 51–60.

Sharfina, G., Studi, P., Tata, P., Ilmu, J., Keluarga, K., Teknik, F., & Jakarta, U. N. (2016).

Kajian Motif Batik Tulis Garutan.

Utami, Rizki. (2014). *Ensiklopedia Batik dan Kain Hias Nusantara*. Bandung: CV Angkasa

Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar

Carolina Fransiska, S.Pd., M.Pd²⁴
Universitas Palangka Raya

“Pembentukan karakter anak membutuhkan pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. pendidikan moral merupakan tujuan utama dari kecerdasan emosional anak, yang harus menjadi tanggung jawab orangtua, guru dan masyarakat”.

Pendidikan Karakter dimulai dari dalam keluarga

Pengasuhan sehari-hari merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan karakter seseorang, karena walaupun setiap orang dilahirkan dengan potensi kebajikan atau nilai-nilai, anak harus memahami lingkungan dan pendidikan. Segala perilaku dan pola asuh orangtua dalam keluarga pasti berdampak pada pembentukan kepribadian atau karakter anak.

²⁴ Carolina Fransiska, S.Pd., M.Pd., M.Pd.K lahir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada 13 Februari 1985. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya (UNPAR) tahun 2007, menyelesaikan studi Magister Pendidikan di Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang pada tahun 2013, juga menamatkan studi Magister Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Theologi INALTA Jakarta Selatan pada tahun 2015. Penulis aktif mengajar sejak tahun 2013 sampai saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Palangka Raya.

Banyak hal yang harus dilakukan orangtua dalam membentuk karakter anak-anaknya:

Pertama, melaksanakan pengasuhan anak dalam pendidikan karakter bagi anak-anak dalam keluarga. Keberhasilan suatu keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moral (budi pekerti) pada anak-anaknya sangat bergantung pada cara orang tua membesarkan anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai mode interaksi antara anak dan orang tua, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik (seperti pola makan, minum, dll.) dan kebutuhan psikologis (seperti keamanan, perasaan, dll.), serta prevalensi anak. Dengan kata lain, pola asuh juga memasukkan modus interaksi orang tua anak dalam konteks pendidikan karakter anak. Oleh karena itu, baik otoriter, demokratis, maupun toleran, peran orangtua dalam membina karakter anak sangat penting.

Kedua, keterikatan psikologis antara ibu dan anak. Ibu perlu membina dan memperkuat keintiman psikologis anak, hal ini dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana, seperti menanyakan keadaannya di sekolah, menanyakan pekerjaan rumahnya, dan menanyakan kesulitannya di sekolah. Untuk membangun rasa percaya diri pada anak, keterikatan psikologis semacam ini sangat penting dilakukan, agar anak lebih terbuka, memiliki rasa peduli, dan memiliki rasa aman.

Ketiga, menanamkan pengetahuan dasar pendidikan akhlak. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah pada orangtuanya. Sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini untuk menghasilkan generasi muda yang lebih baik. Selain itu, orang tua juga harus memberi contoh yang baik dan menjadi teladan bagi anaknya, karena pada dasarnya anak-anak akan meniru apa yang hadir dalam kehidupannya sehari-hari.

Pendidikan karakter di sekolah

Di sekolah penerapan pendidikan karakter perlu didasarkan dengan prinsip-prinsip yang bernilai. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pendidikan

karakter di sekolah meliputi ;

- a. Nilai-nilai yang menjadi dasar etika peserta didik perlu disosialisasi
- b. Identifikasi karakter secara menyeluruh (pemikiran, perasaan dan perilaku),
- c. Melakukan pendekatan yang efektif untuk membangun karakter, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian
- d. Menghargai semua peserta didik dan membantu mereka untuk sukses
- e. Menumbuhkan motivasi
- f. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama.
- g. Pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter
- h. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra
- i. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan
- j. Manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik.

Peran Lingkungan Masyarakat, Peran Olah Raga, Peran Institusi

1. Peran Masyarakat

Lingkungan yang tidak kalah pentingnya dalam membentuk kepribadian anak didik adalah lingkungan masyarakat. Menurut Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dalam batas-batas tertentu.

Masyarakat dalam hal ini berfungsi sebagai tempat anak didik bergaul dan bersosialisasi. Dalam setiap masyarakat, pewarisan budaya terjadi melalui proses sosialisasi. Individu sebagai anggota masyarakat mendapat pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan tempat anak didik sebagai individu yang mendapat proses pendidikan melalui pergaulan, maupun norma-norma yang berlaku dalam sistem masyarakat itu sendiri. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat :

- a. Membiasakan gotong royong, misalnya : membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami pekarangan rumah.
- b. Membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan , merusak atau mencoret- coret fasilitas umum
- d. Menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik.

Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Tidak ada kepedulian
- b. Tidak merasa bertanggung jawab
- c. Menganggap perbuatan anak adalah hal yang sudah biasa (sebagai contoh,sering kita mendengar kalimat pemakluman : “namanya juga anak-anak”)

Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam pendidikan memang erat sekali dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini tentu saja bukan hal mudah untuk dilakukan. Namun apabila tidak dimulai dari sekarang, kapan rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.

2 Peran Olahraga

Pembentukan karakter selain dilandasi oleh budaya nasional juga diwarnai oleh budaya dan ciri khusus cabang olahraga yang dilakukan. Oleh karena itu untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia maka salah satu cara adalah membangun kebesaran Indonesia kembali: bangunlah olahraganya. Melalui olahraga, seseorang akan memiliki tanggungjawab, rasa hormat dan memiliki kepedulian dengan sesama. Nilai-nilai ketekunan, kejujuran dan keberanian juga dapat diperoleh dari aktivitas olahraga dan tentu masih banyak lainnya.

3 Peran Institusi

Karakter merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang, karena karakter merupakan salah satu penentu kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, perlu dibentuk peran yang kuat dan aktif dengan baik. Pendidikan tidak hanya cukup untuk menjadikan anak cerdas, tetapi juga untuk menciptakan nilai atau karakter yang luhur. Keberhasilan seseorang tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain (soft skill).

Oleh karena itu, pembentukan karakter anak membutuhkan pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan moral merupakan tujuan utama dari kecerdasan emosional anak, yang harus menjadi tanggung jawab orangtua, guru dan masyarakat. Jika moralitas tumbuh dan berkembang dalam diri individu anak karena pendidikan keluarga, saya berharap dapat mengembangkan pendidikan sekolah melalui disiplin ilmu terkait, bahkan berharap dapat mengajarkan semua disiplin ilmu dengan memadukan nilai-nilai emosional dan moral, sehingga selain memiliki kecerdasan, anak juga matang dalam kecerdasan emosional.

Daftar Pustaka

- Zuhriah, Nurul. 2008. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Aan Komariah dan Cipi Triatna. 2010. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Darmiyati Zuchdi. 2011. *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*. 2012. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Fitri, Agus Zaenul. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Karno, Edy. 2016. *Membangun Karakter dan Jati Diri Bangsa Melalui Pendidikan*. Kendari Komunika.

Paradigma UoS dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Kecerdasan Buatan

Inayah, M.Pd.²⁵

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

“Learning Analytics, AI in education, UoS, OBE, AI, Alat Pedagogis, Natural Language Processing (NLP), Riset Implementatif, Pembelajaran Bahasa Arab”

Kecerdasan buatan (AI), termasuk pembelajaran mesin, *Natural Language Processing* (NLP), pembangkitan teks (LLMs), dan *learning analytics*, menawarkan fitur yang relevan untuk pembelajaran bahasa, berupa personalisasi, umpan balik otomatis, analisis pola performa pembelajar, dan platform kolaboratif. Literatur internasional tentang *learning analytics* dan *AI in education* menegaskan bahwa data-driven approaches dapat meningkatkan monitoring pembelajaran, prediksi risiko, dan personalisasi intervensi pedagogis (Chu & Ashraf, 2025; Oyedotun et al., 2025; Sajja et al., 2025). Namun, integrasi AI juga membawa risiko terjadinya bias algoritmik, pengaburan otoritas pedagogis, dan kemungkinan menggeser nilai-nilai lokal jika tidak diadaptasi secara kritis. Dalam konteks bahasa Arab, tantangan teknis juga nyata, misalnya NLP berbahasa Arab masih menghadapi isu morfologi dan variasi dialektal yang

²⁵ Penulis lahir di Pati, 23 Desember 1985, Dosen Rumpun Keilmuan Pembelajaran Bahasa Arab pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saat ini sedang menempuh S3 Pendidikan Bahasa Arab pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang & Awardee BIB LPDP Kemenag RI tahun 2023.

kompleks sehingga output AI harus divalidasi secara keilmuan.

Dari perspektif UoS, dua pertimbangan utama muncul. Pertama, AI dapat berfungsi sebagai *instrumentum* yang memperluas kapabilitas pedagogis (Aggarwal, 2023; Liu et al., 2025; Zaman & Akhter, 2023), misalnya simulasi berbicara, analisis tulisan, tutoring adaptif, selama dirancang untuk menguatkan tujuan wahyu berbasis keilmuan (seperti adab ilmiah dan integritas intelektual). Kedua, AI tidak boleh menggantikan proses hermeneutika dan bimbingan moral-teologis yang hanya dapat diberikan melalui relasi guru-siswa (dosen-mahasiswa) dan kultur keilmuan (Airaj, 2024; Karakus et al., 2025; Lee, 2023). Oleh karena itu, pendekatan integratif yang mengkombinasikan kekuatan AI dengan penguatan nilai UoS harus menjadi pijakan implementasi.

Implementasi model UoS-OBE-AI memerlukan transformasi di beberapa level. Secara pedagogis, dosen perlu dilatih pada (a) desain *outcomes* yang memasukkan dimensi nilai wahyu; (b) pembuatan rubrik asesmen yang menangkap dimensi nilai; dan (c) pemanfaatan data AI untuk intervensi formatif. Secara kurikuler, silabus harus menampilkan *integrative tasks* yang menggabungkan analisis teks keagamaan dan aplikasi ilmiah modern. Secara kebijakan institusional, diperlukan pedoman etika penggunaan AI, infrastruktur data yang aman, dan unit pengembangan profesional. Etika dan akuntabilitas merupakan aspek krusial, dimana algoritma AI harus transparan (*explainable*), data mahasiswa dilindungi (*privacy*), dan keputusan akademik yang diambil atas dasar data harus melibatkan pertimbangan manusia. Selain itu, validasi linguistik output AI (seperti koreksi tata bahasa Arab otomatis) wajib dilakukan oleh pakar bahasa Arab untuk menghindari kesalahan morfologis atau interpretasi konteks budaya. Gambar 1. Mendeskripsikan keterlibatan AI dan *learning analytics* sebagai alat pedagogis dalam pembelajaran bahasa Arab dengan konteks kurikulum OBE yang diimplementasikan, dan paradigma UoS sebagai nafas pembelajaran di lingkungan UIN Walisongo Semarang.



Gambar 1. UoS-OBE-AI dalam Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Walisongo

Contoh pengimplementasian UoS dalam OBE dengan melibatkan AI pada pembelajaran bahasa Arab dan komponen indikator penilaiannya, dituangkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan: Learning Outcomes (UoS-OBE), Peran AI & Indikator Penilaian

No	Learning Outcome (UoS-OBE)	Peran AI (Aplikasi)	Indikator Penilaian (Rubrik)
1	Kefasihan dialog akademik + adab ilmiah	Simulasi dialog berbasis NLP; tutor adaptif	Kelancaran, relevansi argument, kepatuhan etika referensi
2	Penulisan argumentative (ilmiah) berbahasa arab	Automated writing evaluation + feedback revisi	Koherensi, kohesi, akurasi morfologi, ketepatan sumber
3	Pemahaman teks klasik & kontemporer	Adaptive reading pathways + comprehension analytics	Ketepatan interpretasi, kemampuan inferensi, refleksi nilai

4	Integrasi ilmu dan nilai wahyu dalam karya ilmiah	Recommender system sumber + peer review analytics	Keterkaitan konsep, landasan rujukan wahyu, originalitas
---	---	---	--

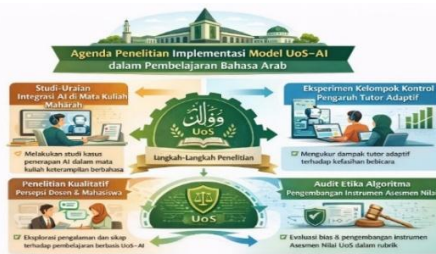
Tabel 1 menyajikan pemetaan konseptual antara *Learning Outcomes* berbasis Unity of Sciences (UoS) dan Outcome-Based Education (OBE), peran kecerdasan buatan (AI) sebagai alat pedagogis, serta indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran Bahasa Arab secara komprehensif. Pada *mahārah al-kalām*, misalnya, *learning outcomes* difokuskan pada kemampuan berdialog dan berargumentasi secara akademik dalam bahasa Arab dengan tetap menjunjung adab ilmiah. Peran AI direpresentasikan melalui penggunaan *tutor adaptif* dan simulasi percakapan berbasis *natural language processing* (NLP).

Indikator penilaian pada *mahārah al-kalām* tidak hanya mencakup aspek linguistik seperti kefasihan dan ketepatan struktur, tetapi juga mencakup dimensi etis dan epistemik, seperti kesesuaian argumen dengan konteks akademik dan penggunaan bahasa yang santun. Dalam kerangka UoS, pengembangan *mahārah al-kalām* diarahkan agar mahasiswa tidak sekadar mampu berbicara, tetapi mampu mengartikulasikan gagasan keilmuan yang mencerminkan integrasi antara nalar, bahasa, dan nilai.

Contoh lain adalah keterampilan menulis. *Mahārah al-kitābah* dalam tabel dipetakan pada *learning outcomes* berupa kemampuan menulis teks argumentatif dan akademik dalam bahasa Arab secara koheren dan bertanggung jawab secara ilmiah. AI berperan melalui *automated writing evaluation* (AWE), yang menyediakan umpan balik cepat terhadap struktur kalimat, kohesi wacana, dan akurasi morfologis. Indikator penilaian pada *mahārah* ini mencakup koherensi argumen, ketepatan penggunaan kosakata dan struktur, serta kejelasan tujuan komunikasi.

Dalam bingkai UoS, indikator tersebut diperluas dengan penilaian terhadap integritas akademik, seperti kejujuran dalam pengutipan dan kesesuaian isi dengan nilai-nilai keilmuan Islam. Pengembangan ke depan perlu menekankan bahwa AI hanya digunakan sebagai *scaffolding tool* untuk proses revisi dan refleksi, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran menulis tetap menjadi ruang internalisasi nilai, bukan sekadar optimalisasi skor linguistik.

Untuk menjadikan model ini bukan sekadar proposal normatif, diperlukan program riset implementatif. Semisal studi-uraian (*case study*) pengintegrasian AI di satu mata kuliah mahārah; eksperimen kelompok kontrol untuk mengukur dampak tutor adaptif terhadap kefasihan berbicara; penelitian kualitatif untuk mengeksplor persepsi dosen/mahasiswa terhadap pembelajaran yang 'dihayati' dalam bingkai UoS; serta audit etika algoritma. Selain itu, perlu pengembangan instrumen asesmen yang valid untuk mengukur dimensi nilai (adab ilmiah), yang selama ini kurang terwakili dalam rubrik standar. Simulasi penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek, yaitu paradigma UoS, OBE, dan AI, dibingkai pada Gambar 2.



Gambar 2. Agenda Penelitian Implementasi Model UoS-AI dalam Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Walisongo Semarang

Secara metodologis, mixed-methods direkomendasikan: analytics-driven quantitative measures (*learning analytics dashboards, pre-post tests*) dipadukan dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk menangkap dimensi nilai dan pengalaman pembelajar. Hasil riset akan memberi

bukti empiris bagi penyusunan pedoman nasional tentang integrasi UoS dan teknologi pada UIN Walisongo Semarang.

Daftar Pustaka

- Aggarwal, D. (2023). Integration of Innovative Technological Developments and AI With Education for An Adaptive Learning Pedagogy. *China Petroleum Processing and Petrochemical Technology*, 23(2), 709–714.
- Airaj, M. (2024). Ethical Artificial Intelligence for Teaching-Learning in Higher Education. *Education and Information Technologies*, 29(13), 17145–17167.
- Chu, T. S., & Ashraf, M. (2025). Artificial Intelligence in Curriculum Design: A Data-Driven Approach to Higher Education Innovation. *Knowledge*, 5(3), 14.
- Karakus, N., Gedik, K., & Kazazoğlu, S. (2025). Ethical Decision-Making in Education: A Comparative Study of Teachers and Artificial Intelligence in Ethical Dilemmas. *Behavioral Sciences*, 15(4:469), 1–27.
- Lee, S. (2023). Otherwise than Teaching by Artificial Intelligence. *Journal of Philosophy of Education*, 57(2), 553–570.
- Liu, V., Latif, E., & Zhai, X. (2025). Advancing Education through Tutoring Systems: A Systematic Literature Review. *Computers and Society*, 1–10.
- Oyedotun, S. A., Ejenarhome, O. P., & Oise, G. P. (2025). Learning Analytics and Predictive Modeling: Enhancing Student Success through Data-Driven Insights. *Journal of Science Research and Reviews*, 2(3), 42–51.
- Sajja, R., Sermet, Y., Cwiertny, D., & Demir, I. (2025). Integrating AI and Learning Analytics for Data-Driven Pedagogical Decisions and Personalized Interventions in Education. *Technology, Knowledge and Learning*, 9, 09897.

Zaman, M. A. U., & Akhter, E. (2023). Adaptive Learning Systems For English Literature Classrooms: A Review of AI-Integrated Education Platforms. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*, 4(3), 56–86.

Ekstrakurikuler Pramuka dan Penguatan Karakter di Era Global

*Isna Nurul Inayati, M.Pd.I.²⁶
Universitas Islam Raden Rahmat*

“Penguatan Karakter Melalui Ekstrakurikuler Pramuka Menjadi Upaya Penting Membentuk Generasi Muda yang Disiplin, Bertanggung Jawab, dan Berjiwa Nasionalis”.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Era global tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga oleh perubahan nilai dan pola perilaku generasi muda. Kemudahan akses terhadap berbagai informasi melalui internet dan media sosial memberikan peluang besar bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan secara luas.

Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai tantangan terhadap pembentukan karakter generasi muda. Fenomena seperti menurunnya sikap disiplin, meningkatnya perilaku individualistik, rendahnya kepedulian sosial, serta berbagai kasus kenakalan remaja menjadi indikator bahwa pendidikan karakter masih menghadapi tantangan yang serius dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik melalui berbagai pendekatan

²⁶Penulis lahir di Blitar, 13 April 1989, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang, menyelesaikan studi S1 di Jurusan PAI UIN Maliki Malang tahun 2011, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi PGMI UIN Maliki Malang tahun 2013, dan saat ini sedang proses menyelesaikan S3 Prodi PAI di UNISMA Malang.

pendidikan, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka.

Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan proses penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kebajikan yang bertujuan membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi individu yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya pendidikan karakter melalui berbagai kebijakan pendidikan, seperti penguatan pendidikan karakter (PPK) yang diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler di sekolah. Namun dalam praktiknya, implementasi pendidikan karakter seringkali masih berfokus pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, serta aktivitas yang menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab.

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki potensi besar dalam penguatan karakter peserta didik adalah ekstrakurikuler pramuka. Gerakan pramuka sejak lama dikenal sebagai wadah pendidikan nonformal yang menekankan pembentukan karakter, keterampilan hidup, serta nilai-nilai kebangsaan. Melalui berbagai kegiatan seperti latihan rutin, permainan edukatif, kegiatan perkemahan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, pramuka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap disiplin, kemandirian, kepemimpinan, serta kerja sama. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan karakter yang kuat karena menuntut peserta didik untuk belajar bertanggung jawab, menghargai orang lain, serta beradaptasi dengan berbagai situasi.

Kepramukaan juga berperan dalam penguatan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Program kepramukaan di sekolah dasar, misalnya, dirancang untuk menanamkan pendidikan karakter melalui pengenalan sejarah pramuka, nilai-nilai dasar gerakan pramuka, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat edukatif dan menyenangkan (Prasetya et al., 2023). Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta semangat kebersamaan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Selain itu, kegiatan pramuka juga menekankan pembelajaran berbasis pengalaman (*learning by doing*), yang memungkinkan peserta didik memahami nilai-nilai karakter secara lebih mendalam melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selain di tingkat sekolah dasar dan menengah, pendidikan kepramukaan juga berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Program kepramukaan di universitas tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial dan kepemimpinan, tetapi juga pada pengembangan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan profesional. Pendidikan kepramukaan di perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan *soft skills* dan *hard skills* yang penting bagi mahasiswa, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah (Hidayah et al., 2023). Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam kegiatan kepramukaan di tingkat perguruan tinggi adalah penguatan jiwa kepemimpinan atau *leadership*. Melalui berbagai kegiatan organisasi dan pelatihan kepemimpinan, mahasiswa didorong untuk menjadi individu yang mampu memimpin, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

Lebih lanjut, pendidikan kepramukaan juga mencakup pengembangan aspek spiritual dan keagamaan sebagai bagian dari pembentukan karakter yang utuh. Sistem pendidikan kepramukaan menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

Berbagai kegiatan seperti renungan malam, kegiatan sosial, serta pembinaan nilai-nilai moral menjadi bagian penting dalam proses pendidikan kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan berfokus pada pembentukan kepribadian, keterampilan hidup, serta karakter mulia melalui berbagai kursus, pelatihan, dan orientasi yang dirancang secara sistematis (Mr, 2022). Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya dilatih untuk memiliki keterampilan praktis, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan sikap spiritual dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks pendidikan nasional, nilai-nilai yang dikembangkan dalam kegiatan pramuka juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendidikan kepramukaan mendorong peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, serta rasa cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Melalui kegiatan pramuka, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang beragam, sekaligus menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa (Munir et al., 2022).

Selain berkontribusi terhadap penguatan karakter, keikutsertaan dalam kegiatan pramuka juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan akademik peserta didik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka cenderung memiliki kemampuan manajemen waktu yang lebih baik, tingkat disiplin yang lebih tinggi, serta kemampuan bekerja sama yang lebih kuat dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Keterlibatan dalam kegiatan pramuka juga dapat meningkatkan kemampuan resolusi konflik dan keterampilan berpikir kritis karena peserta didik sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kerja sama dan pemecahan masalah

secara kolektif. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan pramuka dapat meningkatkan hasil akademik serta keterampilan resolusi konflik peserta didik, meskipun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam aspek harga diri dan beberapa keterampilan sosial lainnya (Asensio-Ramón et al., 2020).

Melihat berbagai manfaat tersebut, kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya penguatan pendidikan karakter di Indonesia, terutama di tengah berbagai tantangan yang muncul pada era global. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kegiatan pramuka sebagai bagian dari strategi pendidikan karakter. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, pembina pramuka, orang tua, serta pemerintah, sangat diperlukan agar kegiatan pramuka dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, ekstrakurikuler pramuka tidak hanya menjadi kegiatan tambahan di sekolah, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

Daftar Pustaka

- Asensio-Ramón, N., et al. (2020). The influence of scouting participation on academic achievement and conflict resolution skills among adolescents. *Journal of Youth Development*, 15(4), 85–98.
- Hidayah, N., Suryadi, A., & Rahman, F. (2023). The role of scouting education in developing leadership and soft skills among university students. *International Journal of Educational Development*, 12(2), 134–145.
- Munir, M., Rahmawati, L., & Sari, D. (2022). Character education based on Pancasila values through scouting activities in schools. *Journal of Civic Education Studies*, 7(1), 45–56.

Mr, A. (2022). Scouting education system in character and life skills development. *Journal of Educational Practice*, 13(5), 112–120.

Prasetia, R., Nugroho, A., & Wulandari, S. (2023). Implementation of scouting extracurricular activities in strengthening character education in elementary schools. *Journal of Primary Education Research*, 11(1), 22–31.

Ketika Kebersihan Menjadi Ibadah: Gerakan Labas Sebagai Budaya Sekolah Berkarakter

*Sudin Sanjaya, S.Pd.²⁷
Universitas Paramadina-Jakarta*

“Gerakan LABAS di SDN Cakung Timur 01 membangun budaya sekolah berkarakter melalui pembiasaan kebersihan sebagai wujud iman dan tanggung jawab sosial.”

Kebersihan kerap dipahami sebatas urusan teknis—menyapu lantai, membuang sampah, dan merapikan ruang kelas. Pandangan ini menjadikan kebersihan sekadar aktivitas fisik yang dilakukan karena aturan atau pengawasan. Padahal, dalam perspektif pendidikan nilai, kebersihan merupakan bagian dari pembentukan kesadaran moral dan spiritual peserta didik. Kebersihan tidak hanya menyentuh aspek fisik lingkungan, tetapi juga mencerminkan kualitas sikap, tanggung jawab, dan kepekaan sosial seseorang (Lickona, 2013; Kemendikbud, 2020). Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian dan kebersihan diri serta lingkungannya. Pesan ini menunjukkan

²⁷ Penulis lahir di Bekasi ,05 September 1979, Saat ini berprofesi sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di SDN Cakung Timur 01. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabour 2012, Sekarang sedang melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Paramadina Jakarta Timur. Penulis berdomisili Di KP.Gempol RT.002/001 Kel.Cakung Timur Kec.Cakung Jaktim.

bahwa kebersihan bukan sekadar tuntutan sosial, melainkan ekspresi iman yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dipahami sebagai bentuk pengamalan nilai keimanan dalam konteks kehidupan nyata (QS. Al-Baqarah: 222).

Sekolah dasar menjadi ruang yang sangat strategis dalam penanaman nilai tersebut. Pada fase ini, anak berada dalam tahap pembentukan kebiasaan dan karakter dasar yang cenderung menetap hingga dewasa. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam suasana yang bermakna akan membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku anak secara berkelanjutan (Hurlock, 2011; Lickona, 2013). Karena itu, pendidikan kebersihan tidak cukup diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi harus dihidupkan sebagai budaya.

Penguatan nilai kebersihan sebagai iman juga diperjelas dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Pesan profetik ini mengandung makna edukatif yang kuat: iman tidak hanya berada di hati dan lisan, tetapi harus tampak dalam tindakan konkret. Ketika anak dibiasakan menjaga kebersihan, sesungguhnya ia sedang belajar mengamalkan iman dalam bentuk yang sederhana dan membumi (HR. Muslim).

Ketika kebersihan ditempatkan sebagai nilai iman, tindakan kecil memperoleh makna besar. Anak tidak sekadar patuh pada aturan sekolah, melainkan belajar bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya, peduli terhadap kenyamanan bersama, serta berempati kepada orang lain. Sekolah pun bertransformasi menjadi ruang pembiasaan nilai—tempat iman diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari yang sederhana namun konsisten, seperti memungut sampah dan menjaga kebersihan tanpa harus diperintah (Kemendikbud, 2020; Nata, 2014).

Sampah dan Tantangan Budaya Bersih di Sekolah

Realitas pengelolaan sampah di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Tempat sampah umumnya

telah tersedia dan aturan kebersihan tertulis terpampang di berbagai sudut sekolah, namun perilaku peserta didik sering kali belum konsisten. Sampah masih ditemukan berserakan, terutama setelah jam istirahat atau kegiatan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan regulasi saja belum cukup untuk membentuk perilaku peduli lingkungan yang berkelanjutan (Kemendikbud, 2020; UNESCO, 2017).

Pendekatan kebersihan yang menekankan larangan dan sanksi cenderung menghasilkan kepatuhan semu. Anak berperilaku bersih ketika diawasi, tetapi abai saat pengawasan berkurang. Pola ini tidak melahirkan kesadaran, melainkan ketergantungan pada kontrol eksternal. Dalam perspektif pendidikan karakter, perilaku yang bernilai justru lahir dari kesadaran internal, bukan dari rasa takut terhadap hukuman (Lickona, 2013). Tantangan tersebut menuntut perubahan pendekatan dari sekadar pengendalian menuju pembudayaan. Pendidikan kebersihan perlu dibangun melalui keteladanan orang dewasa, pembiasaan yang konsisten, serta pemberian makna nilai yang dapat dipahami anak. Ketika kebersihan diposisikan sebagai nilai bersama, bukan kewajiban individual semata, maka perilaku peduli lingkungan akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan (Hurlock, 2011; Nata, 2014).

Dari kebutuhan inilah lahir sebuah gerakan sederhana namun bermakna: LABAS (Lihat–Ambil–Buang Sampah) di SDN Cakung Timur 01. Gerakan ini dirancang bukan sebagai aturan tambahan, melainkan sebagai budaya sekolah yang menanamkan kesadaran bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ia tempati. Melalui LABAS, kebersihan tidak lagi dipahami sebagai tugas petugas kebersihan atau kewajiban sesaat, tetapi sebagai cerminan karakter dan nilai iman yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari (Kemendikbud, 2020).

Mengenal Gerakan LABAS (Lihat–Ambil–Buang Sampah)

LABAS di SDN Cakung Timur 01 merupakan akronim dari *Lihat–Ambil–Buang Sampah*. Tiga kata kerja sederhana ini

dirancang sebagai pola perilaku yang mudah dipahami dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik. Kesederhanaan konsep LABAS justru menjadi kekuatannya, karena dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan sarana khusus atau instruksi berjenjang. Dalam perspektif pendidikan karakter, kebiasaan yang sederhana namun konsisten lebih efektif membentuk perilaku jangka panjang dibandingkan aturan yang kompleks (Lickona, 2013; Hurlock, 2011).

Filosofi LABAS menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan yang ia lihat. Sampah yang berada di hadapan mata tidak lagi dianggap sebagai urusan petugas kebersihan atau tanggung jawab orang lain, melainkan amanah bersama. Cara pandang ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah serta membangun kesadaran ekologis sejak dini. Pendidikan lingkungan yang berbasis pada tanggung jawab personal terbukti mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi peserta didik secara berkelanjutan (UNESCO, 2017; Kemendikbud, 2020).

Gerakan LABAS secara sadar menempatkan anak sebagai subjek pendidikan, bukan sekadar objek yang diatur. Ketika seorang anak melihat sampah, lalu mengambil dan membuangnya pada tempat yang semestinya—tanpa perintah, tanpa sanksi, dan tanpa pamrih—ia sedang menjalani proses pendidikan karakter yang autentik. Tindakan tersebut melatih kemandirian, kepekaan sosial, serta keberanian untuk berbuat benar meski tidak diawasi. Konsistensi dari tindakan sederhana inilah yang perlahan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjelma menjadi karakter yang menetap dalam diri peserta didik (Lickona, 2013; Nata, 2014).

LABAS sebagai Budaya Sekolah Berkarakter

Di SDN Cakung Timur 01, LABAS tidak berhenti sebagai slogan atau program sesaat yang bergantung pada momentum tertentu. Gerakan ini tumbuh menjadi budaya sekolah yang

hidup dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah. Pembiasaan dilakukan setiap hari, baik di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun dalam berbagai kegiatan bersama. Kebersihan tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban individual, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang dijaga bersama demi kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan sekolah (Kemendikbud, 2020; UNESCO, 2017).

Pembentukan budaya tersebut tidak terlepas dari peran keteladanan. Guru dan kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengingat atau pengawas, tetapi hadir sebagai teladan yang melakukan LABAS dalam keseharian. Ketika peserta didik menyaksikan orang dewasa di sekitarnya secara konsisten mempraktikkan nilai kebersihan, proses internalisasi nilai berlangsung secara alami. Anak mengikuti bukan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena memahami dan meneladani perilaku yang ia lihat (Bandura, 1986; Lickona, 2013).

Budaya LABAS pada akhirnya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih sekaligus membangun identitas bersama. Kebersihan menjadi sumber kebanggaan kolektif, bukan sekadar target penilaian atau tuntutan administratif. Dalam suasana seperti ini, nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Karakter tersebut tidak diajarkan secara terpisah, melainkan menyatu dengan denyut kehidupan sekolah sehari-hari, menjadikan LABAS sebagai bagian integral dari pendidikan karakter di SDN Cakung Timur 01 (Hurlock, 2011; Nata, 2014)., menjadikan LABAS sebagai bagian integral dari pendidikan karakter di SDN Cakung Timur 01 (Hurlock, 2011; Nata, 2014).

Kebersihan sebagai Ibadah: Integrasi Nilai Religius

Dalam gerakan LABAS, kebersihan dimaknai sebagai bagian dari pengamalan iman. Peserta didik diajak memahami bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar perilaku sosial, tetapi amal sederhana yang bernilai ibadah. Nilai ini ditanamkan melalui pembiasaan, bukan ceramah, sehingga anak belajar bahwa

kebaikan tetap bermakna meski dilakukan tanpa disaksikan orang lain.

Pendekatan tersebut menumbuhkan keikhlasan. Peserta didik melakukan kebersihan sebagai wujud ketaatan kepada Allah, sekaligus menyadari bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi tercermin dalam sikap sehari-hari.

Dampak Gerakan LABAS terhadap Karakter Peserta Didik

Gerakan LABAS berdampak nyata pada pembentukan karakter. Kepedulian lingkungan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan empati berkembang melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Anak terbiasa berinisiatif menjaga kebersihan sebagai tanggung jawab bersama.

Melalui LABAS, tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya menjadi sarana pembelajaran nilai iman dan kepedulian sosial. Sekolah pun tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas, tetapi juga membentuk manusia berkarakter, beradab, dan berkesadaran moral.

Menanamkan Nilai Keberlanjutan sebagai Upaya Pendidikan Karakter Lingkungan Siswa

Almira Rayyah Shadriah Fahru, S.Pd., M.Pd.²⁸
Universitas Muhammadiyah Luwuk

“Kerusakan Lingkungan Menjadi Isu Global Saat Ini, Sehingga Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Perlu Ditanamkan Sejak Dini Melalui Pembelajaran Di Sekolah.”

Isu keberlanjutan merupakan tantangan global yang menuntut keterlibatan seluruh pihak, termasuk institusi pendidikan, dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama. Isu keberlanjutan adalah permasalahan global yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Isu ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Implementasi isu keberlanjutan dilakukan melalui penerapan kebijakan dan tindakan nyata, seperti pengelolaan sumber daya alam secara bijak, pendidikan berkelanjutan, pengurangan limbah, penggunaan energi ramah lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dan institusi pendidikan dalam membangun kesadaran dan perilaku berkelanjutan.

Salah satu Upaya yang paling efektif dalam membangun tindakan nyata keberlanjutan yaitu melalui Pendidikan.

²⁸ Penulis lahir di Luwuk, 27 Juni 2000, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Luwuk, menyelesaikan studi S1 Pendidikan Biologi di Universitas Tadulako tahun 2021, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Pendidikan SAINS Universitas Tadulako tahun 2024.

Membangun masyarakat yang berkarakter peduli lingkungan dapat dilakukan secara efektif melalui penerapan pendidikan lingkungan di sekolah. Melalui sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dapat dibentuk sejak usia dini. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan perlu diajarkan kepada siswa agar tumbuh rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sejak awal.

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga sudah sepantasnya pembentukan karakter dimulai dari sekolah untuk mendukung nilai-nilai keberlanjutan.

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu memengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

Implementasi nilai keberlanjutan di sekolah, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, Siswa dibiasakan membersihkan kelas dan lingkungan sekolah melalui jadwal piket untuk menanamkan karakter tanggung jawab dan kepedulian. Selain itu, siswa juga perlu dilatih agar terampil dalam mengelola lingkungan, yang kemudian menjadi pembiasaan dalam kehidupan mereka, salah satunya yaitu sekolah menyediakan tempat sampah terpisah (organik dan anorganik) serta mengajarkan cara memilah dan mengolah sampah. Menanamkan nilai keberlanjutan salah satunya dapat

diterapkan pada pembelajaran IPA di sekolah, Guru dapat mengintegrasikan isu-isu keberlanjutan ke dalam materi pembelajaran, sekaligus memotivasi siswa agar tumbuh sebagai generasi yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta Masyarakat.

Pembelajaran IPA dapat dirancang agar lebih bermakna dan menyenangkan melalui berbagai model pembelajaran yang mampu melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis tersebut mendorong siswa untuk lebih memahami dan peduli terhadap lingkungan hidup. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan adalah Problem Based Learning (PBL). Dengan menggunakan model pembelajaran tersebut, Guru dapat menyajikan permasalahan nyata, misalnya banyaknya sampah plastik di lingkungan sekolah yang tidak terkelola dengan baik. Siswa diminta mengamati lingkungan sekolah dan mengidentifikasi jenis sampah, sumber sampah, serta dampaknya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya Siswa mencari informasi melalui diskusi, buku, atau internet tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan cara pengelolaan sampah berkelanjutan (*reduce, reuse, recycle*). Dan Siswa diminta merancang solusi, seperti program pemilahan sampah, penggunaan botol minum ulang, atau pembuatan *ecobrick*.

Melalui kegiatan-kegiatan nyata dan *student-centered learning* menjadi salah satu upaya strategis dalam membentuk fondasi nilai keberlanjutan sejak dini demi terwujudnya masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi orang tua dan masyarakat sekitar sekolah dalam mendukung pendidikan keberlanjutan juga perlu dilakukan. Karena kerja sama antara sekolah dan keluarga berperan penting dalam keberhasilan penanaman nilai. Tanpa keterlibatan lingkungan keluarga dan komunitas setempat, pembiasaan yang dilakukan di sekolah cenderung tidak berlanjut di rumah, sehingga hasil pendidikan keberlanjutan menjadi kurang maksimal.

Pengembangan dan penerapan program pendidikan keberlanjutan berbasis partisipatif juga sangat penting untuk dirancang secara komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini menggabungkan pembelajaran teoritis, praktik langsung, dan pembiasaan perilaku positif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah: siswa, guru, staf, bahkan orang tua. Tujuannya agar nilai-nilai keberlanjutan tidak hanya menjadi materi ajar, tetapi juga budaya sekolah (Widiyati dkk, 2025: 4151).

Penanaman karakter peduli lingkungan di sekolah dapat menjadi solusi komprehensif dalam penerapan nilai keberlanjutan karena sekolah merupakan lingkungan strategis untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku peserta didik sejak dini. Sekolah memungkinkan berpotensi membentuk karakter jangka panjang yang terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan Masyarakat, sekolah juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan kesadaran akan tanggung jawab individu dan kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penanaman karakter peduli lingkungan di sekolah menjadi pendekatan menyeluruh dalam mewujudkan nilai-nilai keberlanjutan.

Daftar Pustaka

Widiyati, Dian., lin, Rosini., dan Nofryanti. 2025. Mendidik untuk Keberlanjutan: Menanamkan Nilai-Nilai Keberlanjutan Sejak Usia Dini. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*. Vol 3 No 8, 4148-4156, e-ISSN: 2987- 0135.

Dekonstruksi Teleologi Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Modern

Muharrir, S.H., M.H.²⁹
Universitas Teuku Umar

“Tujuan hukum perkawinan melemah ketika negara mengesahkan hubungan tanpa menjaga kesetiaan, martabat pasangan, dan perlindungan keluarga”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menempatkan perkawinan tidak semata sebagai relasi privat antarindividu, melainkan sebagai **institusi moral publik** yang sarat nilai spiritual, sosial, dan etis. Namun, realitas masyarakat modern memperlihatkan adanya **pergeseran makna yang sangat tajam**. Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi indikator krisis ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2024 ada 394.608 kasus perceraian (BPS, 2025). Perceraian kerap diawali oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan kehadiran pihak ketiga di dalam hubungan suami-istri. Konflik tersebut tidak jarang berakhir bukan hanya pada putusnya perkawinan yang sudah lama dibangun, tetapi

²⁹ Penulis lahir di Meureudu 12 Januari 1989, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh tahun 2012 dan S2 Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USK Banda Aceh tahun 2018

juga pada terbentuknya hubungan menyimpang yang kemudian dilegitimasi melalui pernikahan baik secara formal maupun melalui nikah siri. Pola semacam ini semakin sering dipertontonkan di ruang publik belakangan ini, sehingga perlahan membentuk persepsi sosial bahwa hubungan menyimpang dapat dibangun dan disahkan dengan pernikahan meskipun tumbuh dari luka perkawinan sebelumnya. Pada titik ini, hukum tampak **menggeser dirinya dari penjaga nilai menjadi pencatat perubahan status**. Akibatnya, frasa “bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berisiko kehilangan daya normatifnya. Kondisi ini menunjukkan krisis teleologis hukum perkawinan, tujuan luhur yang tertulis tidak lagi sejalan dengan praktik yang dilegalkan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum perkawinan masih setia pada fungsinya sebagai penjaga kesetiaan, martabat, dan perlindungan keluarga, ataukah telah direduksi menjadi instrumen legalisasi kehendak semata?

Teleologi dalam Hukum Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teleologi adalah teori atau ajaran yang memandang bahwa setiap gejala terarah pada suatu tujuan tertentu. Dalam konteks hukum, teleologi tidak hanya menunjuk pada “apa tujuan norma”, tetapi juga pada fungsi moral dan arah nilai yang hendak dijaga oleh suatu sistem hukum. Jadi teleologi bersifat lebih mendalam daripada sekadar “tujuan”, karena ia memuat dimensi filosofis tentang mengapa hukum itu ada dan nilai apa yang harus diwujudkannya. Teleologi hukum perkawinan Indonesia termuat jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa ini memiliki makna normatif yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kekekalan yang dimaksud bukan kebahagiaan subjektif atau kekekalan pragmatis, melainkan kebahagiaan dan kekekalan yang ditautkan pada nilai moral dan ajaran ketuhanan. Dengan kata lain, hukum tidak memaknai bahagia dan kekal secara bebas

nilai, tetapi mengikatnya pada standar etika keagamaan.

Jika ditelusuri lebih jauh, kata “bahagia” dalam tujuan perkawinan tidak identik dengan ketiadaan konflik, karena kehidupan rumah tangga secara kodrati memuat dinamika hubungan yang tidak selalu berjalan harmonis, terdapat asam garam dan manis yang bercampur menjadi satu rasa dan tidak mudah dipisahkan. Sementara “kekal” tidak berarti meniadakan kemungkinan putusnya perkawinan, karena secara faktual perkawinan selalu mengandung potensi berakhir baik karena perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Negara menautkan tujuan perkawinan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa karena menyadari bahwa kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga akan sulit dicapai apabila dilepaskan dari fondasi agama. Oleh karena itu, nilai bahagia dan kekal secara teleologis hanya dapat diwujudkan apabila perkawinan dijalankan dalam kepatuhan pada ajaran agama yang menekankan kesetiaan, tanggung jawab, dan perlindungan martabat pasangan.

Hakikat Perkawinan Menurut Konsep Islam

Tujuan perkawinan yang menautkan pada nilai Ketuhanan tidak menyebut secara spesifik ajaran agama tertentu, namun dalam tulisan ini digunakan ajaran Islam sebagai representasi pandangan mayoritas di Indonesia. Perkawinan menurut konsep Islam tidak hanya merupakan hubungan sosial, tetapi juga ibadah dan amanah ilahi. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 menyebut perkawinan sebagai *mîtsâqan ghalîẓhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat dan sakral. Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam dapat ditemukan pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berdasarkan ayat tersebut merumuskan tujuan perkawinan melalui tiga konsep pokok: *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut Buya Hamka (Tafsir Al-Azhar Jilid 7). *Sakinah* adalah ketenangan, artinya hidup akan terasa gelisah apabila seseorang hanya seorang diri karena kesepian, terasing, dan tidak mempunyai teman, dengan adanya pasangan dari jenis sendiri menciptakan ketenangan batin. *Mawaddah* adalah dorongan cinta yang bersumber dari naluri dan tabiat alami manusia, terutama ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sehat secara fitrah.

Ia tampak dalam kerinduan dan ketertarikan fisik, berlanjut kepada hasrat untuk bersatu dan punya keinginan memberi serta menerima kepuasan dalam kehidupan suami istri. *Rahmah* adalah kasih sayang yang lebih dalam dan lebih luhur daripada sekadar cinta fisik. Ia tumbuh seiring perjalanan hidup, terutama ketika syahwat mulai melemah karena usia. *Rahmah* tampak dalam: Perhatian, kesetiaan, pengorbanan, kepedulian yang tulus, dan ikatan batin yang semakin kuat meskipun dorongan biologis menurun. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam tidak direduksi pada pemenuhan hasrat atau kesepakatan prosedural, tetapi diarahkan pada terwujudnya ketenangan, cinta yang bertanggung jawab, dan kasih sayang yang melindungi sebagai fondasi kehidupan keluarga.

Pergeseran Makna Teleologi dan Dampaknya

Teleologi hukum perkawinan nasional menempatkan perkawinan sebagai institusi moral yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan keberlanjutan rumah tangga berdasarkan nilai ketuhanan. Namun, dalam praktik sosial masyarakat modern, orientasi nilai tersebut mengalami pergeseran. Perkawinan semakin direduksi menjadi mekanisme prosedural untuk melegitimasi hubungan baru yang lahir dari konflik rumah tangga. Pergeseran ini semakin problematis jika dibaca dari segi konsep Islam, dimana perkawinan sebagai *mîtsâqan ghalîẓhan*, yakni akad yang sangat kuat dan sakral yang mengandung amanah ilahi dan tanggung jawab moral yang

berat. Namun, praktik yang berkembang justru memperlihatkan kecenderungan meremehkan kesakralan akad tersebut. Hubungan baru yang lahir dari proses yang melukai pasangan sah, meskipun memperoleh pengesahan prosedural, dipersepsikan seakan-akan setara dengan perkawinan yang dibangun melalui komitmen dan tanggung jawab.

Pergeseran makna teleologis ini berdampak langsung pada pasangan dan anak. Pasangan yang ditinggalkan sering mengalami luka batin, tekanan psikologis, dan perasaan kehilangan harga diri, sementara anak-anak berada dalam kondisi rentan karena keluarga yang terpecah, kehilangan figur teladan, serta terganggunya kondisi mental mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam jangka panjang, pergeseran ini berpotensi menormalisasi perkawinan yang lahir dari hubungan yang menyimpang dan menghilangkan makna tanggung jawab dalam pernikahan. Akibatnya, sebagian orang dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi perkawinan, memandang hidup sendiri sebagai pilihan yang lebih aman daripada hidup bersama namun saling melukai. Kondisi ini menandai krisis teleologis yang tidak hanya mengosongkan tujuan luhur hukum perkawinan, tetapi juga melemahkan fondasi moral keluarga dalam masyarakat.

Rekonstruksi Teleologis Hukum Perkawinan

Pendekatan dekonstruksi dalam tulisan ini menunjukkan bahwa krisis perkawinan modern bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada tergerusnya makna dan arah nilai hukum perkawinan sebagai institusi moral. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi teleologis untuk memulihkan fungsi hukum sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pencatat perubahan status perdata. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Perlunya pendidikan pranikah berbasis amanah dan nilai ketuhanan yang menuntut kesetiaan, komitmen, dan perlindungan martabat pasangan.

2. Penguatan mediasi sebelum perceraian diarahkan pada pemulihan hubungan dan perlindungan kepentingan anak, bukan sekadar formalitas prosedural.
3. Norma perdata direkonstruksi agar kerugian batin akibat pelanggaran amanah perkawinan memperoleh pemulihan hukum.
4. Kesetiaan diposisikan sebagai nilai publik yang dilindungi agar hukum kembali memiliki fungsi korektif terhadap relasi yang merusak martabat keluarga.
5. Pendalaman terhadap literasi publik tentang makna sakral dan tujuan agung perkawinan untuk membentuk keluarga bermartabat sebagai fondasi peradaban bangsa.

Dengan langkah-langkah tersebut, hukum perkawinan diharapkan kembali berfungsi sebagai penjaga nilai ketuhanan, martabat pasangan, dan perlindungan keluarga, sehingga tujuan “bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat diwujudkan secara nyata.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (2025), “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024”, <https://www.bps.go.id>

Hamka (2015), *Tafsir Al Azhar*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani.

SEMATA (Sedekah Minyak Jelantah): Inovasi Program Adiwiyata dalam Menumbuhkan Kepedulian Lingkungan dan Karakter Peduli Sosial di SDN Marunda 05

*Hidayat Edi Santoso, S.Pd. M.A.³⁰
SDN MARUNDA 05*

“Program SEMATA menanamkan kepedulian lingkungan dan karakter peduli sosial siswa melalui pengelolaan minyak jelantah berkelanjutan di SDN Marunda 05”.

Pendidikan lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik sejak jenjang sekolah dasar. Berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks, seperti pencemaran tanah dan air akibat limbah rumah tangga, menuntut adanya intervensi edukatif yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu jenis limbah rumah tangga yang sering luput dari perhatian adalah minyak jelantah. Padahal, pembuangan minyak jelantah secara sembarangan berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius serta mengganggu keseimbangan lingkungan.

³⁰ Penulis lahir di Tegal, 23 September 1976. Saat ini berprofesi sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di SDN Marunda 05. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi Jakarta, serta pendidikan S2 pada Program Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Paramadina Jakarta.

Program Adiwiyata hadir sebagai kebijakan nasional yang mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan budaya sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan. SDN Marunda 05, sebagai sekolah yang berkomitmen melaksanakan Program Adiwiyata, berupaya menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk program nyata yang kontekstual dan mudah dipahami oleh peserta didik. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Program SEMATA (Sedekah Minyak Jelantah), yang mengangkat isu pengelolaan limbah rumah tangga sebagai media pembelajaran lingkungan.

Program SEMATA dirancang sebagai kegiatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Melalui pendekatan yang sederhana namun bermakna, program ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dengan pendidikan karakter, khususnya dalam menumbuhkan nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep, pelaksanaan, serta dampak Program SEMATA dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Adiwiyata di SDN Marunda 05.

Konsep Program Adiwiyata dan Pendidikan Lingkungan

Program Adiwiyata bertujuan menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran dan pembiasaan perilaku peduli lingkungan melalui keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Pelaksanaannya mencakup kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, pengembangan kurikulum, kegiatan partisipatif, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan (KLHK, 2019).

Pada jenjang pendidikan dasar, Adiwiyata berperan penting dalam penanaman nilai karakter seperti tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan kepedulian lingkungan. Pendidikan lingkungan dilaksanakan tidak hanya secara kognitif, tetapi melalui pembiasaan, keteladanan, dan praktik nyata agar terbentuk kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman dinilai lebih

efektif dibandingkan pendekatan teoritis semata (Lickona, 2013; Tilbury, 2011).

Nilai-nilai Adiwiyata selaras dengan penguatan Profil Lulusan dalam Kurikulum Merdeka, khususnya dimensi beriman dan bertakwa, gotong royong, serta bernalar kritis. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan program inovatif yang relevan dengan kehidupan peserta didik dan lingkungannya, salah satunya melalui Program SEMATA di SDN Marunda 05.

Program SEMATA (Sedekah Minyak Jelantah)

Program SEMATA merupakan kegiatan pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga warga sekolah untuk dikelola secara ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan sekaligus sebagai media pembelajaran karakter yang kontekstual dan aplikatif bagi peserta didik.

Minyak jelantah dipilih karena merupakan limbah rumah tangga yang mudah dijumpai dan berpotensi mencemari tanah serta perairan jika dibuang sembarangan. Melalui Program SEMATA, peserta didik dibiasakan mengumpulkan minyak jelantah dari rumah dan menyerahkannya ke sekolah sebagai bentuk sedekah lingkungan.

Tujuan Program SEMATA adalah mengurangi potensi pencemaran, meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah rumah tangga, serta menanamkan nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan sejak dini. Program ini melibatkan siswa, guru, dan orang tua sehingga terbangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Implementasi Program SEMATA di SDN Marunda 05

Implementasi Program SEMATA di SDN Marunda 05 diawali dengan tahap perencanaan yang melibatkan tim Adiwiyata sekolah dengan Penanggung jawab Program Adiwiyata adalah Purwatiningsih, M.Pd. (Kepala Sekolah), Ketua

Adiwiyata Eka Wiyana, S.Pd.I., serta Koordinator SEMATA Nurpikah Prada, S.Pd. Pada tahap ini, melibatkan aktivis dari LAZ Rumah Sosial Kutub melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua mengenai bahaya minyak jelantah terhadap lingkungan serta pentingnya pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Edukasi terus dilakukan oleh guru melalui kegiatan pembelajaran di kelas, pertemuan orang tua, serta pemanfaatan media informasi sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Adiwiyata yang menekankan partisipasi aktif seluruh warga sekolah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Pada tahap pelaksanaan, peserta didik mengumpulkan minyak jelantah bekas pakai dari rumah menggunakan wadah yang aman dan tertutup. Minyak jelantah tersebut kemudian disetorkan ke sekolah secara berkala yaitu setiap hari Rabu. Selanjutnya, sekolah bekerja sama dengan LAZ Rumah Sosial Kutub sebagai mitra atau pihak pengelola yang kompeten untuk menyalurkan dan memanfaatkan minyak jelantah agar memiliki nilai guna serta tidak mencemari lingkungan. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta didik mengenai pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Peran guru sangat penting dalam memberikan pendampingan, keteladanan, dan penguatan motivasi kepada peserta didik agar program dapat berjalan secara konsisten. Orang tua berperan sebagai mitra sekolah dalam mendampingi anak selama proses pengumpulan minyak jelantah di rumah. Program SEMATA juga diintegrasikan ke dalam budaya sekolah dan kegiatan pembelajaran, sehingga menjadi bagian dari pembiasaan perilaku peduli lingkungan. Melalui integrasi tersebut, nilai-nilai kepedulian lingkungan dan sosial dapat tertanam secara berkelanjutan pada diri peserta didik (Lickona, 2013).

Sebagai penguat implementasi Program SEMATA di SDN Marunda 05, sekolah menyusun dan memanfaatkan media visual berupa poster edukatif. Poster ini digunakan sebagai sarana sosialisasi dan pengingat bagi warga sekolah mengenai

tujuan, mekanisme, serta nilai-nilai kepedulian lingkungan yang diusung dalam Program SEMATA.



*Gambar 1. Poster Program SEMATA (Sedekah Minyak Jelantah) sebagai Media Edukasi Lingkungan dalam Implementasi Program Adiwiyata di SDN Marunda 05
Sumber: Dokumentasi SDN Marunda 05*

Pelaksanaan Program SEMATA memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan warga sekolah. Peserta didik menjadi lebih memahami bahaya limbah minyak jelantah dan pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan pengumpulan minyak jelantah, peserta didik memperoleh pengalaman langsung yang efektif dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Selain itu, Program SEMATA berkontribusi dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta didik dilatih untuk bersikap peduli, bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama. Nilai sedekah yang terintegrasi dalam program ini juga menumbuhkan kepedulian sosial dan empati terhadap sesama serta lingkungan.

Keterlibatan orang tua memperkuat kerja sama antara sekolah dan keluarga. Orang tua berperan mendampingi dan memberi contoh pengelolaan limbah di rumah, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dampak lainnya adalah terciptanya lingkungan sekolah yang lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar, sesuai dengan prinsip Program Adiwiyata.

Program SEMATA dapat dikategorikan sebagai praktik baik karena bersifat partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan sekolah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat sekitar dalam mengelola minyak jelantah. Oleh karena itu, Program SEMATA berpotensi untuk dikembangkan dan diterapkan di sekolah lain.

Penutup

Program SEMATA (Sedekah Minyak Jelantah) merupakan inovasi SDN Marunda 05 dalam mendukung Program Adiwiyata melalui pendekatan edukatif dan aksi nyata. Program ini berhasil mengintegrasikan pendidikan lingkungan dengan pembentukan karakter peduli sosial.

Keberhasilan Program SEMATA menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup akan lebih efektif jika melibatkan seluruh warga sekolah dan dilaksanakan melalui kegiatan nyata. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Panduan Program Adiwiyata: Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan*. Jakarta: KLHK.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- Tilbury, D. (2011). *Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO.

Integrasi Nilai Karakter dan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

Shinta Meisuri ³¹

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku
Dirundeng Meulaboh*

“Karakter yang baik merupakan investasi seumur hidup, sedangkan sikap yang baik lebih utama dibanding kepintaran”.

Nilai merupakan landasan utama dalam pembentukan sikap dan perilaku peserta didik, sehingga pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pembentukan karakter melalui proses pembelajaran berperan strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka, pendidikan diarahkan tidak hanya untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir global, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pendidikan

³¹ Penulis lahir di Meulaboh, 21 Juni 2004, merupakan Mahasiswa Semester 8 di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

karakter menjadi kebutuhan yang mendesak dalam merespons tantangan degradasi nilai karakter di lingkungan pendidikan.

Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan dimana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik, Menurut Halimah dan Ritonga menunjukkan bahwa kurikulum merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa inti dari setiap kegiatan belajar adalah proses saling berinteraksi antara guru dan murid, sumber belajar, serta lingkungan sekitar. Hasil yang diinginkan menunjukkan bahwa pembentukan karakter merupakan pendidikan yang sangat penting dan harus diajarkan sejak usia dini. Kurikulum merdeka fokus pada pembelajaran yang berkualitas dan membentuk karakter siswa sesuai nilai Pancasila agar mereka siap menghadapi tantangan di dunia. Ini sesuai dengan taksonomi Bloom, yang menyebutkan bahwa kurikulum harus meliputi semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Strategi Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter merupakan sebuah proses yang memperkuat nilai-nilai positif dan mengembangkan karakter yang tangguh. Membangun karakter mencakup pembentukan kebiasaan positif, pengembangan kemampuan berkomunikasi, serta peningkatan kemampuan sosial.

Membangun karakter dapat dilakukan dengan cara menjaga integritas, dimana integritas merupakan kunci pengembangan karakter yang baik dan kuat. Individu harus mempertahankan kejujuran dan konsistensi dalam perilaku mereka. Misalnya, seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring dan menerima tugas ujian secara online. Meskipun tidak dipantau langsung dan memiliki kesempatan untuk mencari jawaban di internet atau bekerja sama dengan teman, ia tetap mengerjakan ujian secara mandiri. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia jujur dan konsisten dalam menjalani nilai-nilai yang ia percayai melalui perilaku yang ia tunjukkan.

Strategi lain juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan sosial, dimana kemampuan sosial merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan positif. Individu harus belajar mendengarkan, berbicara sopan, dan menghargai perbedaan pendapat. Mereka juga harus belajar bekerja sama dan membangun hubungan positif dengan orang lain. Misalnya di dunia kerja saat ini, di mana banyak perusahaan menggunakan sistem kerja tim secara daring. Dalam sebuah proyek kelompok yang dilakukan melalui aplikasi meeting online, setiap anggota tim memiliki latar belakang, ide, dan cara kerja yang berbeda. Orang yang memiliki kemampuan sosial yang baik bisa bekerja sama dengan orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan teman kerjanya, dan memberi saran dengan cara yang sopan. Ia juga menerima kritik dengan sikap terbuka dan berusaha mempertahankan hubungan yang baik agar tujuan bersama bisa tercapai.

Strategi lain juga dapat dilakukan dengan mempunyai tujuan hidup, dimana tujuan hidup dapat membantu individu mengarahkan energi dan motivasi mereka pada hal-hal yang penting. Tujuan yang jelas dan terukur dapat membantu seseorang mencapai potensinya dan membangun karier yang lebih baik. Individu harus belajar untuk memperluas pengetahuannya, mengembangkan keterampilan baru, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misalnya, seorang lulusan SMA memiliki tujuan hidup untuk bekerja di bidang teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menetapkan target yang terukur, seperti melanjutkan pendidikan di jurusan terkait, mengikuti kursus online pemrograman, dan memperoleh sertifikat digital yang banyak dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

P5 Dalam Kurikulum Merdeka

Proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan profil belajar Pancasila. Menurut (Maruti,dkk, 2023),

menyatakan bahwa program P5 ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter dan kompetensi yang baik agar dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Tujuan dari P5 adalah mengembangkan keterampilan peserta didik serta membuat proyek yang sesuai dengan profil pelajar pancasila. (Saraswati2022).

Tantangan Nilai Karakter Dalam Kurikulum Merdeka

Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, para guru menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kemampuan beradaptasi cepat dan persiapan untuk merubah cara mengajar yang selama ini mereka gunakan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksiapan guru dalam menerapkan kurikulum tersebut. Banyak guru merasa kesulitan dalam beralih dari cara mengajar yang teratur dan berfokus pada ujian ke cara mengajar yang lebih fleksibel, berbasis proyek, dan lebih menekankan pembentukan kemampuan serta sikap siswa. Tantangan lainnya adalah bagaimana guru harus memastikan setiap siswa berkembang, terutama dalam aspek nilai moral dan budaya. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya menekankan pada pelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa. Guru perlu menggabungkan nilai-nilai moral dan budaya dalam setiap materi yang diajarkan, yang tentu saja memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan penuh perhatian.

Selain kesulitan yang dihadapi oleh guru, orang tua juga memiliki peran penting dalam membantu kelancaran penerapan Kurikulum Merdeka. Salah satu masalah besar yang dihadapi orang tua adalah membantu anak-anak mereka tumbuh dengan kreativitas, tanggung jawab, disiplin, dan karakter yang baik. Tantangan lain adalah siap mendukung dan memahami penerapan Kurikulum Merdeka yang memerlukan perubahan cara pandang terhadap pendidikan. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih terbuka terhadap perubahan, memahami prinsip kurikulum, dan membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan mereka. Selain itu, orang tua juga harus memberikan bantuan nyata, seperti membantu anak-anak

menyelesaikan tugas atau proyek yang terdapat dalam kurikulum. Dengan tantangan yang dihadapi oleh guru dan orang tua, jelas bahwa keberhasilan menerapkan Kurikulum Merdeka membutuhkan kerja sama yang erat antara sekolah, guru, dan orang tua. Dukungan dari semua pihak sangat penting agar tujuan utama kurikulum, yaitu mengembangkan karakter, kreativitas, dan keterampilan siswa, dapat tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Faiz, A. (2022). Peran guru dalam pendidikan moral dan karakter. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 315–318.
- Hamzah, M. R., Mujiwati, Y., Khamdi, I. M., Usman, M. I., & Abidin, M. Z. (2022). Proyek Profil Pelajar Pancasila sebagai Penguatan Pendidikan Karakter pada Peserta Didik. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(04), 553–559.
- Putri, Nikmah Sistia Eka, Fatimah Setiani, and Muhammad Sandy Al Fath. “Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0: Building Character Education Based On The Merdeka Curriculum Towards Society Era 5.0.” *Pedagogik: Jurnal Pendidikan* 18.2 (2023): 194–201.
- Santika, T. (2018). Peran Keluarga, Guru Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *JUDIKA (Jurnal Pendidikan Unsika)*, 6(2), 77–85.
- Subianto, J. (2013). Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2).

Optimalisasi Pendidikan,

KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

dalam Membentuk Karakter Warga Negara

Mengkaji secara peran strategis pendidikan dalam membentuk warga negara yang berkarakter, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui beragam perspektif akademik dan praktik lapangan, buku ini menyoroti pentingnya implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, mulai dari penguatan wawasan nusantara, integrasi kearifan lokal, hingga tantangan literasi digital di era modern. Buku ini menegaskan posisi Pancasila sebagai landasan utama pendidikan kebangsaan dan karakter. Berbagai studi kasus dan inovasi pembelajaran ditampilkan, termasuk integrasi Profil Pelajar Pancasila, moderasi beragama, serta penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam aktivitas nyata. Pembahasan juga mencakup dinamika kurikulum, peran konstitusi, dan strategi pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Fokus utamanya pada rekonstruksi pendidikan karakter berbasis nilai, budaya, hukum, dan lingkungan. Melalui pendekatan interdisipliner, pembaca diajak memahami bagaimana pendidikan karakter dapat diperkuat melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, inovasi program sekolah, hingga kesadaran lingkungan dan sosial. Buku ini menjadi referensi penting bagi pendidik, akademisi, dan praktisi dalam mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan dan hukum untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.

Akademia Pustaka

Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

🌐 <https://akademiapustaka.com/>

✉ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

📘 @redaksi.akademia.pustaka

📞 @akademiapustaka

☎ 081216178398

ISBN 978-623-157-250-9



9 786231 157250 9